



T A H U N
2025

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

KABUPATEN KEBUMEN



Hj. Lilis Nuryani

Bupati Kebumen



H. Zaeni Miftah

Wakil Bupati Kebumen



Kebumenkab.go.id



[Pemkab Kebumen](#)



[@Pemkabkebumen](#)



[@Pemkab_kebumen](#)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamua'laikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin-Nya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan amanat pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam beberapa perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Laporan ini juga disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang menjunjung pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Laporan ini memuat capaian kinerja penyelenggaraan perangkat daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Untuk capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terbagi menjadi tiga komponen yaitu capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Terdapat juga laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Perangkat daerah yang telah berperan aktif dalam penyusunan laporan ini, sehingga LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat tersaji gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai capaian kinerja pemerintahan daerah, dan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kebumen pada masa mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyajian data dalam laporan ini. Besar harapan kami agar laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, perencanaan, dan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan kepada masyarakat pada masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Kebumen, 25 Maret 2026

The official stamp of the Bupati of Kebumen is a circular emblem. It features a central Garuda (mythological bird) with spread wings, perched on a shield. The shield contains a smaller Garuda. The words "BUPATI KEBUMEN" are written in a semi-circle above the Garuda, and "KEBUMEN" is written below it. Two small stars flank the central emblem. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.
BUPATI KEBUMEN
LINA NURYANI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL..... vii

DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1. Latar Belakang..... 1

1.1 Penjelasan Umum 2

 a. Undang-Undang Pembentukan Daerah..... 2

 b. Data Geografis Wilayah 3

 c. Jumlah Penduduk..... 5

 d. Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan 8

 e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah 9

 f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 14

1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah..... 16

 a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah 16

 b. Visi dan Misi Kepala Daerah 20

 c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah 21

 d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan..... 32

1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal..... 72

 a. Dasar Pertimbangan Penerapan SPM Pemerintah Kabupaten Kebumen 72

 b. Dasar Hukum Penerapan SPM Pemerintah Kabupaten Kebumen 73

 c. Kebijakan Umum 74

 d. Arah Kebijakan 76

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 81

2.1 Capaian Kinerja Makro 81

 2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 81

 2.1.2 Angka Kemiskinan 83

2.1.3	Tingkat Pengangguran	86
2.1.4	Pertumbuhan Ekonomi	87
2.1.5	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	88
2.1.6	Ketimpangan Pendapatan/Gini Rasio	90
2.2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	91
2.2.1	Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan.....	92
2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	106
2.2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	110
a.	Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	111
b.	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	112
c.	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	115
d.	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah	117
e.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai.....	119
f.	Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Target Kinerja.....	214
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN		288
1.	Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	288
2.	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota	288
3.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	289
3.1.	Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	289
3.1.1	Target Kinerja.....	289
3.1.2	Realisasi.....	289
3.2.	Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	290
3.2.1	Target Kinerja.....	291
3.2.2	Realisasi.....	291
3.3.	Permasalahan dan Kendala	292
3.4.	Saran dan Tindak Lanjut	292
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL		293

4.1	Urusan Pendidikan.....	293
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	293
4.1.2	Target Pencapaian SPM	293
4.1.3	Realisasi	296
4.1.4	Anggaran	298
4.1.5	Dukungan Personil	303
4.1.6	Permasalahan dan Solusi.....	303
4.2	Urusan Kesehatan	304
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	304
4.2.2	Target Pencapaian SPM	305
4.2.3	Realisasi	308
4.2.4	Anggaran	333
4.2.5	Dukungan Personil	335
4.2.6	Kendala yang Dihadapi	338
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	339
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	339
4.3.2	Target Pencapaian SPM	339
4.3.3	Realisasi	341
4.3.4	Anggaran	344
4.3.5	Dukungan Personil	345
4.3.6	Permasalahan dan Solusi.....	346
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	346
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	346
4.4.2	Target Pencapaian SPM	347
4.4.3	Realisasi	348
4.4.4	Anggaran	351
4.4.5	Dukungan Personil	352
4.4.6	Permasalahan dan Solusi.....	353
4.5	Urusan Trantibumlinmas.....	353
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	353
4.5.2	Target Pencapaian SPM	354
4.5.3	Realisasi	362
4.5.4	Anggaran	373
4.5.5	Dukungan Personil	377
4.5.6	Permasalahan dan Solusi.....	377
4.6	Urusan Sosial.....	378
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	378

4.6.2 Target Pencapaian SPM	378
4.6.3 Realisasi	383
4.6.4 Anggaran	392
4.6.5 Dukungan Personil	394
4.6.6 Permasalahan dan Solusi.....	394
4.7 Program dan Kegiatan	395
BAB V PENUTUP	401
LAMPIRAN.....	402

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Persebaran Cekungan Air Tanah di Kabupaten Kebumen 5

Tabel I.2 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2025 6

Tabel I.3 Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2025 7

Tabel I.4 Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Kabupaten Kebumen..... 8

Tabel I.5 Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah 9

Tabel I.6 Jumlah Perangkat Daerah dan ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2025 . 12

Tabel I.7 Realisasi APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2025* (*unaudited*)..... 14

Tabel I.8 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025 33

Tabel I.9 Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 70

Tabel I.10 Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM . 74

Tabel I.11 Integrasi SPM dalam Arah Kebijakan Pembangunan Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 78

Tabel II.1 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Kebumen 81

Tabel II.2 Indikator Kinerja Kunci 92

Tabel II.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 106

Tabel II.4 Pencapaian Indikator Sasaran IKU Kabupaten Kebumen Tahun 2025 110

Tabel II.5 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja..... 111

Tabel II.6 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja 112

Tabel II.7 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya 115

Tabel II.8 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target RPJMD 117

Tabel II.9 Efisiensi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 120

Tabel II.10 Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Target kinerja .. 214

Tabel III.1 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025..... 289

Tabel III.2 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025..... 290

Tabel IV.1 Target Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2025..... 293

Tabel IV.2 Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025 296

Tabel IV.3 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pendidikan (Pendidikan Anak Usia Dini) Tahun 2025.....	296
Tabel IV.4 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pendidikan (Pendidikan Dasar) Tahun 2025	297
Tabel IV.5 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pendidikan (Pendidikan Kesetaraan) Tahun 2025	298
Tabel IV.6 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2025	298
Tabel IV.7 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025 ..	298
Tabel IV.8 Rincian Alokasi Anggaran Dasar Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025	299
Tabel IV.9 Dukungan Personel Penerapan SPM Kabupaten Kebumen Tahun 2025	303
Tabel IV.10 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2025	303
Tabel IV.11 Target Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2025.....	305
Tabel IV.12 Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025.....	308
Tabel IV.13 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil) Tahun 2025.....	309
Tabel IV.14 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin) Tahun 2025.....	311
Tabel IV.15 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir) Tahun 2025	313
Tabel IV.16 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Balita) Tahun 2025	314
Tabel IV.17 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar) Tahun 2025.....	316

Tabel IV.18 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif) Tahun 2025	319
Tabel IV.19 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut) Tahun 2025	321
Tabel IV.20 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi) Tahun 2025.....	323
Tabel IV.21 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus) Tahun 2025	325
Tabel IV.22 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan ODGJ) Tahun 2025	327
Tabel IV.23 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis) Tahun 2025.....	328
Tabel IV.24 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus HIV) Tahun 2025.....	330
Tabel IV.25 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2025	332
Tabel IV.26 Alokasi Anggaran Dasar Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025	333
Tabel IV.27 Rincian Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025.....	333
Tabel IV.28 Dukungan Personel Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2025.....	335
Tabel IV.29 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2025	338
Tabel IV.30 Target Capaian SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2025.....	340
Tabel IV.31 Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2025	341
Tabel IV.32 Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2025	341

Tabel IV.33 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum (Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik) Tahun 2025	342
Tabel IV.34 Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2025	344
Tabel IV.35 Rincian Kegiatan Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2025	344
Tabel IV.36 Dukungan Personel Penerpan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2025	346
Tabel IV.37 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2025	346
Tabel IV.38 Target Capaian SPM Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2025.....	347
Tabel IV.39 Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2025	348
Tabel IV.40 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat (Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten) Tahun 2025	349
Tabel IV.41 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat (Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten) Tahun 2025	349
Tabel IV.42 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2025.....	350
Tabel IV.43 Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2025	351
Tabel IV.44 Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2025	351
Tabel IV.45 Dukungan Personel Penerpan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2025	352
Tabel IV.46 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2025.....	353
Tabel IV.47 Target Capaian SPM Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2025	354
Tabel IV.48 Realisasi Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2025	362

Tabel IV.49 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum) Tahun 2025.....	362
Tabel IV.50 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan informasi rawan bencana) Tahun 2025.....	363
Tabel IV.51 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan informasi rawan bencana) Tahun 2025.....	365
Tabel IV.52 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan informasi rawan bencana) Tahun 2025.....	369
Tabel IV.53 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran) Tahun 2025.....	371
Tabel IV.54 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2025	372
Tabel IV.55 Alokasi Anggaran SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2025	373
Tabel IV.56 Alokasi Anggaran SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2025	373
Tabel IV.57 Dukungan Personel Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2025	377
Tabel IV.58 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2025	377
Tabel IV.59 Target Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2025	379
Tabel IV.60 Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2025	383
Tabel IV.61 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial) Tahun 2025.....	384
Tabel IV.62 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial) Tahun 2025.....	386

Tabel IV.63 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial) Tahun 2025	387
Tabel IV.64 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial) Tahun 2025 ..	389
Tabel IV.65 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten) Tahun 2025	390
Tabel IV.66 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2025	391
Tabel IV.67 Alokasi Anggaran Dasar SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2025.....	392
Tabel IV.68 Rincian Kegiatan Anggaran Dasar SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2025.....	392
Tabel IV.69 Dukungan Personel Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen	394
Tabel IV.70 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2025	394

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen 3

Gambar II.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen. 2015-2024..... 83

Gambar II.2 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kebumen 2015-2025 85

Gambar II.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen. 2019 – 2025 . 87

Gambar II.4 PDRB per Kapita Kabupaten Kebumen Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) Tahun 2021 - 2025..... 89

Gambar II.5 Perhitungan Efisiensi Anggaran..... 119

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa dasar hukum lainnya yang mendasari penyusunan LPPD ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Kebumen yang merupakan salah satu kabupaten di Indonesia juga berkewajiban untuk menyusun LPPD. Penyusunan LPPD Kabupaten Kebumen dilakukan oleh tim penyusun LPPD dan telah dilakukan reviu oleh tim pereviu. LPPD Kabupaten Kebumen juga telah memenuhi persyaratan bahwa paling lambat diserahkan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dokumen LPPD yang telah dibuat dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat. Penyusunan LPPD ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

Dokumen LPPD Kabupaten Kebumen ini berisi satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah yang terdiri atas data-data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memuat capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, laporan penerapan standar pelayanan minimal yang memuat hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal, kendala penerapan standar pelayanan minimal dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal. Selain beberapa hal tersebut, LPPD juga memuat capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan baik yang diberikan oleh provinsi ataupun pemerintah pusat. LPPD Kabupaten Kebumen disampaikan oleh

Bupati Kebumen kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

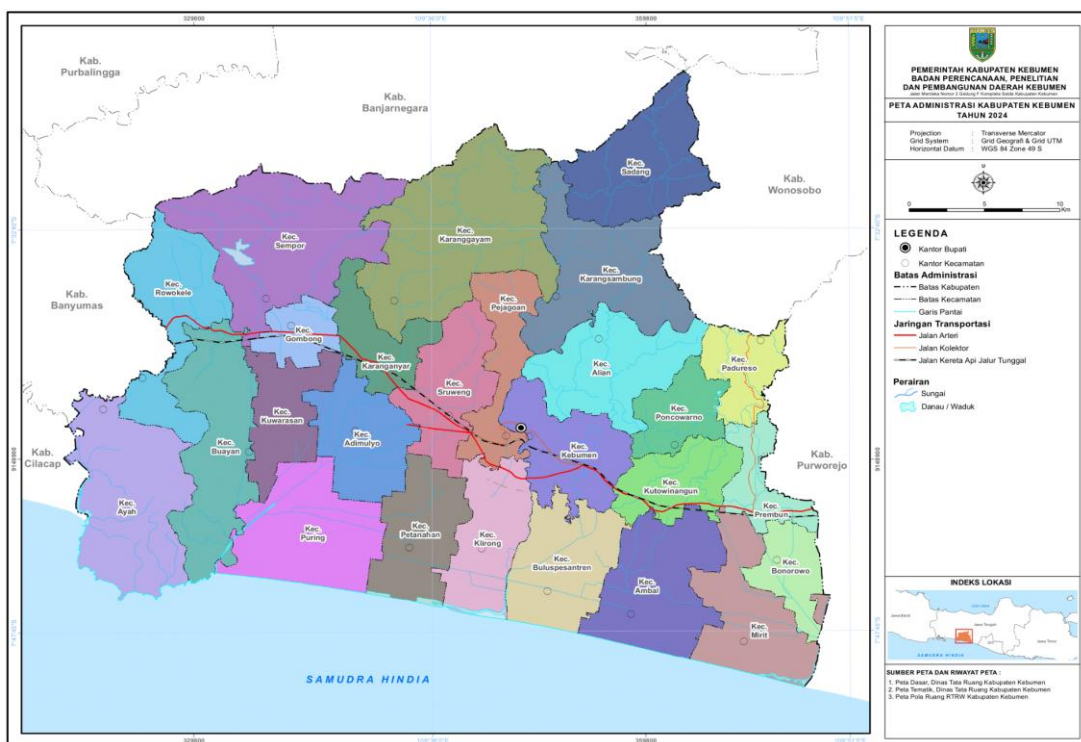
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025; dan
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak di antara 7°27'-7°50' Lintang Selatan dan 109°33'-109°50' Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Kebumen berbatasan dengan :

- Sebelah timur : Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo
- Sebelah selatan : Samudera Hindia
- Sebelah barat : Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta
- Sebelah utara : Kabupaten Banjarnegara

Luas wilayah Kabupaten Kebumen sebesar kurang lebih 133.409 hektar atau 1.334,09 kilometer persegi. Dilihat dari kondisi/kawasan, topografi Kabupaten Kebumen secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) klaster wilayah, yaitu wilayah pegunungan yang terletak di bagian utara wilayah, wilayah dataran rendah yang terletak di bagian tengah, serta wilayah pantai yang terletak di bagian selatan.



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

Gambar I.1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen

Wilayah Kabupaten Kebumen 61% berada pada ketinggian 0-997,5 meter dengan karakteristik wilayah berupa pesisir, dataran rendah, dan kawasan perbukitan. Sementara kemiringan tanah di wilayah Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan yaitu:

Kabupaten Kebumen juga terdapat dua waduk besar yaitu Waduk Sempor yang berada di Kecamatan Sempor dengan kapasitas tampung normal sebesar 52 juta meter kubik (m³) atau kapasitas efektif sekitar 46,5 juta m³ dan Waduk Wadaslintang dengan kapasitas penyimpanan air 443 juta m³ (kapasitas normal/maksimum) atau 408 juta m³ (kapasitas efektif) yang digunakan sebagai sumber air untuk wilayah Kabupaten Kebumen.

Sedangkan air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan mengandung air (akuifer) di bawah permukaan tanah. Air tanah dibagi menjadi dua yakni air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur. Salah satu jenis air tanah dalam adalah Cekungan Air Tanah. Kabupaten Kebumen memiliki tiga cekungan tanah yang meliputi Cekungan Air Tanah Banyumudal, Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo dan Cekungan Air Tanah Kroya. Persebaran cekungan air tanah di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Tabel I.1 Persebaran Cekungan Air Tanah di Kabupaten Kebumen

NO	CEKUNGAN AIR TANAH	LOKASI	LUAS (Ha)
1	Cekungan Air Tanah Banyumudal	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah dan Buayan.	6.961,48
2	Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo	Sebagian wilayah Kecamatan Gombang, Buayan, Karanganyar, Kuwarasan, Puring, Adimulyo, Sruweng, Petanahan, Klirong, Alian, Kebumen, Buluspesantren, Kutowinangun, Ambal, Mirit, Prembun, Bonorowo, Poncowarno dan Padureso.	60.440,13
3	Cekungan Air Tanah Kroya	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah.	2.404,64

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 Semester 2 tercatat sebanyak 1.453.417 jiwa, tumbuh sebesar 0,45% dari tahun 2024 Semester 2. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 736.988 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 716.429 jiwa. Adapun secara terperinci jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen

berdasarkan jenis kelamin tahun 2025 Semester 2 sebagaimana data berikut ini:

Tabel I.2 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH (JIWA)	%
	NAMA	JUMLAH	%	JUMLAH	%		
1	Ayah	34.948	50,64	34.062	49,36	69.010	4,75
2	Buayan	36.019	51,03	34.569	48,97	70.588	4,86
3	Puring	34.500	50,71	33.529	49,29	68.029	4,68
4	Petanahan	32.652	50,61	31.865	49,39	64.517	4,44
5	Klirong	34.506	50,69	33.565	49,31	68.071	4,68
6	Buluspesantren	32.032	50,88	30.926	49,12	62.958	4,33
7	Ambal	34.123	50,81	33.029	49,19	67.152	4,62
8	Mirit	29.116	50,71	28.299	49,29	57.415	3,95
9	Prembun	15.333	50,21	15.207	49,79	30.540	2,10
10	Kutowinangun	25.810	50,70	25.100	49,30	50.910	3,50
11	Alian	36.766	50,97	35.361	49,03	72.127	4,96
12	Kebumen	69.643	50,59	68.006	49,41	137.649	9,47
13	Pejagoan	29.748	50,90	28.691	49,10	58.439	4,02
14	Sruweng	32.892	50,47	32.275	49,53	65.167	4,48
15	Adimulyo	19.717	49,98	19.735	50,02	39.452	2,71
16	Kuwarasan	27.509	51,00	26.428	49,00	53.937	3,71
17	Rowokele	27.507	50,51	26.950	49,49	54.457	3,75
18	Sempor	37.520	50,81	36.330	49,19	73.850	5,08
19	Gombong	25.304	49,82	25.483	50,18	50.787	3,49
20	Karanganyar	19.442	50,40	19.133	49,60	38.575	2,65
21	Karanggayam	32.487	51,15	31.030	48,85	63.517	4,37
22	Sadang	12.523	51,40	11.840	48,60	24.363	1,68
23	Bonorowo	11.695	50,87	11.295	49,13	22.990	1,58
24	Padureso	8.968	50,46	8.806	49,54	17.774	1,22
25	Poncowarno	10.159	50,80	9.840	49,20	19.999	1,38
26	Karangsambung	26.069	50,97	25.075	49,03	51.144	3,52
Jumlah		736.988	50,71	716.429	49,29	1.453.417	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. 2025

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa Kecamatan Kebumen merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk yang terbesar dengan jumlah 137.649 jiwa atau 9,47% dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Kebumen, sedangkan jumlah penduduk yang terkecil adalah Kecamatan Padureso dengan jumlah penduduk sebanyak 17.774 jiwa atau 1,22% dari jumlah penduduk Kabupaten Kebumen.

Angka Pertambahan Penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya, Secara

rinci data pertumbuhan penduduk Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.3 Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	KECAMATAN		JUMLAH PENDUDUK SEKARANG		JUMLAH PENDUDUK TAHUN SEBELUM		ANGKA PERTUMBUHAN PENDUDUK
	KODE	NAMA	JIWA	%	JIWA	%	
1	33.05.01	Ayah	69,010	4.75	68,627	4.74	0.55
2	33.05.02	Buayan	70,588	4.86	70,184	4.85	0.57
3	33.05.03	Puring	68,029	4.68	67,646	4.68	0.56
4	33.05.04	Petanahan	64,517	4.44	64,133	4.43	0.60
5	33.05.05	Klirong	68,071	4.68	67,837	4.69	0.34
6	33.05.06	Buluspesantren	62,958	4.33	62,523	4.32	0.69
7	33.05.07	Ambal	67,152	4.62	66,910	4.62	0.36
8	33.05.08	Mirit	57,415	3.95	56,981	3.94	0.76
9	33.05.09	Prembun	30,540	2.10	30,427	2.10	0.37
10	33.05.10	Kutowinangun	50,910	3.50	50,629	3.50	0.55
11	33.05.11	Alian	72,127	4.96	71,633	4.95	0.68
12	33.05.12	Kebumen	137,649	9.47	137,292	9.49	0.26
13	33.05.13	Pejagoan	58,439	4.02	58,121	4.02	0.54
14	33.05.14	Sruweng	65,167	4.48	64,953	4.49	0.33
15	33.05.15	Adimulyo	39,452	2.71	39,342	2.72	0.28
16	33.05.16	Kuwarsan	53,937	3.71	53,651	3.71	0.53
17	33.05.17	Rowokele	54,457	3.75	54,249	3.75	0.38
18	33.05.18	Sempor	73,850	5.08	73,595	5.09	0.35
19	33.05.19	Gombong	50,787	3.49	50,869	3.52	-0.16
20	33.05.20	Karanganyar	38,575	2.65	38,690	2.67	-0.30
21	33.05.21	Karanggayam	63,517	4.37	63,190	4.37	0.51
22	33.05.22	Sadang	24,363	1.68	24,199	1.67	0.67
23	33.05.23	Bonorowo	22,990	1.58	22,887	1.58	0.45
24	33.05.24	Padureso	17,774	1.22	17,592	1.22	1.02
25	33.05.25	Poncowarno	19,999	1.38	19,850	1.37	0.75
26	33.05.26	Karangsambung	51,144	3.52	50,823	3.51	0.63
Jumlah			1,453,417	100.00	1,446,833	100.00	0.45

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. 2025

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Semester 2 adalah sebesar 0,45%. Data ini merupakan data hasil pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Dengan angka pertumbuhan tersebut di atas perlu diperhatikan adanya kemungkinan terjadinya masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh, kriminalitas dan lain sebagainya.

d. Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan

Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan. 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.949 dan 6.818 Rukun Tetangga (RT). Pada Tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Kebumen adalah 1.451.748 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 736.258 jiwa dan perempuan sebanyak 715.490 jiwa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Karanggayam dengan total luas 109,29 km2 atau 8,53%, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Gombang yaitu 19,48 km2 atau 1,52% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Kebumen.

Tabel I.4 Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Kabupaten Kebumen

NO	KECAMATAN	JUMLAH			
		DESA	KELURAHAN	RW	RT
1	Ayah	18	0	82	416
2	Buayan	20	0	90	346
3	Puring	23	0	99	320
4	Petanahan	21	0	80	269
5	Klirong	24	0	101	305
6	Buluspesantren	21	0	89	290
7	Ambal	32	0	116	313
8	Mirit	22	0	69	266
9	Bonorowo	11	0	42	139
10	Prembun	13	0	40	139
11	Padureso	9	0	23	85
12	Kutowinangun	19	0	80	245
13	Alian	16	0	73	286
14	Poncowarno	11	0	34	99
15	Kebumen	29	5	142	614
16	Pejagoan	13	0	68	266
17	Sruweng	21	0	99	348
18	Adimulyo	23	0	81	231
19	Kuwarasan	22	0	86	248
20	Rowokele	11	0	61	327
21	Sempor	16	0	78	377
22	Gombang	14	2	82	294
23	Karanganyar	11	4	60	243
24	Karanggayam	19	0	76	404
25	Sadang	7	0	37	151

NO	KECAMATAN	JUMLAH			
		DESA	KELURAHAN	RW	RT
26	Karangsambung	14	0	64	267

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel melalui pengaturan kelembagaan yang jelas, berikut disajikan rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum sebagai berikut:

Tabel I.5 Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH		DASAR HUKUM
1	Sekretariat Daerah		Perbup Nomor 108 Tahun 2021
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Perbup Nomor 109 Tahun 2021
3	Inspektorat Daerah		Perbup Nomor 110 Tahun 2021
4	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Perbup Nomor 56 Tahun 2023
	a	Rumah Sakit Umum Daerah	Perbup Nomor 134 Tahun 2021
	b	Pusat Kesehatan Masyarakat	Perbup Nomor 135 Tahun 2021
	c	UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru	Perbup Nomor 136 Tahun 2021
	d	UPTD Laboratorium Kesehatan	Perbup Nomor 137 Tahun 2021
5	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		Perbup Nomor 112 Tahun 2021
	a	Satuan Pendidikan	Perbup Nomor 138 Tahun 2021
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Perbup Nomor 113 Tahun 2021
	a	UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Perbup Nomor 139 Tahun 2021
	b	UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Perbup Nomor 140 Tahun 2021
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		Perbup Nomor 22 Tahun 2024
8	Satuan Polisi Pamong Praja		Perbup Nomor 115 Tahun 2021
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Perbup Nomor 116 Tahun 2021
	a	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Perbup Nomor 70 Tahun 2024
10	Dinas Tenaga Kerja		Perbup Nomor 117 Tahun 2021

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH		DASAR HUKUM
	a	UPTD Balai Latihan Kerja	Perbup Nomor 141 Tahun 2021
11		Dinas Pertanian dan Pangan	Perbup Nomor 118 Tahun 2021
12		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perbup Nomor 119 Tahun 2021
	a	UPTD Pasar	Perbup Nomor 142 Tahun 2021
	b	UPTD Metrologi Legal	Perbup Nomor 143 Tahun 2021
	c	UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun- Alun Kebumen	Perbup Nomor 23 Tahun 2024
13		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perbup Nomor 120 Tahun 2021
14		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perbup Nomor 121 Tahun 2021
15		Dinas Komunikasi dan Informatika	Perbup Nomor 122 Tahun 2021
16		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Perbup Nomor 123 Tahun 2021
17		Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	Perbup Nomor 124 Tahun 2021
	a	UPTD Laboratorium Lingkungan	Perbup Nomor 144 Tahun 2021
	b	UPTD Pengelolaan Air Limbah dan Sampah	Perbup Nomor 145 Tahun 2021
18		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Perbup Nomor 125 Tahun 2021
19		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perbup Nomor 126 Tahun 2021
20		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi	Perbup Nomor 19 Tahun 2024
21		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perbup Nomor 128 Tahun 2021
22		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Perbup Nomor 129 Tahun 2021
23		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perbup Nomor 130 Tahun 2021
24		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perbup Nomor 131 Tahun 2021
25		Kecamatan Adimulyo	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
26		Kecamatan Alian	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
27		Kecamatan Ambal	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
28		Kecamatan Ayah	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
29		Kecamatan Bonorowo	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
30		Kecamatan Buayan	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
31		Kecamatan Buluspesantren	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
32		Kecamatan Gombong	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
	a	Kelurahan Gombong	Perbup Nomor 87 Tahun 2016
	b	Kelurahan Wonokriyo	Perbup Nomor 87 Tahun 2016
33		Kecamatan Karanganyar	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
	a	Kelurahan Karanganyar	Perbup Nomor 87 Tahun 2016

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH		DASAR HUKUM
	b	Kelurahan Plarangan	Perbup Nomor 87 Tahun 2016
	c	Kelurahan Panjatan	Perbup Nomor 87 Tahun 2016
	d	Kelurahan Jatiluhur	Perbup Nomor 87 Tahun 2016
34	Kecamatan Karanggayam		Perbup Nomor 86 Tahun 2016
35	Kecamatan Karangsambung		Perbup Nomor 86 Tahun 2016
36	Kecamatan Kebumen		Perbup Nomor 86 Tahun 2016
	a	Kelurahan Kebumen	Perbup Nomor 87 Tahun 2016
	b	Kelurahan Bumirejo	Perbup Nomor 87 Tahun 2016
	c	Kelurahan Panjer	Perbup Nomor 87 Tahun 2016
	d	Kelurahan Tamanwinangun	Perbup Nomor 87 Tahun 2016
	e	Kelurahan Selang	Perbup Nomor 87 Tahun 2016
37	Kecamatan Klirong		Perbup Nomor 86 Tahun 2016
38	Kecamatan Kutowinangun		Perbup Nomor 86 Tahun 2016
39	Kecamatan Kuwarasan		Perbup Nomor 86 Tahun 2016
40	Kecamatan Mirit		Perbup Nomor 86 Tahun 2016
41	Kecamatan Padureso		Perbup Nomor 86 Tahun 2016
42	Kecamatan Pejagoan		Perbup Nomor 86 Tahun 2016
43	Kecamatan Petanahan		Perbup Nomor 86 Tahun 2016
44	Kecamatan Poncowarno		Perbup Nomor 86 Tahun 2016
45	Kecamatan Prembun		Perbup Nomor 86 Tahun 2016
46	Kecamatan Puring		Perbup Nomor 86 Tahun 2016
47	Kecamatan Rowokele		Perbup Nomor 86 Tahun 2016
48	Kecamatan Sadang		Perbup Nomor 86 Tahun 2016
49	Kecamatan Sempor		Perbup Nomor 86 Tahun 2016
50	Kecamatan Sruweng		Perbup Nomor 86 Tahun 2016
51	Staf Ahli Bupati		Perbup Nomor 88 Tahun 2016

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, 2025

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 16 (enam belas) Dinas, 5 (lima) Badan, dan 26 Kecamatan. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil yang tersebar pada perangkat daerah tersebut sampai dengan tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel I.6 Jumlah Perangkat Daerah dan ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	RINCIAN ASN			TOTAL
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	18	22	47
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	14	7	28
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	21	9	37
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	20	18	56	94
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	7	33	11	51
6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5	20	4	29
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	21	13	41
8	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34	1590	307	1931
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	23	9	38
10	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	12	33	88	133
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7	12	32	51
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18	35	139	192
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	21	10	37
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	15	5	23
15	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	12	7219	497	7728
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11	23	75	109
17	Dinas Pertanian dan Pangan	8	115	81	204
18	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	9	14	59	82
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	12	12	31

NO	PERANGKAT DAERAH	RINCIAN ASN			TOTAL
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
20	Dinas Tenaga Kerja	6	30	11	47
21	Inspektorat Daerah	8	53	10	71
22	Kecamatan Adimulyo	6	3	8	17
23	Kecamatan Alian	6	3	7	16
24	Kecamatan Ambal	4	3	8	15
25	Kecamatan Ayah	6	3	9	18
26	Kecamatan Bonorowo	6	2	8	16
27	Kecamatan Buayan	5	3	10	18
28	Kecamatan Buluspesantren	6	3	6	15
29	Kecamatan Gombong	14	3	12	29
30	Kecamatan Karanganyar	23	3	14	40
31	Kecamatan Karanggayam	5	3	8	16
32	Kecamatan Karangsambung	8	2	8	18
33	Kecamatan Kebumen	27	2	19	48
34	Kecamatan Klirong	6	3	4	13
35	Kecamatan Kutowinangun	5	2	6	13
36	Kecamatan Kuwarasan	7	3	6	16
37	Kecamatan Mirit	6	3	7	16
38	Kecamatan Padureso	4	3	5	12
39	Kecamatan Pejagoan	6	3	7	16
40	Kecamatan Petanahan	6	3	9	18
41	Kecamatan Poncowarno	6	3	5	14
42	Kecamatan Prembun	6	3	6	15
43	Kecamatan Puring	7	3	7	17
44	Kecamatan Rowokele	8	3	8	19
45	Kecamatan Sadang	6	3	9	18
46	Kecamatan Sempor	6	3	8	17
47	Kecamatan Sruweng	4	3	8	15
48	Satuan Polisi Pamong Praja	12	44	47	103
49	Sekretariat Daerah	20	61	75	156
50	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	7	4	14	25
JUMLAH		445	9.523	1.805	11.773

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen. 2025

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penetapan kebijakan umum keuangan daerah meliputi penetapan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengacu pada upaya pencapaian sasaran pembangunan yang ingin dicapai dengan asumsi-asumsi perkembangan kondisi makro ekonomi daerah. Undang-undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan masyarakat.

Mendasari hal tersebut diatas realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 mencapai Rp.3.069.382.617.300,00* dari target sebesar Rp.3.004.119.240.372,00 atau sebesar 102,17%*, capaian realisasi pendapatan daerah pada tahun 2024 juga mengalami penurunan sejumlah Rp.68.311.662.334,00* atau sebesar -2,23%* bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2024 Rp.3.137.694.279.634,00.

Sementara itu realisasi belanja daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 mencapai Rp.3.026.233.409.159,00* dari target sebesar Rp. 3.182.084.932.318,00 atau sebesar 95,10%*, capaian belanja daerah tersebut mengalami penurunan sejumlah Rp.100.461.124.298,00* atau sebesar -3,32%* bila dibandingkan dengan realisasi belanja daerah pada tahun 2024 Rp.3.126.694.533.457,00.

APBD Kabupaten Kebumen ditutup dengan mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp.221.114.900.087,98. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel I.7 Realisasi APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2025* (*unaudited*)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	BELANJA DAERAH	3.182.084.932.318,00	3.026.233.409.159,00	95,10
I	BELANJA OPERASI	2.204.343.422.822,00	2.096.558.254.978,00	95,11
1	Belanja Pegawai	1.323.212.839.150,00	1.250.895.562.484,00	94,53
2	Belanja Barang dan Jasa	791.182.457.061,00	758.424.174.184,00	95,85
3	Belanja Subsidi	1.261.000.000,00	1.006.285.500,00	79,80
4	Belanja Hibah	83.154.555.750,00	81.622.161.830,00	98,15
5	Belanja Bantuan Sosial	5.532.570.861,00	4.610.070.980,00	83,32

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
II	BELANJA MODAL	287.770.284.496,00	273.159.208.471,00	94,92
1	Belanja Modal Tanah	19.693.384.013,00	13.937.894.872,00	70,77
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.873.313.130,00	49.291.706.864,00	93,22
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.419.291.203,00	37.305.859.562,00	97,10
4	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	163.133.015.500,00	159.025.107.059,00	97,48
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.651.280.650,00	13.598.640.114,00	99,61
III	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.800.000.000,00	1.035.914.118,00	8,77
1	Belanja Tidak Terduga	11.800.000.000,00	1.035.914.118,00	8,77
IV	BELANJA TRANSFER	678.171.225.000,00	655.480.031.592,00	96,65
1	Belanja Bagi Hasil	17.268.094.000,00	16.855.990.980,00	97,61
2	Belanja Bantuan Keuangan	660.903.131.000,00	638.624.040.612,00	96,62
	PENDAPATAN	3.004.119.240.372	3.069.382.617.300	102,17
V	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1	Pajak Daerah	232.526.294.000,00	222.396.578.469,00	95,64
2	Retribusi Daerah	303.068.953.000,00	319.213.411.905,00	105,32
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.427.594.405,00	24.341.513.937,00	113,59
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.880.690.422,00	14.532.554.119,00	122,32
	JUMLAH (V)	568.903.531.827,00	580.484.058.430,00	102,03
VI	PENDAPATAN TRANSFER			
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.288.110.093.438,00	2.331.162.442.341,00	101,88
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	147.105.615.107,00	157.736.116.529,00	107,22
3	Bantuan Keuangan			
	JUMLAH (VI)	2.435.215.708.545,00	2.488.898.558.870,00	102,20
VII	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
1	Pendapatan Hibah	0	0	0
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
	JUMLAH (VII)	0	0	0

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
VIII	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	188.065.691.946,00	187.965.691.946,98	99,94
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	185.965.691.946,00	185.965.691.946,98	100,00
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	2.100.000.000,00	2.000.000.000,00	95,23
IX	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.100.000.000,00	10.000.000.000,00	99,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2	Penyertaan Modal Daerah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00
3	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.000.000.000,00	95,23
X	PEMBIAYAAN NETTO	177.965.691.946,00	177.965.691.946,98	100,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

1.2Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

1) Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis pembangunan daerah merupakan permasalahan utama daerah yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 serta prioritas kebijakan nasional dan provinsi yang bersifat mandatori. Adapun Isu strategis permasalahan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas;
2. Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif;
3. Kesejahteraan ekonomi masyarakat;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;

6. Kondusivitas wilayah dan kemampuan adaptasi dan mitigasi bencana; dan
7. Peningkatan nilai budaya masyarakat.

2) Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, telah dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yaitu **“Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia”** yang selanjutnya menjadi Tema Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam prioritas pembangunan daerah sebagaimana berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif;
3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
4. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat.

Penjabaran lebih lanjut dari 5 (lima) prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 akan dicapai melalui fokus pada upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dilakukan melalui upaya:
 - a. Peningkatan tata kelola organisasi dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan;
 - b. Penerapan *merit system* dalam rangka peningkatan manajemen sumber daya aparatur pemerintah;
 - c. Optimalisasi pengendalian pembangunan, pengelolaan dan analisis data serta pengembangan riset dan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan;

- d. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah; dan
 - e. Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang andal dan terintegrasi dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif, dilakukan melalui upaya:
- a. Peningkatan mutu dan layanan kesehatan dan implementasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. Peningkatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan gizi masyarakat serta kesehatan ibu dan anak;
 - c. Peningkatan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka pencapaian SPM Kesehatan;
 - d. Peningkatan akses layanan pendidikan inklusif dan penerapan penjaminan mutu pendidikan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pendidikan;
 - e. Dukungan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Tengah yaitu Wajib Belajar 13 Tahun pada 1 tahun usia pra sekolah serta pendidikan kesetaraan dengan fokus Pusat Kegiatan Belajar Mengajar sebagai ujung tombak penanganan anak tidak sekolah;
 - f. Peningkatan kualitas dan kompetensi guru secara berkelanjutan;
 - g. Penguatan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti; dan
 - h. Peningkatan pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan Kebumen layak anak.
3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dilakukan melalui upaya:
- a. Pengembangan komoditas unggulan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian;
 - b. Peningkatan skala ekonomi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor industri;

- c. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor jasa;
 - d. Pengembangan keanekaragaman budaya, hayati dan geologi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam rangka pengendalian harga;
 - f. Peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
 - g. Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan serta optimalisasi pemanfaatan lahan pangan lestari dalam rangka penguatan ketahanan pangan;
 - h. Peningkatan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan; dan
 - i. Peningkatan perlindungan tenaga kerja baik pada sektor formal maupun informal.
4. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, dilakukan melalui upaya:
- a. Pengembangan sistem dan jaringan infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Optimalisasi sistem jaringan air bersih perpipaan dalam rangka peningkatan layanan air bersih;
 - c. Pengembangan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hunian masyarakat;
 - d. Peningkatan Upaya konservasi dalam rangka pelestarian lingkungan; dan
 - e. Penataan Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaan persampahan serta limbah dalam rangka meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat, dilakukan melalui upaya:
- a. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini;

- b. Peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak tahun 2025 dalam rangka penguatan demokrasi;
- c. Penguatan kapasitas Desa Tangguh Bencana dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan bencana; dan
- d. Pengembangan dan pelestarian budaya dalam rangka peningkatan optimalisasi nilai-nilai budaya masyarakat.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Sejahtera : Sejahtera merupakan suatu perwujudan kondisi keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin. secara merata;
2. Mandiri : Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, sehingga mandiri diterjemahkan sebagai perekonomian yang berpihak pada masyarakat, ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi;

3. Berakhlak : Berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama;
4. Bersama Rakyat : Masyarakat tidak hanya sekedar obyek namun juga sebagai subyek pembangunan. Diharapkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kabupaten Kebumen.

Dalam upaya pencapaian visi pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah antara lain:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2016-2021 difokuskan dalam rangka pencapaian sasaran RPJMD dan mencapai visi dan misi daerah dan pencapaian SPM yang dijabarkan dalam 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan

Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 7 (tujuh) Urusan Pemerintahan Pilihan, 2 (dua) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, 5 (lima) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, 1 (satu) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, 1 (satu) Unsur Kewilayahan, serta 1 (satu) Unsur Pemerintahan Umum. Secara garis besar fokus dan prioritas masing-masing program adalah sebagai berikut:

1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Pengelolaan Pendidikan; dan
- b) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Kesehatan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
- d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; dan
- e) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- d) Program Penataan Bangunan Gedung;
- e) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- f) Program Penyelenggaraan Jalan;
- g) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- h) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan

- i) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a) Program Pengembangan Perumahan;
 - b) Program Kawasan Permukiman;
 - c) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; dan
 - d) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
- 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - b) Program Penanggulangan Bencana
 - c) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
 - d) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 6. Sosial
Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a) Program Pemberdayaan Sosial;
 - b) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
 - c) Program Rehabilitasi Sosial;
 - d) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - e) Program Penanganan Bencana;
 - f) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan; dan
 - g) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b) Program Penempatan Tenaga Kerja;
- c) Program Hubungan Industrial;

d) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- b) Program Perlindungan Perempuan;
- c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- d) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- e) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
- f) Program Perlindungan Khusus Anak.

3. Pangan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
- b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- c) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- d) Program Pengawasan Keamanan Pangan;
- e) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Pertanahan

Program yang dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang pertanahan adalah Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penanganan sengketa lahan.

5. Lingkungan Hidup

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);

- e) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - f) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 - g) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 - h) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
 - i) Program Pengelolaan Persampahan;
 - j) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a) Program Pendaftaran Penduduk;
 - b) Program Pencatatan Sipil;
 - c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - d) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a) Program Penataan Desa;
 - b) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
 - c) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
 - d) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
 - e) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a) Program Pengendalian Penduduk;
 - b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
 - c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
9. Perhubungan
- Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

- b) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

10. Komunikasi dan Informatika

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Informasi Dan Komunikasi Publik;
- b) Program Aplikasi Informatika;
- c) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- b) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
- c) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- d) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
- e) Program Pengembangan UMKM.

12. Penanaman Modal

Program yang dilaksanakan adalah

- a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b) Program Promosi Penanaman Modal;
- c) Program Pelayanan Penanaman Modal;
- d) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- e) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- f) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; dan
- c) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

14. Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, melalui penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota dengan fokus

pada pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral.

15. Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi yang diarahkan pada penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang difokuskan pada penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

16. Kebudayaan

Program yang dilaksanakan adalah

- a) Program Pengembangan Kebudayaan; dan
- b) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

17. Perpustakaan

Program yang dilaksanakan adalah

- a) Program Pembinaan Perpustakaan; dan
- b) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

18. Kearsipan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Pengelolaan Arsip;
- b) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3) Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- c) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- d) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

2. Pariwisata

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;

- b) Program Pemasaran Pariwisata;
- c) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pertanian

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- e) Program Perizinan Usaha Pertanian; dan
- f) Program Penyuluhan Pertanian.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Program yang dilaksanakan yaitu Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan yang diarahkan pada pengelolaan potensi energi baru dan terbarukan yang ada di Kabupaten Kebumen.

5. Perdagangan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- b) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- c) Program Pengembangan Ekspor;
- d) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- e) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; dan
- f) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

6. Perindustrian

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- b) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota; dan

c) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

7. Transmigrasi

Program yang dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang difokuskan pada Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

4) Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Program yang dilaksanakan antara lain:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c) Program Perekonomian dan Pembangunan.

2. Sekretariat DPRD

Program yang dilaksanakan antara lain:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

5) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Keuangan

Program yang dilaksanakan antara lain:

- a) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- d) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Kepegawaian

Program yang dilaksanakan antara lain:

- a) Program Kepegawaian Daerah; dan
- b) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Pendidikan dan Pelatihan

Program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5. Penelitian dan Pengembangan

Program yang dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

6) Fungsi Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Program yang dilaksanakan antara lain:

- a) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- c) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7) Fungsi Kewilayahan

1. Kecamatan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;

8) Fungsi Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- b) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- c) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- d) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- e) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- f) Program Peningkatan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;

9) Fungsi Lainnya

- a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan;
- d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- e. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
- f. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; dan
- g. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah.

Selain program yang tercakup dalam klasifikasi urusan kewenangan Pemerintah Daerah di atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan juga program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan
- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025, telah dirumuskan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2025. Sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2025 dengan prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel I.8 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			868.299.781.872
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			228.751.266.855
	Program Pengelolaan Pendidikan		228.751.266.855
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	124.579.500.935
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	64.214.472.120
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	36.350.535.800
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.606.758.000
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			401.861.753.116
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		295.441.469.833
		Peningkatan Pelayanan BLUD	295.441.469.833
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		103.526.739.283
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kabupaten/Kota	25.153.771.889
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.101.741.394
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	128.024.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	143.202.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		1.904.840.000
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	56.893.000
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.847.947.000
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		542.498.000
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	29.500.000
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	261.264.000
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	251.734.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		446.206.000
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.175.000
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64.260.000
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	322.771.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			197.814.086.583
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)		2.820.461.600
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	229.396.100
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.591.065.500
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		4.116.630.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.116.630.000
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		6.891.815.400
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.891.815.400
	Program Penataan Bangunan Gedung		13.063.618.683
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	13.063.618.683
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya		1.663.263.900
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.663.263.900

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
	Program Penyelenggaraan Jalan		168.498.861.000
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	168.498.861.000
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		93.044.000
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	43.830.000
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	49.214.000
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	-
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		666.392.000
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	199.239.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	369.992.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	77.839.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	19.322.000
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman			2.995.989.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
	Program Pengembangan Perumahan		479.076.000
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	26.999.000
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	452.077.000
	Program Kawasan Permukiman		608.685.000
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	316.442.000
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	292.243.000
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh		534.862.000
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	534.862.000
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)		1.373.366.000
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.373.366.000
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			26.008.091.428
	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		6.345.677.112

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.649.274.450
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	689.423.262
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	6.979.400
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		585.325.876
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	526.433.676
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	16.638.600
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	42.253.600
	Program Penanggulangan Bencana		19.077.088.440
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	258.593.750
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	679.714.800
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.910.732.000
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	16.228.047.890

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			10.868.594.890
	Program Pemberdayaan Sosial		142.467.000
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	142.467.000
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		3.190.000
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	3.190.000
	Program Rehabilitasi Sosial		4.584.893.240
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4.116.079.940
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	468.813.300
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		5.527.051.400
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.527.051.400
	Program Penanganan Bencana		583.611.500
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	522.260.500

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	61.351.000
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		27.381.750
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	27.381.750
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			112.229.437.955
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			2.225.009.542
	Program Perencanaan Tenaga Kerja		20.471.490
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	20.471.490
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		1.475.481.652
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.463.656.652
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	11.825.000
	Program Penempatan Tenaga Kerja		351.292.500
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	229.797.500

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	121.495.000
	Program Hubungan Industrial		377.763.900
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	377.763.900
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			941.495.000
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		360.344.000
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	53.663.000
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	306.681.000
	Program Perlindungan Perempuan		74.791.000
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	32.537.000
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	42.254.000
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		10.636.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.636.000
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak		6.805.000
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.805.000
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)		463.041.000
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	335.035.000
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	128.006.000
	Program Perlindungan Khusus Anak		25.878.000
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.878.000
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			682.523.000
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		38.960.000
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	38.960.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		457.289.000
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	88.490.000
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	242.379.000
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	126.420.000
	Program Penanganan Kerawanan Pangan		140.710.000
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	7.473.000
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	133.237.000
	Program Pengawasan Keamanan Pangan		45.564.000
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	45.564.000
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			20.830.000
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		20.830.000
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.830.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			29.808.818.268
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		234.912.000
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	234.912.000
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		1.009.541.000
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	400.786.000
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	269.724.000
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	339.031.000
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		12.545.701.658
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	12.545.701.658
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		22.011.000
		Penyimpanan sementara Limbah B3	22.011.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)		43.445.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	43.445.000
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		48.685.000
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.685.000
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		30.584.000
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.584.000
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		8.924.000
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	8.924.000
	Program Pengelolaan Persampahan		15.865.014.610
		Pengelolaan Sampah	15.865.014.610
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			3.082.473.000
	Program Pendaftaran Penduduk		1.759.083.000
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	268.336.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
		Penataan Pendaftaran Penduduk	1.477.996.000
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	12.751.000
	Program Pencatatan Sipil		72.056.000
		Pelayanan Pencatatan Sipil	62.842.000
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	9.214.000
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1.251.334.000
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	34.856.000
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.216.478.000
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			9.487.212.000
	Program Penataan Desa		24.310.000
		Penyelenggaraan Penataan Desa	24.310.000
	Program Peningkatan Kerjasama Desa		2.009.098.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
		Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	2.009.098.000
	Program Administrasi Pemerintahan Desa		6.533.351.000
		Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	6.533.351.000
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat		920.453.000
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	920.453.000
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			17.979.226.800
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)		10.727.251.800
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.318.247.800
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	3.844.063.000
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.927.946.000
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	636.995.000
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)		7.251.975.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	364.285.000
		Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	6.887.690.000
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			20.750.194.000
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)		20.750.194.000
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	18.618.167.000
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	103.970.000
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	339.198.000
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	794.235.000
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	11.423.000
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	477.717.000
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	372.837.000
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.647.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika			6.786.771.000
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik		4.019.901.000
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.019.901.000
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		2.766.870.000
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-
		Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.766.870.000
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah			4.809.123.000
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		13.066.000
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	13.066.000
	Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian		283.912.000
		Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	283.912.000
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi		470.208.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	470.208.000
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (Umkm)		62.817.000
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	62.817.000
	Program Pengembangan Umkm		3.979.120.000
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	3.979.120.000
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			504.622.110
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		56.688.300
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	32.316.500
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	24.371.800
	Program Promosi Penanaman Modal		262.485.410
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	262.485.410
	Program Pelayanan Penanaman Modal		99.930.500

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	99.930.500
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		64.002.300
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	64.002.300
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		21.515.600
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.515.600
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga			9.789.159.935
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		327.107.000
		Penyadaran. Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	327.107.000
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		9.151.087.935
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.458.257.435
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	688.480.000
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	448.865.500

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.555.485.000
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		310.965.000
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	310.965.000
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik			33.746.000
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		33.746.000
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	33.746.000
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian			214.687.000
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		214.687.000
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	214.687.000
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			3.290.347.100
	Program Pengembangan Kebudayaan		3.132.753.100
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	139.042.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.993.711.100
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya		157.594.000
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	157.594.000
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan			1.632.267.600
	Program Pembinaan Perpustakaan		1.553.810.400
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	745.264.200
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	808.546.200
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno		78.457.200
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	78.457.200
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			190.932.600
	Program Pengelolaan Arsip		190.932.600
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	90.578.600

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	24.798.000
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	75.556.000
Urusan Pemerintahan Pilihan			35.974.962.700
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan			2.422.020.000
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		1.202.372.000
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	393.882.000
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	59.430.000
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	736.828.000
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.232.000
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		875.649.000
		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.303.000
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	869.346.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan		42.401.000
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	42.401.000
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		301.598.000
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	40.353.000
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	261.245.000
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			6.853.843.000
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		4.031.383.000
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	87.611.000
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.902.933.000
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	40.839.000
	Program Pemasaran Pariwisata		2.563.603.000
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.563.603.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		258.857.000
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	258.857.000
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			19.062.696.200
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		1.776.770.500
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.192.700.000
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	491.432.000
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	26.510.400
		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	8.001.000
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	58.127.100
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		13.864.647.700
		Pengembangan Prasarana Pertanian	3.011.396.600
		Pembangunan Prasarana Pertanian	8.886.787.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.966.464.100
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		1.063.854.000
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	146.844.000
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	157.691.000
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	527.424.000
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	212.520.000
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	19.375.000
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		375.648.000
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	375.648.000
	Program Perizinan Usaha Pertanian		29.180.000
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.599.000
		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	14.581.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
	Program Penyuluhan Pertanian		1.952.596.000
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.952.596.000
Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral			25.724.500
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan		25.724.500
		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.724.500
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			6.646.324.000
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		5.097.611.000
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.459.836.000
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	637.775.000
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		110.833.000
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	22.500.000
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	88.333.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
	Program Pengembangan Ekspor		128.703.000
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	128.703.000
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen		127.350.000
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	127.350.000
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		1.181.827.000
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.181.827.000
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian			895.366.000
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		833.580.000
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	833.580.000
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri		51.723.000
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	51.723.000
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		10.063.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	10.063.000
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			68.989.000
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		68.989.000
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	68.989.000
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			61.975.501.916
Sekretariat Daerah			49.263.137.691
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		31.427.646.223
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.696.074.100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	111.730.039
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.476.058.350
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.587.663.000
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.338.925.584

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	969.054.450
		Penataan Organisasi	244.290.900
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.003.849.800
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		16.408.579.344
		Administrasi Tata Pemerintahan	358.588.500
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	15.677.732.253
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	335.010.591
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	37.248.000
	Program Perekonomian Dan Pembangunan		1.426.912.124
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	239.435.124
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	155.617.800
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	648.290.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	383.569.200
Sekretariat DPRD			12.712.364.225
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd		12.712.364.225
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.031.004.000
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	421.118.000
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.000.000
		Peningkatan Kapasitas DPRD	4.393.607.225
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.504.500.000
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	900.000
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	-
		Fasilitasi Tugas DPRD	4.359.235.000
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			704.104.948.980

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
Perencanaan			1.740.575.000
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		1.101.951.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	940.871.000
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	84.986.000
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	76.094.000
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		638.624.000
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	166.321.000
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	276.934.000
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	195.369.000
Keuangan			697.505.979.080
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		691.316.856.030
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	805.205.900

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	412.065.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	287.848.530
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	689.811.736.600
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		884.293.090
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	884.293.090
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		5.304.829.960
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.304.829.960
Kepegawaian			1.190.269.600
	Program Kepegawaian Daerah		1.190.269.600
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	627.340.100
		Mutasi dan Promosi ASN	441.095.800
		Pengembangan Kompetensi ASN	43.153.400

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	78.680.300
Pendidikan Dan Pelatihan			2.553.856.300
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		2.553.856.300
		Pengembangan Kompetensi Teknis	82.689.000
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.471.167.300
Penelitian Dan Pengembangan			1.114.269.000
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah		1.114.269.000
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	732.370.000
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	381.899.000
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			4.488.958.000
Inspektorat Daerah			4.488.958.000
	Program Penyelenggaraan Pengawasan		4.177.130.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.025.227.000
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	151.903.000
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		311.828.000
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	19.623.000
		Pendampingan dan Asistensi	292.205.000
Unsur Kewilayahan			13.289.130.557
Kecamatan			13.289.130.557
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		604.491.500
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	604.491.500
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		463.101.530
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	463.101.530
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		2.821.006.686

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.821.006.686
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		9.400.530.841
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.400.530.841
Unsur Pemerintahan Umum			6.872.887.060
Kesatuan Bangsa Dan Politik			6.872.887.060
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		531.853.460
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	531.853.460
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		4.236.436.700
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4.236.436.700
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		49.974.400
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	49.974.400
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		647.921.400

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2025
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	647.921.400
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		1.406.701.100
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.406.701.100

Sumber: Badan Perencanaan. Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah menjadi pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan (lima) tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD. Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.9 Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
Misi 1: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi					
1.	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik
		1.2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	2	Konsolidasi aparatur dan lembaga pelayanan publik
		1.3	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	3	Integrasi aplikasi sistem informasi manajemen pemerintah daerah dan penertiban administrasi aset daerah
Misi 2: Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya					
1.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	1	Peningkatan kualitas akses dan pelayanan kesehatan
		1.2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	2	Peningkatan kualitas akses dan pelayanan pendidikan
		1.3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	3	Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan anak
Misi 3: Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan					
1.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	1.1	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	1	Peningkatan nilai tambah dan kualitas sarana-prasarana pertanian
		1.2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	2	Pengembangan usaha kecil dan industri padat karya
		1.3	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	3	Peningkatan daya saing perdagangan dan daya tarik pariwisata

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
		1.4	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah		
2.	Meningkatkan pemerataan pembangunan	2.1	Berkurangnya penduduk miskin	1	Penurunan kemiskinan
		2.2	Berkurangnya pengangguran	2	Penurunan pengangguran
Misi 4: Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan					
1.	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1.1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	1	Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur jalan serta infrastruktur prioritas lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi
		1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	2	Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan untuk pembangunan berkelanjutan
Misi 5: Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat					
1.	Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat	1.1	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	1	Penjagaan kesatuan bangsa
		1.2	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	2	Pelestarian cagar budaya
2.	Mewujudkan kondusitivitas wilayah	2.1	Meningkatnya ketertiban masyarakat	1	Penurunan tindakan kriminal masyarakat
		2.2	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	2	Peningkatan desa tangguh bencana

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026

1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar Pertimbangan Penerapan SPM Pemerintah Kabupaten Kebumen

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah serta hak setiap warga negara untuk memperolehnya. Muatan SPM meliputi jenis pelayanan dasar, standar mutu pelayanan dasar, dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus memiliki indikator dan tolok ukur mutu sebagai dasar pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai pelaksanaan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam rangka implementasi ketentuan dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengatur tahapan, mekanisme, dan tata cara penerapan SPM di daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengintegrasikan SPM dalam dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam menjamin terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi salah satu acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan mempertimbangkan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta menetapkan sebagai prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan dengan mengacu pada standar teknis penerapan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri terkait. Dalam rangka mendukung implementasi tersebut, SPM telah diintegrasikan ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

b. Dasar Hukum Penerapan SPM Pemerintah Kabupaten Kebumen

Dasar hukum Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

11.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

c. Kebijakan Umum

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi di berbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada standar teknis penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri terkait. Guna mendukung Rencana penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen maka telah dilakukan integrasi SPM dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Program pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan SPM dalam dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel I.10 Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM
BIDANG PENDIDIKAN				
MISI II Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya				
Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	85,65%
BIDANG KESEHATAN				
MISI II Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya				

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM
Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Kesehatan	100%
BIDANG PEKERJAAN UMUM				
MISI IV Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				
Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	23,75%
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Akses Air Limbah Aman	1,17%
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT				
MISI IV Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				
Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	88,16%
BIDANG TRANTIBUMLINMAS				
MISI V Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat				
Mewujudkan kondusitivitas wilayah	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda	100%
	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	100%
BIDANG SOSIAL				
MISI III Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan				

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM
Meningkatkan pemerataan pembangunan	Berkurangnya penduduk miskin	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani	100%
		Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

d. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan memberikan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Arah kebijakan pembangunan merupakan keputusan dari semua pemangku kepentingan sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan..

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, sebagai landasan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan 5 (lima) tahun yang pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Pemerintah Kabupaten Kebumen selaras dengan Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat”**.

Semua kondisi ideal yang hendak dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun ini, diwujudkan dengan berbasis agrobisnis, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025. Sebagai langkah untuk mencapai visi di atas maka diperlukan penjabaran dari visi tersebut, agar dapat diterapkan selama lima tahun ke depan dalam misi-misi. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menetapkan sebanyak 5 (lima) misi sebagai berikut:

- Misi Pertama : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi.
- Misi Kedua : Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
- Misi Ketiga : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.
- Misi Keempat : Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- Misi Kelima : Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut telah dirumuskan Tujuan dan Sasaran beserta kebijakan umum dan program pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026 akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Adapun Integrasi SPM Dalam Arah Kebijakan Pembangunan Berdasarkan RJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.11 Integrasi SPM dalam Arah Kebijakan Pembangunan Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	STRATEGI PENERAPAN SPM	ARAH KEBIJAKAN
Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Meningkatkan mutu pendidikan formal (terutama jenjang PAUD dan DIKDAS) dan pendidikan non formal	Peningkatan mutu pendidikan formal dan non formal.
			Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Meningkatkan akses dana bantuan pendidikan bagi masyarakat	Perluasan akses pendidikan formal
		Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	Mempermudah akses dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam meraih pendidikan yang semakin berkualitas
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat kurang mampu dan berisiko tinggi terhadap kesehatan	Peningkatan akses kesehatan, serta kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan
			Angka Kematian Ibu	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	Peningkatan akses dan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar

PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	STRATEGI PENERAPAN SPM	ARAH KEBIJAKAN
			Angka Kematian Bayi	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	Peningkatan akses dan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada kesehatan yang baik dan standar
Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Kasus pelanggaran hukum	meningkatkan Koordinasi antar berbagai pihak untuk meminimalisir pelanggaran hukum, kasus bencana dan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk berdisiplin, berpolitik dan berbudaya	Optimalisasi produk hukum dan implementasinya di lapangan dalam mengatasi berbagai peristiwa/ kejadian di Kabupaten Kebumen
Pemantapan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Didukung Oleh Pembangunan Pertanian Dan Pariwisata	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah
	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumber daya lahan, sumberdaya hutan, sumber daya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunkan tingkat kerusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	STRATEGI PENERAPAN SPM	ARAH KEBIJAKAN
Pemantapan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulanga n kemiskinan	Penurunan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen
Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerj aan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka penganggur an	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	Angka Penganggur an	Meningkatkan keterampilan masyarakat	
Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	Meningkatkan kualitas sarana pendukung pendidikan	Peningkataa n kualitas sarana dan prasarana pendidikan
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan PKD, puskesmas dan rumah sakit	Peningkataa n kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana bidang kesehatan

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Para pakar ekonomi menggunakan banyak jenis data untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah atau wilayah. Beberapa indikator yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah tersebut diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan, Capaian kinerja makro tersebut dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Untuk menghitung perubahan capaian indikator makro dilakukan dengan cara menghitung capaian kinerja makro tahun pelaporan dikurangi capaian kinerja makro tahun sebelumnya dibagi dengan capaian kinerja makro tahun sebelumnya dikalikan dengan 100%. Berikut ini capaian indikator kinerja makro Kabupaten Kebumen tahun 2024 dan 2025 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.1 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Kebumen

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO KABUPATEN KEBUMEN	SATUAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025	LAJU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	-	72,48	73,17	0,95
2.	Persentase Penduduk Miskin	%	15,71	13,58	-13,56
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,07	4,95	-2,37
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,30	5,89	11,13
5.	PDRB Per-Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rp	27,30	28,57	4,65
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	-	0,327	0,340	3,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen. 2025

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

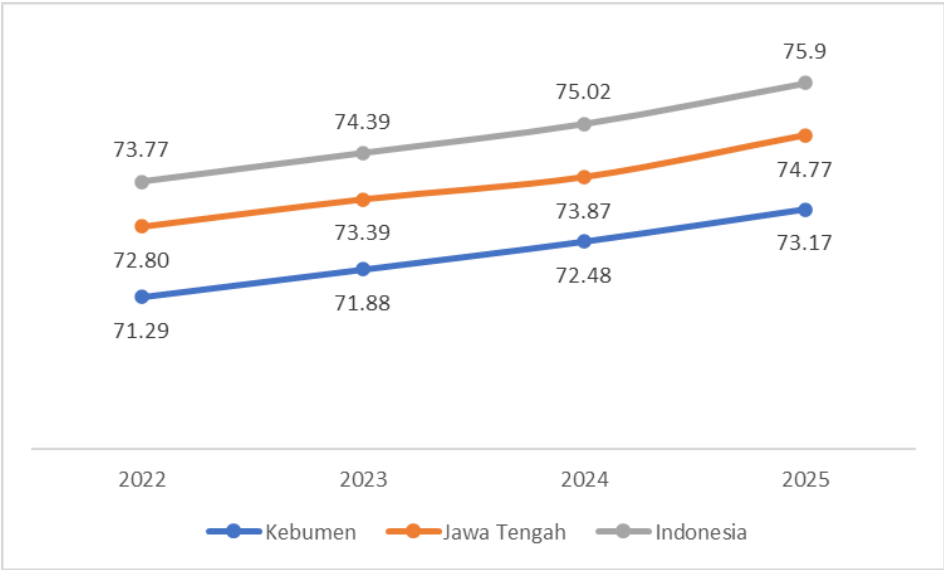
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah,

menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 mencapai 73,17 Angka tersebut mengalami peningkatan 0,95 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 72,48. Selama kurun waktu 2022 – 2025, IPM Kabupaten Kebumen rata – rata meningkat sebesar 0,90 persen per tahun.

Berdasarkan skala internasional UNDP (*United Nation Development Programme*), capaian IPM dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan kategori rendah ($IPM < 60$). Tahun 2010 hingga 2020 IPM Kabupaten Kebumen berada pada kategori sedang, dan mulai tahun 2021 IPM Kabupaten Kebumen termasuk kategori tinggi.

Meskipun IPM Kabupaten Kebumen terus meningkat 4 tahun terakhir, namun nilai IPM Kabupaten Kebumen masih di bawah IPM Jawa Tengah dan Nasional. Nilai IPM Jawa Tengah dan Indonesia pada tahun 2025 berturut-turut sebesar 74,77 dan 75,90. Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022-2025 secara lengkap tersaji dalam gambar berikut:



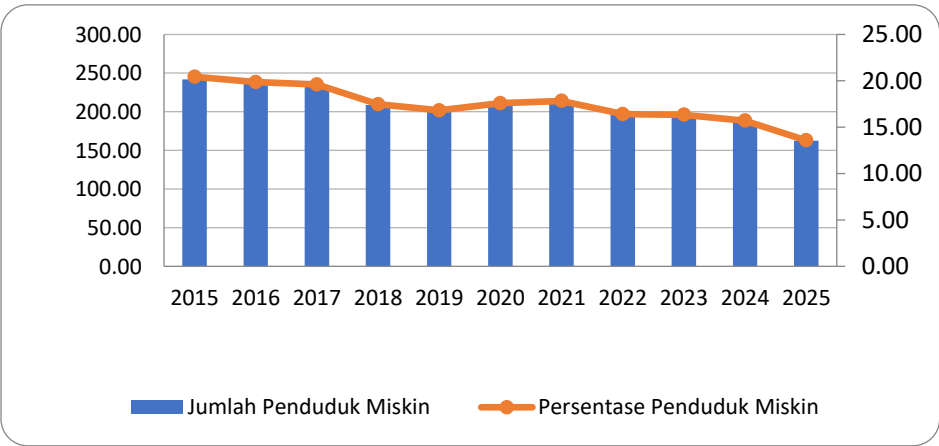
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen. 2025

Gambar II.1 Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Indonesia Tahun 2022 – 2025

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Aspek umur panjang dan hidup sehat diukur melalui indikator Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF), aspek pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan aspek standar hidup layak diukur melalui indikator Pengeluaran Per Kapita per tahun (yang disesuaikan).

2.1.2 Angka Kemiskinan

Kemiskinan di suatu wilayah dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta karakteristik penduduk miskin itu sendiri berdasarkan fasilitas tempat tinggal, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status kesehatan dan lainnya. Perkembangan kemiskinan Kabupaten Kebumen selama satu dekade terakhir dapat ditinjau melalui analisis tren tingkat kemiskinan. Analisis tren ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program pengentasan kemiskinan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Beberapa indikator yang dapat digunakan dalam analisis tren tersebut antara lain garis kemiskinan (rupiah/kapita/bulan), jumlah (ribu jiwa) dan persentase penduduk miskin, serta indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen. 2025

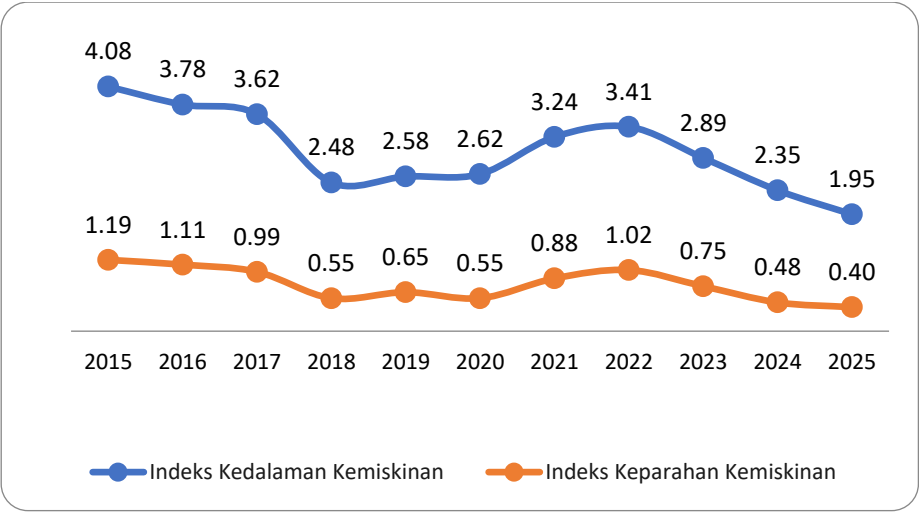
Gambar II.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen.
2015-2025

Program pengentasan kemiskinan Kabupaten Kebumen selama satu dekade terakhir relatif berhasil. Hal ini terlihat dari perkembangan tingkat kemiskinan selama 2015 – 2025 yang mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase (Grafik 2.2). Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen pada 2015 sebanyak 241,9 ribu jiwa (20,44 persen), kemudian pada 2019 menurun menjadi 201,3 ribu jiwa (16,82 persen). Akan tetapi, pada 2020 dan 2021 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami peningkatan. Pada 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen sebanyak 211,1 ribu jiwa (17,59 persen), kemudian pada 2021 bertambah menjadi 212,9 ribu jiwa (17,83 persen). Peningkatan ini secara tidak langsung merupakan imbas dari pandemi COVID-19. Penduduk miskin, rentan miskin dan yang bekerja di sektor informal merupakan penduduk yang paling terdampak dari mewabahnya pandemi COVID-19. Berbagai pembatasan mobilitas atau kegiatan ekonomi berdampak pada penurunan pendapatan mereka. Penurunan pendapatan ini menyebabkan kemiskinan semakin bertambah karena semakin banyak penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Berbagai upaya pemulihan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah mulai membuahkan hasil. Keberhasilan ini tampak dari penurunan tingkat kemiskinan di Kebumen, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Pada 2022 jumlah penduduk miskin di Kebumen menurun menjadi 196,16 ribu jiwa atau 16,41 persen, kemudian menurun kembali menjadi 195,45 ribu jiwa atau 16,34 persen pada 2023. Berbagai evaluasi program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Kebumen mulai membuahkan hasil signifikan pada periode 2024 – 2025. Pada 2024, persentase penduduk miskin di Kebumen menurun menjadi 15,71 persen atau 187,95 ribu jiwa, kemudian turun signifikan menjadi 162,54 ribu jiwa atau 13,58 persen pada 2025. Bahkan capaian penanggulangan dan pengentasan kemiskinan pada 2025 ini merupakan capaian terbaik selama satu dekade terakhir.

Berikutnya untuk keperluan analisis kemiskinan yang lebih lanjut, maka diperlukan indikator lain seperti tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin

jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Adapun indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen. 2025

Gambar II.2 Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Kebumen 2015-2025

Grafik II.3 menunjukkan bahwa selama periode 2015 – 2025, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan relatif berfluktuasi. Temuan yang menarik adalah selama periode 2018 – 2022, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat. Indeks kedalaman kemiskinan pada 2018 sebesar 2,48 dan terus meningkat menjadi 3,41 pada 2022. Demikian pula dengan indeks keparahan kemiskinan, walaupun pada 2020 sempat turun menjadi 0,55 tetapi pada 2022 indeks ini kembali meningkat menjadi 1,02. Kecenderungan meningkatnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan selama periode 2018 – 2022 ini mengindikasikan bahwa kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan cenderung semakin melebar dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin tinggi.

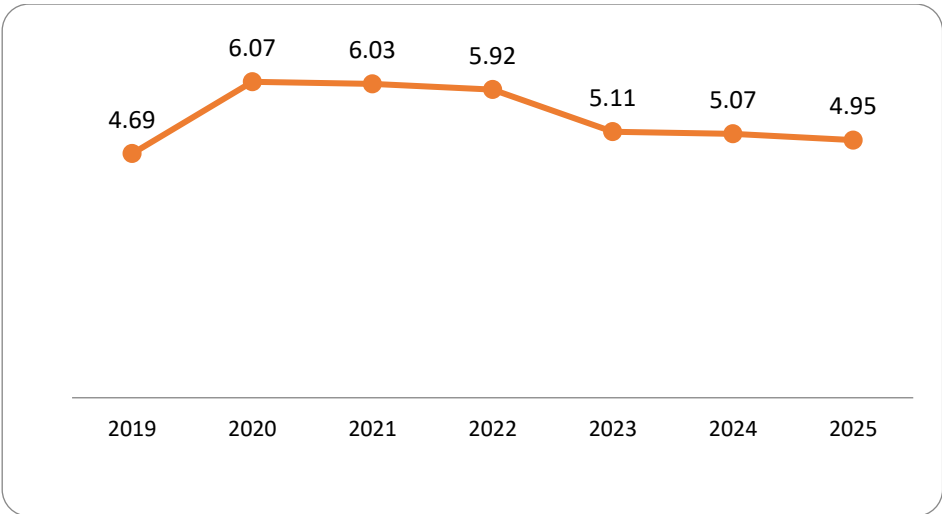
Selain itu, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020 diduga juga semakin memperlebar kesenjangan tersebut. Hal ini terlihat dari peningkatan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang relatif tajam pada 2021 dan 2022. Namun demikian seiring dengan berakhirnya status pandemi pada 2023, Indeks Kedalaman dan Keparahannya

kemiskinan di Kebumen cenderung menurun. Pada 2023, Indeks Kedalaman kemiskinan di Kebumen tercatat sebesar 2,89 atau menurun 0,52 poin dibandingkan 2022. Adapun Indeks Keparahan kemiskinan di Kebumen sebesar 0,75 atau menurun 0,27 poin. Pada 2024, Indeks Kedalaman kemiskinan di Kebumen tercatat sebesar 2,35 atau menurun 0,54 poin dibandingkan 2023. Adapun Indeks Keparahan kemiskinan di Kebumen sebesar 0,48 atau menurun 0,27 poin.

Penurunan kedua indeks ini kembali terjadi pada 2025, bahkan turun signifikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada 2025 turun menjadi 1,95 atau turun 0,40 poin, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan turun menjadi 0,40 atau turun 0,08 poin. Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Penurunan ini juga memberikan gambaran bahwa kondisi masyarakat miskin di Kebumen cenderung semakin homogen.

2.1.3 Tingkat Pengangguran

Dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran Terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran Terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. TPT menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, yakni ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja.



Sumber: Badan Pusat Statistik. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

Gambar II.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen. 2019 – 2025

Selama periode 2019 – 2025, TPT Kabupaten Kebumen menunjukkan tren penurunan. Pada 2019, TPT Kebumen tercatat sebesar 4,69 persen, dan sempat meningkat menjadi 6,07 persen pada 2020. Peningkatan ini merupakan dampak dari Pandemi Covid-19 yang mendorong para pekerja keluar dari pasar kerja. Berbagai upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah relatif berhasil. Hal ini tercermin dari TPT Kabupaten Kebumen pada periode berikutnya yang terus menurun. Pada 2021, TPT Kebumen tercatat turun menjadi 6,03 persen, dan terus menurun hingga menjadi 4,95 persen pada 2025. Walaupun demikian penyediaan lapangan pekerjaan di Kebumen masih menjadi tantangan Pemerintah Daerah sebab TPT pada 2025 masih lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelum Pandemi Covid-19.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kebumen sempat melambat dibandingkan tahun 2023. Akan tetapi pada tahun 2025, angka pertumbuhan ekonomi berakselerasi menguat cukup tinggi menjadi sebesar 5,89 persen. Pertumbuhan tahun 2025 menjadi yang tertinggi pasca COVID-19. Angka ini menunjukkan bahwa perekonomian Kebumen semakin kuat dan stabil serta konsisten diatas 5 persen. Pertumbuhan ekonomi Kebumen bahkan diatas pertumbuhan ekonomi nasional (5,11 persen) dan ekonomi Jawa Tengah (5,37 persen). Pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pelaksanaan

program Makan Bergizi Gratis (MBG), investasi yang stabil, konsumsi rumah tangga yang kuat, serta proyek pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang stabil pada tahun sebelumnya biasanya menciptakan momentum positif untuk aktivitas ekonomi di tahun berikutnya seperti kepercayaan pelaku usaha dan menjaga daya beli masyarakat.

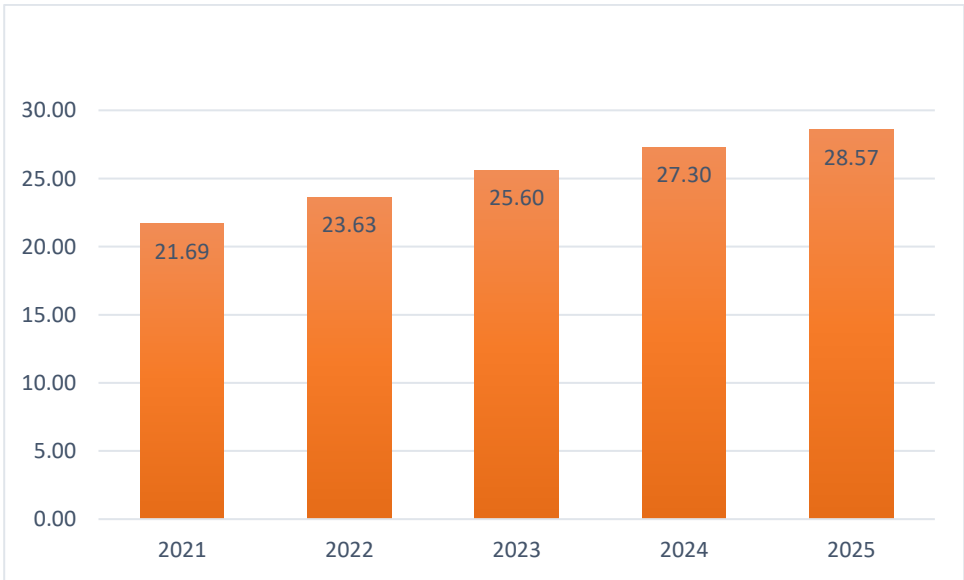
Pada tahun 2025 perekonomian Kabupaten Kebumen didorong oleh beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi dibandingkan tahun 2024. Lapangan usaha industri pengolahan mengalami peningkatan sebesar 6,21 persen dibandingkan 2024 sebesar 6,10 persen, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menguat cukup tinggi sebesar 5,14 persen dibandingkan 2024 sebesar 2,34 persen. Lapangan usaha perdagangan juga tumbuh meningkat sebesar 4,93 persen dibandingkan 2024 sebesar 4,17 persen, dan lapangan usaha konstruksi juga tumbuh menguat sebesar 8,98 persen dibandingkan 2024 sebesar 8,93 persen. Walaupun demikian, terdapat beberapa lapangan usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan sebesar 1,90 persen dibandingkan 2024 sebesar 3,62 persen, lapangan usaha jasa pendidikan mengalami pertumbuhan sebesar 6,43 persen dibandingkan 2024 sebesar 8,20 persen, serta lapangan usaha jasa kesehatan mengalami pertumbuhan sebesar 6,24 persen dibandingkan 2024 sebesar 7,46 persen.

2.1.5 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/ wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kebumen atas dasar harga berlaku sejak tahun 2021 hingga 2025 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 PDRB per kapita tercatat sebesar 21,69 juta rupiah.

Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2025 mencapai 28,57 juta rupiah (lihat Grafik 2.5). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen. 2025

Gambar II.4 PDRB per Kapita Kabupaten Kebumen Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) Tahun 2021 - 2025

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan ukuran penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Di Kebumen, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku meningkat dari 27,30 juta rupiah pada tahun 2024 menjadi 28,57 juta rupiah pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, pendapatan yang diterima oleh penduduk Kebumen meningkat dari tahun ke tahun dalam periode tersebut. Peningkatan PDRB per kapita dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi yang positif, peningkatan produktivitas, atau peningkatan dalam distribusi pendapatan. Dengan PDRB per kapita yang meningkat, dapat diasumsikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kebumen juga meningkat seiring waktu. Namun, perlu diingat bahwa PDRB per kapita hanya memberikan gambaran umum tentang tingkat kesejahteraan dan tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang sebenarnya di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus memperhatikan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan/Gini Rasio

Dalam mengukur tingkat ketimpangan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Gini rasio adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai gini rasio berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai gini rasio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Dengan data ketimpangan pendapatan atau Gini Rasio Kabupaten Kebumen, kita dapat mengevaluasi hubungannya dengan PDRB per kapita serta potensi dampaknya terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Kenaikan indeks Gini Rasio Kabupaten Kebumen dari 0,327 pada tahun 2024 menjadi 0,340 pada tahun 2025 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan mengalami sedikit peningkatan. Meskipun kenaikan ini relatif kecil, kondisi tersebut tetap menjadi indikasi bahwa distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat belum semakin merata.

Peningkatan indeks Gini sering kali berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, kenaikan PDRB per kapita dapat mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan pendapatan rata-rata masyarakat. Namun, apabila pertumbuhan tersebut lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpenghasilan menengah ke atas, maka kesenjangan pendapatan berpotensi semakin melebar, yang pada akhirnya tercermin pada meningkatnya nilai Gini Rasio.

Sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi mampu mendorong peningkatan pendapatan pada kelompok berpenghasilan rendah secara lebih signifikan, maka ketimpangan pendapatan dapat ditekan dan nilai Gini Rasio cenderung menurun. Oleh karena itu, hubungan antara perkembangan PDRB per kapita dan Gini Rasio sangat bergantung pada bagaimana hasil pertumbuhan ekonomi tersebut terdistribusi di antara berbagai kelompok masyarakat.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya seperti peningkatan kesempatan kerja, penguatan sektor usaha mikro dan kecil, serta program perlindungan sosial yang tepat sasaran

dapat menjadi langkah strategis untuk menekan ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan

Tabel II.2 Indikator Kinerja Kunci

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA (%)	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota					
1.a.1	Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	36,43	DISDIKPORA	
1.a.2	Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota	Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	87,89	DISDIKPORA	
1.a.3	Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota	Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100	DISDIKPORA	
1.a.4	Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota	Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	31,27	DISDIKPORA	
1.a.5	Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	22,52	DISDIKPORA	
Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota					
1.b.1	Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota	Persentase Kematian Ibu	0,07	DINKES PPKB	
1.b.2	Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	7,53	DINKES PPKB	
1.b.3	Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100	DINKES PPKB	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA (%)	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.b.4	Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	100	DINKES PPKB	
1.b.5	Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	100	DINKES PPKB	
1.b.6	Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100	DINKES PPKB	
1.b.7	Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	100	DINKES PPKB	
1.b.8	Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar	100	DINKES PPKB	
1.b.9	Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	DINKES PPKB	
1.b.10	Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100	DINKES PPKB	
1.b.11	Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	100	DINKES PPKB	
1.b.12	Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	DINKES PPKB	
1.b.13	Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	100	DINKES PPKB	
1.b.14	Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang	100	DINKES PPKB	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA (%)	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar			
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota					
1.c.1	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	78,85	DPUPR	
1.c.2	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	74,27	DPUPR	
1.c.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupaten/Kota	99,89	DPUPR	
1.c.4	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	97,96	DPUPR	
1.c.5	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir	0/1	DPUPR	SURAT KETERANGAN
1.c.6	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Kewenangan Kabupaten/Kota	0/1	DPUPR	SURAT KETERANGAN
1.d.7	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kabupaten/Kota	95,58	DPUPR	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA (%)	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.c.8	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	0/1	DPUPR	SURAT KETERANGAN
1.c.9	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	59,47	DPUPR	
1.c.10	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Sudah diterbitkan di Kabupaten/Kota	3	DPUPR	
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota					
1.d.1	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100	DISPERKIMHUB	
1.d.2	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	100	DISPERKIMHUB	
1.d.3	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	4,71	DISPERKIMHUB	
1.d.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	0/1	DISPERKIMHUB	SURAT KETERANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA (%)	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Permukiman Kabupaten/Kota				
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
1.e.1	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Dokumen Kebencanaan yang Telah Ditetapkan dan Masih Berlaku	100	BPBD	
1.e.2	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100	Satpol PP	
1.e.3	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	100	Satpol PP	
1.e.4	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100	BPBD	
1.e.5	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	BPBD	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA (%)	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.e.6	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	94,38	Satpol PP	
Urusan Sosial Kabupaten/Kota					
1.f.1	Urusan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	DINSOS P3A	
1.f.2	Urusan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	DINSOS P3A	
1.f.3	Urusan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	DINSOS P3A	
1.f.4	Urusan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	DINSOS P3A	
1.f.5	Urusan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	100	DINSOS P3A	
1.f.6	Urusan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100	DINSOS P3A	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA (%)	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Urusan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota					
2.a.1	Urusan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	100	DISNAKER	
2.a.2	Urusan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)	100	DISNAKER	
2.a.3	Urusan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota	Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	100	DISNAKER	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak					
2.b.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	DINSOS P3A	
2.b.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	DINSOS P3A	
Urusan Pangan Kabupaten/Kota					
2.c.1	Urusan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40,84	DISTAPANG	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA (%)	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Urusan Pertanahan Kabupaten/Kota					
2.d.1	Urusan Pertanahan Kabupaten/Kota	Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	84,93	DPUPR	
2.d.2	Urusan Pertanahan Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	97,96	DPUPR	
2.d.3	Urusan Pertanahan Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Dilegalkan	0/7	DPUPR	
Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					
2.e.1	Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0/10	DLHKP	
2.e.2	Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	22,40	DLHKP	
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota					
2.f.1	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	99,73	DISDUKCAPIL	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA (%)	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2.f.2	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	65,95	DISDUKCAPIL	
2.f.3	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun dan Dipublikasikan	100	DISDUKCAPIL	
2.f.4	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	99,37	DISDUKCAPIL	
2.f.5	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100	DISDUKCAPIL	
2.f.6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	86,80	DISDUKCAPIL	
2.f.7	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	79,07	DISDUKCAPIL	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA (%)	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Kabupaten/Kota				
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota					
2.g.1	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	100	PMD	
2.g.2	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	47,06	PMD	
2.g.3	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kerja Sama Desa	100	PMD	
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota					
2.h.1	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun	101,85	DINKES PPKB	
2.h.2	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	68,09	DINKES PPKB	
2.h.3	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Penjelasan IKK	56,19	DINKES PPKB	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA (%)	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Urusan Perhubungan Kabupaten/Kota					
2.i.1	Urusan Perhubungan Kabupaten/Kota	Konektivitas Kabupaten/Kota	0,64	DISPERKIMHUB	
2.i.2	Urusan Perhubungan Kabupaten/Kota	Volume/Capacity Ratio Di Jalan Kabupaten/Kota	0,36	DISPERKIMHUB	
2.i.3	Urusan Perhubungan Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	3,85	DISPERKIMHUB	
Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota					
2.j.1	Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100	DISKOMINFO	
2.j.2	Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	66,67	DISKOMINFO	
2.j.3	Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	82,20	DISKOMINFO	
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten/Kota					
2.k.1	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	20,20	DISPERINDAG KUKM	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA (%)	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2.k.2	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal ke Formal	12,74	DISPERINDAG KUKM	
Urusan Penanaman Modal Kabupaten/Kota					
2.l.1	Urusan Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	9,92	DPMPTSP	
2.l.2	Urusan Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi	184,56	DPMPTSP	
Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota					
2.m.1	Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	100	DISDIKPORA	
2.m.2	Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,43	DISDIKPORA	
2.m.3	Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase Atlet yang Berasal Dari Kabupaten/Kota yang Masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	100	DISDIKPORA	
2.m.4	Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	61,36	DISDIKPORA	
Urusan Statistik Kabupaten/Kota					
2.n	Urusan Statistik Kabupaten/Kota	Persentase Kepatuhan Daftar Data yang Dilaporkan kepada Wali Data Berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data Daerah	100	DISKOMINFO	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA (%)	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Urusan Persandian Kabupaten/Kota					
2.o	Urusan Persandian Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	74,73	DISKOMINFO	
Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota					
2.p.1	Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	100	DISPARBUD	
2.p.2	Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Mengunjungi Pusat Seni dan Pusat Sejarah	1,60	DISPARBUD	
Urusan Perpustakaan Kabupaten/Kota					
2.q.1	Urusan Perpustakaan Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat	81,10	DISARPUS	
2.q.2	Urusan Perpustakaan Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	17,46	DISARPUS	
Urusan Kearsipan Kabupaten/Kota					
2.r	Urusan Kearsipan Kabupaten/Kota	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	100	DISARPUS	
Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota					
3.a.1	Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	155,90	DLHKP	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA (%)	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
3.a.2	Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	13,29	DLHKP	
Urusan Pariwisata Kabupaten/Kota					
3.b.1	Urusan Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Investasi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum	1,70	DISPARBUD	
3.b.2	Urusan Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing	8,70	DISPARBUD	
3.b.3	Urusan Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	30,20	DISPARBUD	
Urusan Pertanian Kabupaten/Kota					
3.c.1	Urusan Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	15,33	DISTAPANG	
3.c.2	Urusan Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi hortikultura	-1,69	DISTAPANG	
3.c.3	Urusan Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	31,00	DISTAPANG	
3.c.4	Urusan Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Diperoleh Dari Surveyance Penyakit Dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	100	DISTAPANG	
Urusan Perdagangan Kabupaten/Kota					
3.f	Urusan Perdagangan Kabupaten/Kota	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	52,74	DISPERINDAG KUKM	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA (%)	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Urusan Perindustrian Kabupaten/Kota					
3.g.1	Urusan Perindustrian Kabupaten/Kota	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	100	DISPERINDAG KUKM	
3.g.2	Urusan Perindustrian Kabupaten/Kota	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Yang Melaporkan Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	0,04	DISPERINDAG KUKM	
3.g.3	Urusan Perindustrian Kabupaten/Kota	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	0,01	DISPERINDAG KUKM	
3.g.4	Urusan Perindustrian Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor	8,85	DISPERINDAG KUKM	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel II.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK FUNGSI PENUNJANG	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	BOBOT/ KET
1	2	3	4	5	6
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan					
4.a.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	100	BAPPERIDA	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK FUNGSI PENUNJANG	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	BOBOT/ KET
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan					
4.b.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	Persentase Belanja Pegawai Daerah Tidak Termasuk Belanja Untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan Tunjangan Sejenis Lainnya yang Bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang Telah Ditentukan Penggunaannya	31,21	BPKPD	
4.b.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	18,91	BPKPD	
4.b.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Terhadap Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	61,43	BPKPD	
4.b.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	9,23	BPKPD	
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan					
4.c	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Aparatur Sipil Negara Pendidikan Perguruan Tinggi (Aparatur Sipil Negara Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	63,51	BPKPSDM	
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan					
4.d	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program Kegiatan	93,67	BAPPERIDA	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK FUNGSI PENUNJANG	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	BOBOT/ KET
	Pengembangan				
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan					
4.e.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2,69	INSPEKTORAT	
4.e.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2,31	INSPEKTORAT	
4.e.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan	Manajemen Risiko Indeks	2,57	INSPEKTORAT	
4.e.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran N-1	92,93	INSPEKTORAT	
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengadaan					
4.f.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengadaan	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40,00	BAGIAN PBJ	
4.f.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengadaan	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	25,97	BAGIAN PBJ	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK FUNGSI PENUNJANG	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	BOBOT/ KET
4.f.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengadaan	Kualifikasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	18,39	BAGIAN PBJ	
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Hubungan dengan Perwakilan Daerah					
4.g.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat	BPKPD	
4.g.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun N	68,75	BAGIAN HUKUM	
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Publik					
4.h	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Publik	Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	97,53	BAGIAN ORGANISASI	

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Target kinerja daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan tujuan RPJMD, dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk mengukur keberhasilan sasaran RPJMD dan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sementara IKD secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/ pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. IKD dan IKU sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan daerah.

Berikut kami sajikan rekapitulasi hasil pencapaian indikator sasaran IKU Kabupaten Kebumen:

Tabel II.4 Pencapaian Indikator Sasaran IKU Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	MISI	JUMLAH TUJUAN	JUMLAH SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN			
					SB	B	C	K
1	Misi 1	1	3	4	2	2		
2	Misi 2	1	3	5	2	3		
3	Misi 3	2	6	6	2	4		
4	Misi 4	1	2	2	1	1		
5	Misi 5	2	4	4	0	3	1	

NO	MISI	JUMLAH TUJUAN	JUMLAH SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN			
					SB	B	C	K
	Jumlah	7	18	21	7	13	1	
Presentase (%)					33,33%	61,90%	4,76%	

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

Hasil analisis bahwa dari 7 (tujuh) tujuan. 18 (delapan belas) sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja/sasaran, diketahui bahwa 7 (tujuh) indikator sasaran atau 33,33% pencapaiannya dengan kriteria Sangat Baik, 13 (tiga belas) indikator sasaran atau 61,90% pencapaiannya dengan kriteria Baik dan 1 (satu) indikator atau 4,76% dengan pencapaiannya kriteria cukup. Sehingga dapat disimpulkan rata-rata realisasi capaian kinerja Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 sebesar 98,11% atau bermakna Baik.

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Tabel II.5 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,91
2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	74,00
		Opini BPK	WTP/ WDP	WTP
3.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	Indeks	4,07
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,22
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,89
5.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	13,86
6.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,55
		Cakupan Perlindungan Anak	%	100
7.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	Miliar Rupiah	6.297,37
8.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	Miliar Rupiah	6.856,48
9.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	Miliar Rupiah	13.708,96
10.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	Miliar Rupiah	4.913,71
11.	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	14,71-13,90

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA
12.	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,55-4,98
13.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	66,89
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	74,36
15.	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	100
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	%	88,10
17.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100
18.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel II.6 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,91	91,71	100,88%
2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	74,00	68,92	93,14%
		Opini BPK	WTP/ WDP	WTP	WTP*	100%
3.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	Indeks	4,07	4,07	100%
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,22	75,56	100,45%
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,89	7,89	100%
5.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	13,86	13,42	96,83%

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
6.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,55	93,41*	99,85%
		Cakupan Perlindungan Anak	%	100	100	100%
7.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	Miliar Rupiah	6.297,37	5.498,75	87,3%
8.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	Miliar Rupiah	6.856,48	7.347,02	107,2%
9.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	Miliar Rupiah	13.708,96	12.407,62	90,5%
10.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	Miliar Rupiah	4.913,71	25.253,40	519,4%
11.	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	14,71-13,90	13,58	102,30%
12.	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,55-4,98	4,95	100,60%
13.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	66,89	61,71	92,26%
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	74,36	75,31	101,28%
15.	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	100	100	100%
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	%	88,10	63,42	71,98%

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
17.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100%
18.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100	100	100%
						117,33%

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Tabel II.7 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TAHUN 2025		
						TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,69	90,38	90,91	91,71	100,88%
2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	65,49	67,54	74,00	68,92	93,14%
		Opini BPK	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP*	100%
3.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	Indeks	3,44	4,07	4,07	4,07	100%
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,70	75,22	75,22	75,56	100,45%
5.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,85	8,85	7,89	7,89	100%
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,36	13,39	13,86	13,42	96,83%
6.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,05	93,37	93,55	93,41*	99,85%
		Cakupan Perlindungan Anak	%	100	100	100	100	100%
7.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	Miliar Rupiah	8.143,7	5.276,70	6.297,37	5.498,75	87,3%
8.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	Miliar Rupiah	7.101,9	6.856,48	6.856,48	7.347,02	107,2%
9.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	Miliar Rupiah	17.356,4	11.704,65	13.708,96	12.407,62	90,5%
10.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	Miliar Rupiah	4.109	4.381,31	4.913,71	25.253,40	519,4%
11.	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	16,41	15,71	14,71-13,90	13,58	102,30%
12.	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,92	5,07	4,55-4,98	4,95	100,60%

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TAHUN 2025		
						TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
13.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	55,34	68,65	66,89	61,71	92,26%
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	68,17	69,86	74,36	75,31	101,28%
15.	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA. Ideologi. Politik. Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	100	100	100	100	100%
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	%	34,89	58,71	88,10	63,42	71,98%
17.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100%
18.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100	100	100	100	100%

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tabel II.8 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target RPJMD

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,69	90.38	90,91	91,71	100,88%	86	106,64%
2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	65,49	67.54	74,00	68,92	93,14%	77	89,51%
		Opini BPK	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP*	100%	WTP	100%
3.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	Indeks	3,44	4.07	4,07	4,07	100%	3.6	113,06%
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,70	75.22	75,22	75,56	100,45%	74	102,11%
5.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,85	8.85	7,89	7,89	100%	8.14	96,93%
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,36	13.39	13,86	13,42	96,83%	13.94	96,27%
6.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,05	93.37	93,55	93,41*	99,85%	93.65	99,74%
		Cakupan Perlindungan Anak	%	100	100.00	100	100	100%	100	100%
7.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	Miliar Rupiah	8.143,7	5.276,70	6.297,37	5.498,75	87,3%	6.643,72	82,77%
8.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	Miliar Rupiah	7.101,9	6.856,48	6.856,48	7.347,02	107,2%	5.376,15	136,66%
9.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	Miliar Rupiah	17.356,4	11.704,65	13.708,96	12.407,62	90,5%	14.462,95	85,79%

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA		
10.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	Miliar Rupiah	4.109	4.381,31	4.913,71	25.253,40	519,4%	5.183,96	492,35%
11.	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	16,41	15,71	13,90-14,71	13,58	102,30%	13,00-13,50	99,41%
12.	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,92	5,07	4,55-4,98	4,95	100,60%	5,10-5,20	104,81%
13.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	55,34	68,65	66,89	61,71	92,26%	70,69	87,30%
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	68,17	69,86	74,36	75,31	101,28%	74,45	101,16%
15.	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA. Ideologi. Politik. Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	100	100	100	100	100%	78,57	127,28%
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	%	34,89	58,71	88,10	63,42	71,98%	43,05	147,32%
17.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100%	100	100%
18.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100	100	100	100	100%	100	100%

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas atas penggunaan sumberdaya yang ada. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara ouput yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu capaian SPM dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Gambar II.5 Perhitungan Efisiensi Anggaran

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu perangkat daerah misalnya biaya dan keluaran yang dihasilkan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Efisiensi Anggaran anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.9 Efisiensi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	Tujuan								
1	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	101,95%						
	Sasaran								
1,1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,88%	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	20.830.000	20.682.200	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	100,00%	0,71%
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.830.000	20.682.200	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	100,00%	0,71%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.530.060.000	20.345.988.036	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105,35%	10,30%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.467.000	148.186.582	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	4,68%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.660.306.000	18.593.853.183	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	5,42%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	102.039.000	86.688.204	Jumlah aset/barang daerah yang dikelola dan diamankan	100,00%	15,04%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.646.000	265.339.441	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100,00%	1,96%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.114.000	203.398.350	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	137,50%	29,93%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	472.558.000	392.618.385	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	16,92%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.930.000	655.903.891	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	0,31%
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.759.083.000	1.758.001.585	Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk	100,00%	0,06%
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	268.336.000	267.825.547	Jumlah Layanan Pendaftaran Penduduk	100,00%	0,19%
				Penataan Pendaftaran Penduduk	1.477.996.000	1.477.486.838	Jumlah Kegiatan Penataan	100,00%	0,03%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
							Pendaftaran Penduduk		
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	12.751.000	12.689.200	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	100,00%	0,48%
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	72.056.000	70.914.402	Cakupan Layanan Pencatatan Sipil	100,00%	1,58%
				Pelayanan Pencatatan Sipil	62.842.000	62.287.896	Jumlah Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	100,00%	0,88%
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	9.214.000	8.626.506	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100,00%	6,38%
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.251.334.000	1.227.325.903	Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan	100,00%	1,92%
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	34.856.000	34.582.814	Jumlah buku data kependudukan	100,00%	0,78%
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.216.478.000	1.192.743.089	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00%	1,95%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.656.158.000	4.478.084.719	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73,00%	-31,75%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.369.000	36.317.800	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	80,00%	-24,82%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.192.092.000	4.020.139.165	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75,00%	-27,86%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.158.000	64.034.317	Jumlah bulan administrasi umum perangkat daerah	75,00%	-33,08%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.726.000	84.285.000	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	0,52%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.079.000	101.462.469	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75,00%	-31,24%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.734.000	171.845.968	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	94,67%	-3,30%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
							pemerintahan daerah		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	33.746.000	32.262.998	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100,00%	4,39%
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	33.746.000	32.262.998	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	100,00%	4,39%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.235.780.223	36.933.408.423	Nilai IKM Setda	105,19%	10,51%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.696.074.100	19.434.376.428	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	1,33%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	111.730.039	106.437.375	Jumlah bulan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	4,74%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.476.058.350	3.848.464.049	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	14,02%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.419.538.000	4.196.739.348	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1145,31%	91,71%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.587.663.000	2.990.184.466	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	75,00%	-11,13%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.388.596.000	3.165.868.970	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	198,43%	52,92%
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.338.925.584	1.209.802.269	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH	100,00%	9,64%
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	969.054.450	872.440.255	Jumlah bulan penyediaan fasilitas kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100,00%	9,97%
				Penataan Organisasi	244.290.900	243.301.853	Jumlah dokumen kegiatan Penataan Organisasi	100,00%	0,40%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.003.849.800	865.793.410	Jumlah layanan Fasilitas Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100,00%	13,75%
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	15.129.856.344	14.833.033.566	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	106,38%	7,84%
				Administrasi Tata Pemerintahan	358.588.500	354.161.087	Jumlah kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100,00%	1,23%
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	14.436.257.253	14.149.995.972	Jumlah kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	113,33%	13,51%
				Fasilitas dan Koordinasi Hukum	335.010.591	328.876.507	Jumlah kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	100,00%	1,83%
				Fasilitas Kerjasama Daerah	37248000	35537683	Jumlah dokumen kerjasama daerah	100,00%	4,59%
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.426.912.124	1.332.747.275	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan	105,92%	11,82%
				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	239.435.124	235.721.787	Jumlah dokumen fasilitas pelaksanaan kebijakan perekonomian	100,00%	1,55%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	155.617.800	152.933.552	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan	100,00%	1,72%
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	648.290.000	589.074.962	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengadaan melalui SPSE	100,00%	9,13%
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	383.569.200	355.016.974	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100,00%	7,44%
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.712.364.225	11.597.834.339	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100,00%	8,77%
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.031.004.000	2.008.555.448	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang terbentuk	92,00%	-7,49%
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	421.118.000	234.104.386	Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	100,00%	44,41%
				Peningkatan Kapasitas DPRD	4.393.607.225	3.742.294.892	Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas yang diberikan kepada DPRD	100,00%	14,82%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.504.500.000	1.271.202.491	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100,00%	15,51%
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	900.000		Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100,00%	100,00%
				Fasilitasi Tugas DPRD	4.359.235.000	4.341.677.122	Jumlah kegiatan Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 6 Alat Kelengkapan DPRD	100,00%	0,40%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.448.601.885	42.121.008.527	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	5,24%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.434.000	22.904.775	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	2,26%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.484.778.000	3.148.131.133	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	9,66%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	185.000.000	176.608.500	Jumlah Bulan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	4,54%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	564.665.885	544.550.880	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	3,56%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.330.597.000	1.230.464.201	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan	100,00%	7,53%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	569.900.000	516.149.742	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	9,43%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	715.632.000	704.519.508	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	1,55%
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	36.535.370.000	34.746.116.196	Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Anggota DPRD	100,00%	4,90%
				Layanan Administrasi DPRD	1.039.225.000	1.031.563.592	Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	100,00%	0,74%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.674.683.959	46.574.925.929	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	6,24%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.460.000	36.695.918	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	2,04%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.143.019.000	21.799.671.930	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	9,71%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.126.789.959	24.413.687.542	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100,00%	2,84%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.000.000	29.888.900	Jumlah unit barang milik daerah yang diadakan	100,00%	27,10%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.155.000	130.829.685	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	16,75%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.260.000	164.151.954	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	100,00%	3,02%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
							pemerintahan daerah		
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.190.269.600	949.449.004	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	100,00%	20,23%
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	627.340.100	431.434.295	Jumlah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100,00%	31,23%
				Mutasi dan Promosi ASN	441.095.800	413.961.591	jumlah kegiatan Mutasi dan promosi yang dilaksanakan	233,33%	59,78%
				Pengembangan Kompetensi ASN	43.153.400	34.898.000	Jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya	142,29%	43,16%
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	78.680.300	69.155.118	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100,00%	12,11%
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.553.856.300	2.498.335.644	Proasentase pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	75,72%	-29,19%
				Pengembangan Kompetensi Teknis	82.689.000	77.121.126	Pengembangan Kompetensi Teknis	88,18%	-5,77%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.471.167.300	2.421.214.518	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100,00%	2,02%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.155.761.072	7.034.948.378	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan	101,03%	2,69%
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.155.761.072	7.034.948.378	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di wil, Kec, Kebumen yang dilaksanakan	100,00%	1,69%
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.573.915.318	2.522.923.518	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	209,09%	53,12%
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.573.915.318	2.522.923.518	Jumlah Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	154,55%	36,58%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	61.178.145.845	52.836.882.210	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	13,63%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55.606.941.670	47.466.350.453	Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	14,64%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.221.512.380	1.197.951.374	Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi umum	100,00%	1,93%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.715.367.720	1.679.874.421	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	124,97%	21,64%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	894.809.530	866.175.473	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	167,12%	42,08%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.494.465.870	1.388.614.342	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	7,08%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	245.048.675	237.916.147	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100,00%	2,91%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	582.138.780	570.252.104	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	102,12%	4,08%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	582.138.780	570.252.104	Jumlah Jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100,00%	2,04%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	534.633.060	528.140.423	Indeks Kondusivitas Kecamatan	127,00%	22,22%
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	534.633.060	528.140.423	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	192,86%	48,78%
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.022.536.000	2.914.639.684	Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	100,00%	3,57%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
1,2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	93,14%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	214.687.000	201.586.011	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	100,00%	6,10%
		Opini BPK	100,00%	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	214.687.000	201.586.011	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	100,00%	6,10%
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	78.457.200	72.897.202	Persentase Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno	100,00%	7,09%
				Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	78.457.200	72.897.202	Jumlah naskah kuno yang didaftarkan ke Perpustakaan Nasional	100,00%	7,09%
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	190.932.600	180.899.481	Persentase Jumlah Pencipta Arsip yang Menerapkan Arsip Baku	127,81%	25,87%
				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	90.578.600	84.884.982	Jumlah perangkat daerah yang	100,00%	6,29%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
							mengelola arsip secara baku		
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	24.798.000	24.412.780	Jumlah Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten	100,00%	1,55%
				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	75.556.000	71.601.719	Jumlah berkas arsip yang diunggah melalui JIKN	166,67%	43,14%
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.101.951.000	1.101.021.971	Konsistensi Program RPJMD kedalam RPKD	111,11%	10,08%
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	940.871.000	940.268.293	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan sesuai aturan perundangan	100,00%	0,06%
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	84.986.000	84.727.301	Jumlah dokumen analisis perencanaan pembangunan daerah	100,00%	0,30%
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	76.094.000	76.026.377	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan berkala pelaksanaan	100,00%	0,09%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
							pembangunan daerah		
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	638.624.000	636.984.313	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah	100,00%	0,26%
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	166.321.000	165.614.533	Jumlah Urusan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00%	0,42%
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	276.934.000	276.318.938	Jumlah urusan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100,00%	0,22%
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	195.369.000	195.050.842	Jumlah Urusan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	175,00%	42,95%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.035.984.000	5.718.053.835	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	5,27%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.180.000	56.112.900	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	1,87%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.864.054.000	4.551.555.981	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	6,42%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.856.000	7.768.292	Jumlah kegiatan Diklat dalam satu tahun	100,00%	1,12%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.863.000	393.510.296	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	0,09%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	383.672.000	380.795.100	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	4
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.105.000	106.738.820	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	0,34%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.254.000	221.572.446	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	0,31%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	691.316.856.030	657.813.403.345	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	99,21%	4,09%
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	805.205.900	748.133.644	Tersedianya Dokumen Anggaran dan Regulasi	150,00%	38,06%
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	412.065.000	382.821.989	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100,00%	7,10%
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	287.848.530	274.402.544	Jumlah Dokumen Penyampaian Pelaporan Keuangan SKPD Tepat Waktu	100,00%	4,67%
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	689.811.736.600	656.408.045.168	Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	4,84%
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	884.293.090	823.602.842	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,00%	6,86%
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	884.293.090	823.602.842	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,00%	6,86%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.304.829.960	5.152.019.965	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	102,17%	4,94%
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.304.829.960	5.152.019.965	Jumlah jenis pengelolaan pendapatan daerah	100,00%	2,88%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.957.515.387	17.995.167.490	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	9,83%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.368.000	51.173.026	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	5,88%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.094.326.370	16.209.475.387	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	10,42%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.200.000	11.187.000	Jumlah Paket Pelaksanaan Bimtek/Workshop/Semin ar	100,00%	0,12%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.700.000	166.489.750	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	3,60%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	398.765.465	382.462.450	Jumlah unit Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	4,09%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	508.746.000	483.223.692	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	5,02%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	717.409.552	691.156.185	Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	3,66%
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.114.269.000	1.112.325.328	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	104,59%	4,55%
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	732.370.000	731.426.862	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun	150,00%	33,42%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	381.899.000	380.898.466	Jumlah produk pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah	166,67%	40,16%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.770.262.000	9.345.360.410	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	4,35%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.140.000	39.953.600	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180,00%	47,33%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.995.480.000	8.585.067.967	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	4,56%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.776.000	51.561.000	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500,00%	80,46%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.363.000	92.109.934	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	0,27%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	212.400.000	206.359.353	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	2,84%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.007.000	188.631.591	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	2,27%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.096.000	181.676.965	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100,00%	0,23%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.177.130.000	4.101.046.050	Level Kapabilitas APIP	66,67%	-47,27%
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.025.227.000	3.960.146.125	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	148,99%	33,97%
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	151.903.000	140.899.925	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100,00%	7,24%
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	311.828.000	300.820.683	Nilai Persepsi Korupsi	108514,29%	99,91%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	19.623.000	17.103.163	Jumlah Perumpusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100,00%	12,84%
				Pendampingan dan Asistensi	292.205.000	283.717.520	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	100,00%	2,90%
1,3	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	100,00%	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.019.901.000	3.981.816.175	Indeks PPID	135,88%	27,10%
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.019.901.000	3.981.816.175	jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik	135,86%	27,09%
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.766.870.000	2.731.627.602	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	100,00%	1,27%
				Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.543.488.000	2.511.494.108	Jumlah paket layanan infrastruktur	188,89%	47,72%
				Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	223.382.000	220.133.494	Jumlah aplikasi pendukung SPBE	105,00%	6,15%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.552.874.000	4.308.126.323	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	5,38%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.640.000	32.461.711	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	3,50%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.097.870.000	2.941.113.105	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	5,06%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	205.572.000	202.050.925	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	1,71%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.001.000	58.528.666	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	0,80%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	390.000.000	377.185.932	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	3,29%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	553.791.000	490.152.596	Jumlah bulan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100,00%	11,49%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.000.000	206.633.388	Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	2,99%
	Sasaran								
2,1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	100,45%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	103.526.739.283	100.068.755.372	Persentase Capaian SPM Kesehatan	100,00%	3,34%
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	25.153.771.889	24.248.845.460	Jumlah paket penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara	100,00%	3,60%
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.101.741.394	75.551.140.391	Prosentase capaian layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kab/kota	100,00%	3,27%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	128.024.000	127.822.810	Persentase Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi	100,00%	0,16%
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	143.202.000	140.946.711	Jumlah rumah sakit yang memiliki izin operasional yang masih berlaku	100,00%	1,57%
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.904.840.000	1.904.586.862	Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi	92,00%	-8,68%
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	56.893.000	56.792.600	Jumlah Dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK	100,00%	0,18%
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.847.947.000	1.847.794.262	Jumlah SDM Yang mengikuti pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK Tingkat Daerah Kab / kota	236,00%	57,63%
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	542.498.000	281.385.169	Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi	100,00%	48,13%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	29.500.000	29.495.179	Jumlah pemberian Ijin dan pengawasan apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal (UMOT)	162,00%	38,28%
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	261.264.000	251.889.990	Jumlah penerbitan sertifikat PIRT sbagai izin Produksi untuk makanan minuman tertentu yg dapat diproduksi oleh RT dan pengawasan produk PIRT	100,00%	3,59%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	446.206.000	433.828.340	Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten	123,63%	21,35%
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.175.000	57.991.528	Persentase terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100,00%	2,00%
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif	64.260.000	63.687.212	Persentase terlaksananya Pelaksanaan Sehat	100,00%	0,89%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	322.771.000	312.149.600	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	3,29%
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	327.107.000	319.860.828	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	789,16%	87,61%
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	327.107.000	319.860.828	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	165,38%	40,87%
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	9.151.087.935	9.102.865.747	Persentase Prestasi Olahraga	154,16%	35,47%
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang	5.458.257.435	5.429.236.006	Jumlah sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik	100,00%	0,53%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
					Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	688.480.000	684.571.641	Jumlah kegiatan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten	100,00%	0,57%
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	448.865.500	433.573.100	Jumlah prestasi olahraga	104,35%	7,43%
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.555.485.000	2.555.485.000	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi olahraga	100,00%	0,00%
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	310.965.000	305.868.192	Cakupan Prestasi Kepramukaan	100,00%	1,64%
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	310.965.000	305.868.192	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100,00%	1,64%
2,2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah	100,00%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	228.751.266.855	220.585.917.276	Angka Partisipasi Kasar (APK)	102,44%	5,87%
		2	Harapan Lama Sekolah	96,83%	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	124.579.500.935	118.333.559.012	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Paket A	100,88%	5,84%
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	64.214.472.120	63.108.998.930	APK SMP/MTs/Paket B	105,69%	7,01%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	36.350.535.800	35.579.766.634	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	112,13%	12,71%
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.606.758.000	3.563.592.700	Persentase Pendidikan Non Formal yang dikelola	100,00%	1,20%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	892.493.814.560	850.207.330.725	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	4,74%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.827.000	65.117.994	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100,00%	6,74%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	889.885.750.560	847.771.003.093	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	4,73%
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	205.496.000	204.244.400	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tersusun	100,00%	0,61%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	782.128.000	699.726.087	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	10,54%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	186.000.000	171.930.000	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	7,56%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	911.633.000	850.249.186	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	6,73%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	452.980.000	445.059.965	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	1,75%
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.414.416.400	1.385.515.094	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	130,95%	25,20%
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	605.870.200	591.251.528	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	117,82%	17,18%
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	808.546.200	794.263.566	Persentase jumlah pengunjung ke perpustakaan	163,34%	39,86%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.145.358.000	1.106.181.011	Cakupan Pelayanan Penunjang	100,00%	3,42%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				DAERAH KABUPATEN/KOTA			Urusan Pemerintahan Daerah		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.072.200	22.233.628	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	7,64%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.840.800	14.184.656	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	4,42%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.530.000	104.405.185	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	1,99%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.310.000	155.949.000	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	500,00%	80,54%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	644.785.000	615.923.422	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	4,48%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.820.000	193.485.120	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	144,19%	31,12%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
								pemerintahan daerah		
2,3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1	Indeks Pembangunan Gender	99,85%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.069.349.000	3.948.237.497	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	2,98%
		2	Cakupan Perlindungan Anak	100,00%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.684.000	85.270.730	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	3,85%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.980.665.000	3.125.385.665	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	21,49%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.339.680	110.214.575	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	8,41%
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	154.651.000	149.342.670	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	3,43%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.476.000	181.107.348	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	17,10%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.186.000	296.916.509	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	0,09%
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	360.344.000	355.294.943	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	117,36%	15,98%
				Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	53.663.000	52.135.777	Jumlah Kegiatan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00%	2,85%
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	306.681.000	303.159.166	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00%	1,15%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	74.791.000	71.972.500	Cakupan Perlindungan Perempuan	100,00%	3,77%
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	32.537.000	31.953.300	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	1,79%
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	42.254.000	40.019.200	Jumlah kegiatan penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	100,00%	5,29%
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	10.636.000	10.377.300	Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga	431,15%	77,37%
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.636.000	10.377.300	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	2,43%
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	6.805.000	6.560.900	Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak	100,00%	3,59%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.805.000	6.560.900	Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	3,59%
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	463.041.000	433.322.295	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	100,00%	6,42%
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	335.035.000	316.246.795	Jumlah Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00%	5,61%
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	128.006.000	117.075.500	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00%	8,54%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	25.878.000	25.776.100	Cakupan Perlindungan Anak	100,00%	0,39%
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.878.000	25.776.100	Jumlah kegiatan layanan rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100,00%	0,39%
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	898.715.000	839.837.404	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	152,00%	38,52%
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	69.297.000	63.590.002	Jumlah lembaga pendidikan formal dan nonformal yang mengimplementasi kan pendidikan kependudukan	100,00%	8,24%
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	829.418.000	776.247.402	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten	100,00%	6,41%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10.727.251.800	10.226.087.900	Cakupan Peserta KB Aktif	105,02%	9,22%
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.318.247.800	2.270.537.763	Jumlah Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100,00%	2,06%
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	3.844.063.000	3.818.676.988	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan Kader IMP yang diberdayakan	100,00%	0,66%
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.927.946.000	3.505.479.263	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	10,76%
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	636.995.000	631.393.886	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi	100,00%	0,88%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7.251.975.000	7.153.235.691	Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	117,45%	16,02%
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	364.285.000	310.129.792	Jumlah kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan	100,00%	14,87%
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6.887.690.000	6.843.105.899	Jumlah mitra kerja yang mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	100,00%	0,65%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	440.084.930.833	420.173.714.212	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	4,52%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.168.000	119.484.697	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	1,39%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	142.785.236.000	138.149.368.135	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	3,25%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.741.000	31.432.000	Jumlah SDM yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100,00%	0,97%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.600.000	238.411.611	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	4,10%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	197.500.000	184.710.090	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	309,09%	69,74%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	784.216.000	666.603.177	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	15,00%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475.000.000	473.029.764	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik	76,36%	-30,41%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
							Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Peningkatan Pelayanan BLUD	295.441.469.833	280.310.674.738	Jumlah Kegiatan pelayanan BLUD	100,00%	5,12%
	Tujuan								
3	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	106%						
	Sasaran								
3,1	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	87,32%	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.202.372.000	1.195.003.311	Persentase Nilai Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	186,49%	46,71%
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	393.882.000	388.126.210	jumlah produksi perikanan tangkap	185,57%	46,90%
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	59.430.000	59.318.143	jumlah kelompok usaha bersama (KUB) yang	100,00%	0,19%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
							mendapatkan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemantauan		
				Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	736.828.000	735.338.408	jumlah tempat pelelangan ikan (TPI) yang mendapatkan sarana operasional	100,00%	0,20%
				Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.232.000	12.220.550	presentase kapal perikanan yang berijin	101,14%	1,22%
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	875.649.000	844.033.595	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	102,42%	5,89%
				Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.303.000	6.257.050	jumlah tanda daftar usaha perikanan budidaya yang diterbitkan	100,87%	1,58%
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	869.346.000	837.776.545	Jumlah produksi perikanan budidaya	97,44%	1,10%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	42.401.000	41.685.525	Cakupan Wilayah Perairan Umum Daratan yang Mendapatkan Pelestarian Sumberdaya Perikanan	100,00%	1,69%
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	42.401.000	41.685.525	jumlah perairan umum daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	100,00%	1,69%
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	301.598.000	300.088.254	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan	19,01%	-423,33%
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	40.353.000	40.208.420	jumlah kelompok usaha garam (KUGAR) serta kelompok pengolah dan pemasaran (POKLAHSAR) yang mendapatkan pembinaan	100,00%	0,36%
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	261.245.000	259.879.834	Jumlah Peningkatan produksi hasil pengolahan perikanan dan garam	730,70%	86,39%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.776.770.500	1.674.133.259	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	104,53%	9,86%
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.192.700.000	1.131.653.908	Persentase penyediaan sarana pertanian	105,13%	9,75%
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	491.432.000	451.510.487	Persentase luas area tanaman pertanian/perkebunan yang difasilitasi	7,59%	-1109,71%
				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	26.510.400	25.894.995	Persentase ketersediaan pemenuhan pakan ternak	103,35%	5,49%
				Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	8.001.000	7.821.895	Persentase tingkat pengecer obat hewan yang diawasi	95,20%	-2,69%
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	58.127.100	57.251.974	Persentase ternak sapi yang mendapatkan kartu ternak dan surat keterangan layak bibit	119,20%	17,37%
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	13.864.647.700	9.015.867.500	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak	89,96%	27,72%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Pengembangan Prasarana Pertanian	3.011.396.600	2.872.544.694	Jumlah kegiatan pengembangan prasarana pendukung pertanian lainnya	100,00%	4,61%
				Pembangunan Prasarana Pertanian	8.886.787.000	4.262.055.546	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	100,00%	52,04%
				Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.966.464.100	1.881.267.260	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pendampingan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	100,00%	4,33%
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.063.854.000	1.032.423.776	Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	10,40%	-832,89%
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	146.844.000	143.989.183	Jumlah Penurunan kasus Penyakit Hewan Menular (PHM)	78,51%	-24,89%
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan	157.691.000	146.308.800	Jumlah pemeriksaan	138,69%	33,10%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			hewan dan produk hewan		
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	527.424.000	515.698.553	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner yang tersedia	109,58%	10,77%
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	212.520.000	207.117.203	Jumlah unit usaha produk hewan yang menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	100,00%	2,54%
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	19.375.000	19.310.037	Jumlah unit usaha yang memperoleh pendampingan dalam penerapan kesejahteraan hewan	100,00%	0,34%
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	375.648.000	297.161.095	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	21,61%	-266,03%
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	375.648.000	297.161.095	Luas area pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	21,72%	-264,17%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	29.180.000	26.812.950	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	100,00%	8,11%
				Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.599.000	13.276.880	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian	100,00%	9,06%
				Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	14.581.000	13.536.070	Persentase rekomendasi izin usaha peternakan	100,00%	7,17%
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.952.596.000	1.807.784.039	Persentase Skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian	100,00%	7,42%
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.952.596.000	1.807.784.039	Skor rata-rata kategori nilai prestasi kerja penyuluh dan kategori penilaian kelas kelompok tani	100,00%	7,42%
3,2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	107,2%	PROGRAM PENATAAN DESA	24.310.000	24.250.654	Persentase Desa Tertata	100,00%	0,24%
				Penyelenggaraan Penataan Desa	24.310.000	24.250.654	Jumlah Kegiatan Penyusunan Perda penataan desa dan Jumlah Kegiatan	100,00%	0,24%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
							perubahan Perda Pilkades		
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	2.009.098.000	2.000.568.226	Cakupan Fasilitas Kerjasama Desa	100,00%	0,42%
				Fasilitasi Kerja sama antar Desa	2.009.098.000	2.000.568.226	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar Desa	100,00%	0,42%
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	6.467.292.000	6.455.956.817	Jumlah BUM Desa yang Meningkat Klasifikasinya	100,00%	0,18%
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	6.467.292.000	6.455.956.817	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100,00%	0,18%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	920.453.000	908.277.809	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	100,00%	1,32%
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta	920.453.000	908.277.809	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan	100,00%	1,32%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	419.305.000	397.644.519	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	5,17%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.159.000	60.009.011	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	0,25%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.343.000	44.110.410	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	0,52%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.710.000	19.569.959	Jumlah bulan administrasi	100,00%	5,50%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
							keuangan perangkat daerah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.835.000	22.829.200	Jumlah bulan penyediaan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	0,03%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.000.000	51.241.000	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	6,83%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.258.000	165.795.439	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100,00%	8,53%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.000.000	34.089.500	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	2,60%
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	13.066.000	13.010.735	Persentase Koperasi Sehat	150,01%	33,62%
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	13.066.000	13.010.735	Jumlah koperasi akuntabel	100,00%	0,42%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	283.912.000	283.799.169	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	104,09%	3,96%
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	283.912.000	283.799.169	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang diselenggarakan	100,00%	0,04%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	470.208.000	470.148.335	Persentase Advokasi kepada Koperasi	208,41%	52,02%
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	470.208.000	470.148.335	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	100,00%	0,01%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.222.858.300	10.647.817.379	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	12,89%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.932.000	60.473.496	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun + jumlah dokumen evaluasi	100,00%	0,75%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
							perangkat daerah yang tersusun		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.897.994.300	9.437.783.725	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	13,40%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.280.000	180.124.223	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100,00%	0,09%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.000.000	50.924.350	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	54,55%	-76,15%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.030.652.000	918.511.585	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	10,88%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.000.000	50.924.350	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional atau lapangan + jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terpelihara	100,00%	3,92%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA	62.817.000	60.733.289	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	106,29%	9,04%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	62.817.000	60.733.289	Jumlah usaha mikro yang terbina	100,00%	3,32%
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.979.120.000	3.938.548.159	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	100,00%	1,02%
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	3.979.120.000	3.938.548.159	Jumlah UKM yang meningkat skala usahanya	100,00%	1,02%
3,3	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	90,5%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.097.611.000	4.995.686.358	Nilai Pendapatan Retribusi Pasar	108,39%	9,58%
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.459.836.000	4.360.883.382	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	100,00%	2,22%
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	637.775.000	634.802.976	Jumlah Pembinaan dan pemberdayaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100,00%	0,47%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	110.833.000	110.449.007	Inflasi Barang Kebutuhan Pokok pada Pasar	1,33%	-7374,02%
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	22.500.000	22.423.138	Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	101,57%	1,89%
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	88.333.000	88.025.869	Jumlah hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	100,00%	0,35%
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	128.703.000	128.061.011	Nilai Ekspor Perdagangan	2192,64%	95,46%
				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	128.703.000	128.061.011	Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor	100,00%	0,50%
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	127.350.000	127.328.423	Persentase UTP yang Tertera	119,43%	16,28%
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	127.350.000	127.328.423	Jumlah pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal	344,18%	70,95%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.181.827.000	1.155.105.387	Cakupan Pemasaran Produk UMKM	100,89%	3,12%
				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.181.827.000	1.155.105.387	Jumlah kegiatan Pemasaran Produk dalam negeri	100,00%	2,26%
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.031.383.000	3.811.339.211	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata	100,34%	5,78%
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	87.611.000	86.809.868	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100,00%	0,91%
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.902.933.000	3.687.913.830	Jumlah sarana prasarana destinasi pariwisata yang dikelola	100,00%	5,51%
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	40.839.000	36.615.513	Presentase Rekomendasi Jumlah TDUP yang diterbitkan terhadap TDUP yg diajukan	100,00%	10,34%
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.563.603.000	2.473.647.848	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	91,52%	-5,44%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.563.603.000	2.473.647.848	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara	258,92%	62,73%
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	258.857.000	256.505.900	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibina	100,00%	0,91%
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	258.857.000	256.505.900	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100,00%	0,91%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.788.116.806	6.038.448.823	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	11,04%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.503.806	54.463.015	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	3,61%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.999.717.000	5.343.878.062	Jumlah bulan administrasi	100,00%	10,93%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
							keuangan perangkat daerah		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.173.000	123.301.727	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	6,00%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105.000.000	98.599.000	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	6,10%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.416.000	213.505.248	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	26,23%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.307.000	204.701.771	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	0,78%
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	833.580.000	820.661.873	Persentase Pertumbuhan Produksi Gula Kelapa dan Rokok Bercukai	161,43%	39,01%
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	833.580.000	820.661.873	Jumlah Industri yang terbina	100,00%	1,55%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	51.723.000	51.242.331	Persentase Dokumen Perijinan yang Terasilitasi	100,00%	0,93%
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	51.723.000	51.242.331	Jumlah dokumen perijinan industri yang terfasilitasi	100,00%	0,93%
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	10.063.000	10.052.645	Jumlah Dokumen Informasi Industri	100,00%	0,10%
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	10.063.000	10.052.645	Jumlah dokumen Data Industri	100,00%	0,10%
3,4	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	519,4%	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	25.724.500	24.904.445	Persentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	100,00%	3,19%
				Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.724.500	24.904.445	Jumlah dokumen penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota	100,00%	3,19%
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	56.688.300	56.000.930	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	184,56%	46,48%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	32.316.500	32.015.200	Jumlah Dokumen Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100,00%	0,93%
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	24.371.800	23.985.730	Jumlah Dokumen Potensi Investasi	50,00%	-96,83%
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	262.485.410	250.643.029	Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah	100,00%	4,51%
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	262.485.410	250.643.029	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	100,00%	4,51%
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	99.930.500	98.495.360	Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100,00%	1,44%
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	99.930.500	98.495.360	Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Layanan Perizinan	100,00%	1,44%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
							Terintegrasi Secara Elektronik		
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	64.002.300	63.242.280	Persentase Kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	105,56%	6,39%
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	64.002.300	63.242.280	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	105,56%	6,39%
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	21.515.600	20.742.270	Persentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi	100,00%	3,59%
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.515.600	20.742.270	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	200,00%	51,80%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.888.095.000	2.926.621.454	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	-1,33%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.020.000	26.727.020	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	100,00%	1,08%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.861.075.000	2.059.264.184	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	28,02%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.130.000	167.913.979	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100,00%	0,13%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	122.069.000	120.835.560	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	1,01%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.337.000	370.080.311	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	10,68%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.100.000	181.800.400	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	0,16%
				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	68.989.000	67.369.300	Persentase Transmigran yang Ditempatkan	50,00%	-95,30%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	68.989.000	67.369.300	Jumlah Calon Transmigran yang ditempatkan	50,00%	-95,30%
	Tujuan								
4	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia)	102,95%						
	Sasaran								
4,1	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	102,30%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	142.467.000	138.135.186	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	138,89%	30,19%
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	142.467.000	138.135.186	Jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerahkabupaten/kota	100,00%	3,04%
				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	3.190.000	3.153.900	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100,00%	1,13%
				Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah	3.190.000	3.153.900	Jumlah Migran yang diberikan fasilitasi pemulangan	100,00%	1,13%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.584.893.240	3.898.571.291	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani	99,52%	14,56%
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4.116.079.940	3.449.939.566	Jumlah PMKS terlantar di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	99,43%	15,70%
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	468.813.300	448.631.725	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100,00%	4,30%
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.527.051.400	5.454.166.202	Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial	126,31%	21,87%
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.527.051.400	5.454.166.202	Jumlah sosialisasi bantuan sosial	100,00%	1,32%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	583.611.500	580.089.640	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	0,60%
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	522.260.500	518.886.110	jumlah kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota	100,00%	0,65%
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	61.351.000	61.203.530	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana	100,00%	0,24%
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	27.381.750	26.960.400	Persentase TMP yang Dikelola	100,00%	1,54%
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	27.381.750	26.960.400	Persentase TMP yang Dikelola	100,00%	1,54%
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	38.960.000	38.622.500	Persentase Desa yang Tertangani Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	93,01%	-6,59%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	38.960.000	38.622.500	Persentase Desa/Kelurahan yang mendapat kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	93,01%	-6,59%
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	457.289.000	419.092.951	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	100,22%	8,56%
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	88.490.000	86.428.098	Persentase Kelompok sasaran Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	100,00%	2,33%
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	242.379.000	206.533.560	Persentase cadangan pangan yang dikelola	141,90%	39,95%
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	126.420.000	126.131.293	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan, bantuan bibit atau benih tanaman, saprotan untuk pemanfaatan pekarangan dan bantuan alat	100,29%	0,52%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
							pengembangan pangan lokal		
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	140.710.000	130.000.145	Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangannya	104,00%	11,16%
				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	7.473.000	7.131.245	Jumlah Dokumen Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kebumen	100,00%	4,57%
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	133.237.000	122.868.900	Jumlah desa yang tertangani kerawanan pangannya	100,00%	7,78%
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	45.564.000	44.587.800	Persentase Hasil Pengawasaan dan Pembinaan Keamanan Pangan	101,59%	3,68%
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	45.564.000	44.587.800	Jumlah dokumen pengawasan keamanan pangan	100,00%	2,14%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.620.346.000	18.662.146.740	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	4,88%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.214.000	95.431.479	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	10,99%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.233.676.000	17.369.902.199	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	4,74%
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.438.000	4.170.103	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang tersusun	100,00%	6,04%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	247.076.000	237.441.913	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	3,90%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	189.710.000	184.954.650	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	2,51%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.156.000	387.833.988	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	13,65%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.076.000	382.412.408	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100,00%	1,71%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
							Pemerintahan Daerah		
4,2	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	100,6%	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	20.471.490	20.395.452	Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan	100,00%	0,37%
				Penyusunan rencana tenaga kerja	20.471.490	20.395.452	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	100,00%	0,37%
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	115.029.000	112.998.838	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih bernilai "A" (Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Uji Kom / Jumlah Kuota Uji Kom x 100)	87,50%	-12,27%
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	103.204.000	101.824.810	Jumlah Paket Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100,00%	1,34%
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	11.825.000	11.174.028	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	100,00%	5,51%
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	351.292.500	345.712.563	Prosentase penempatan pencari kerja terdaftar (Jumlah	217,04%	54,66%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
							Penempatan TK/Jumlah Pencari Kerja x 100)		
				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	229.797.500	226.206.319	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	275,38%	64,25%
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	121.495.000	119.506.244	Jumlah CPMI atau PMI yang terlindungi	78,12%	-25,91%
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	377.763.900	376.336.720	Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	130,00%	23,37%
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	377.763.900	376.336.720	Jumlah Perselisihan yang terselesaikan	130,00%	23,37%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.572.040.110	6.197.136.946	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	5,70%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.027.910	46.678.855	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100,00%	2,81%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.924.628.000	5.581.337.459	Jumlah Bulan Administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	5,79%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.000.000	21.200.000	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200,00%	51,82%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.715.000	248.885.654	Jumlah Bulan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	10,38%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.019.000	258.590.603	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	0,17%
	Tujuan								
5	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	94,59%						
	Sasaran								

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
5,1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	92,26%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.820.461.600	2.781.922.586	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	92,76%	-6,33%
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	229.396.100	227.045.650	Jumlah bangunan konservasi SDA yang terbangun dan terpelihara	100,00%	1,02%
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.591.065.500	2.554.876.936	Jumlah areal irigasi yang terlayani	100,00%	1,40%
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.116.630.000	3.961.797.167	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	108,59%	11,37%
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.116.630.000	3.961.797.167	Jumlah sambungan rumah yang terlayani	122,64%	21,53%
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	6.891.815.400	6.594.979.050	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	82,23%	-16,37%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.891.815.400	6.594.979.050	Jumlah saluran drainase yang dipelihara/direhabilitasi/ dibangun	100,00%	4,31%
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	13.063.618.683	12.740.634.316	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	102,00%	4,39%
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	13.063.618.683	12.740.634.316	Prosentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	102,00%	4,39%
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.663.263.900	1.388.295.322	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	100,00%	16,53%
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.663.263.900	1.388.295.322	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	150,00%	44,35%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	168.498.861.000	163.553.905.824	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	87,19%	-11,32%
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	168.498.861.000	163.553.905.824	Jumlah panjang jalan yang tertangani	126,63%	23,35%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	93.044.000	91.298.778	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	100,00%	1,88%
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	43.830.000	43.312.300	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	100,00%	1,18%
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	49.214.000	47.986.478	Jumlah penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	100,00%	2,49%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	666.392.000	588.647.198	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	100,00%	11,67%
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	199.239.000	198.140.815	Jumlah dokumen rekomendasi RRRW dan RRTR Kabupaten/Kota	100,00%	0,55%
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	369.992.000	293.712.566	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan RTRW dan RRTR yang dilaksanakan	100,00%	20,62%
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	77.839.000	77.684.925	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang tersusun	100,00%	0,20%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	19.322.000	19.108.892	Jumlah Kegiatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	100,00%	1,10%
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	479.076.000	478.641.828	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100,00%	0,09%
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	26.999.000	26.957.000	Jumlah pendataan dan identifikasi lokasi rawan bencana atau relokasi	100,00%	0,16%
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	452.077.000	451.684.828	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi/dir elokasi	100,00%	0,09%
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	608.685.000	604.387.018	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha	100,00%	0,71%
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	608.685.000	604.387.018	Jumlah permukiman kumuh yang ditangani	100,00%	0,71%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	534.862.000	534.730.195	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	75,02%	-33,26%
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	534.862.000	534.730.195	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni	100,00%	0,02%
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.373.366.000	1.358.191.375	Persentase Peningkatan Akses Air Limbah Aman	100,00%	1,10%
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.373.366.000	1.358.191.375	Jumlah pelayanan pengolahan air limbah domestik	100,00%	1,10%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.150.939.112	6.197.579.080	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	13,33%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.329.000	58.740.200	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	5,76%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.995.415.112	5.084.133.166	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	15,20%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.715.000	80.676.000	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	0,05%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	333.484.000	333.364.298	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100,00%	0,04%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.719.000	29.090.070	jumlah unit pengadaan barang milik daerah	100,00%	2,12%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.876.000	142.752.799	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	12,89%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	485.401.000	468.822.547	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	3,42%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	20.750.194.000	20.234.555.637	Indeks Infrastruktur Perhubungan	96,24%	-1,33%
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	18.618.167.000	18.213.663.859	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	113,70%	13,96%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	103.970.000	96.553.695	Jumlah Koordinasi Pengawasan Parkir	100,00%	7,13%
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	339.198.000	319.834.016	Persentase alat uji KIR dalam keadaan baik	100,00%	5,71%
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	794.235.000	712.877.796	Jumlah bulan pengamanan dan koordinasi lintas sektoral	100,00%	10,24%
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	11.423.000	11.022.357	Jumlah rakor penilaian andalalin	100,00%	3,51%
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	477.717.000	475.590.945	Rasio cakupan kebijakan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ dan Pengawasan Pengendalian Terhadap Sarpras Keselatan Transportasi	100,00%	0,45%
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	372.837.000	372.784.036	Jumlah pengawasan dan pengendalian angkutan umum	100,00%	0,01%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.647.000	32.228.933	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam tarayek lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah Kab/Kota	100,00%	1,28%
5,2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	101,28%	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	234.912.000	225.441.429	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100,00%	4,03%
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	234.912.000	225.441.429	jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun	100,00%	4,03%
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.009.541.000	985.011.949	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	101,28%	3,66%
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	400.786.000	387.068.004	jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100,00%	3,42%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	269.724.000	266.635.741	jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100,00%	1,14%
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	339.031.000	331.308.204	jumlah kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100,00%	2,28%
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	12.545.701.658	11.844.282.363	Persentase Penanganan Keanekaragaman Hayati Daerah	100,00%	5,59%
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	12.545.701.658	11.844.282.363	jumlah dokumen perencanaan pengelolaan Kehati	100,00%	5,59%
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	22.011.000	21.931.792	Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Ijin Pengelolaan LB3	100,00%	0,36%
				Penyimpanan Sementara Limbah B3	22.011.000	21.931.792	jumlah fasilitasi dan verifikasi limbah B3 dan LB3	100,00%	0,36%
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	43.445.000	43.355.360	Persentase Pengawasan Kegiatan Usaha dan Penanganan Ijin Lingkungan	112,21%	11,07%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	43.445.000	43.355.360	jumlah unit usaha yang mendapatkan rekomendasi ijin lingkungan, ijin PPLH dan pengawasan kegiatan usaha	100,00%	0,21%
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	48.685.000	48.556.152	Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Peraturan Lingkungan Hidup	105,12%	5,12%
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.685.000	48.556.152	jumlah lokasi yang memperoleh pendampingan penyusunan perdes dan sekolah adiwiyata	165,22%	39,63%
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	30.584.000	30.535.250	Persentase Fasilitas Penghargaan Lingkungan Hidup	105,89%	5,71%
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.584.000	30.535.250	jumlah titik pantau dan penghargaan lingkungan hidup	100,00%	0,16%
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	8.924.000	8.903.956	Persentase penanganan Pengaduan masyarakat	100,00%	0,22%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	8.924.000	8.903.956	jumlah kasus yang terfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH	130,00%	23,25%
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	15.865.014.610	15.697.800.728	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	107,69%	8,12%
				Pengelolaan Sampah	15.865.014.610	15.697.800.728	jumlah kegiatan pengelolaan sampah	100,00%	1,05%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.785.225.812	12.312.431.547	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	3,70%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.780.200	71.232.295	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	7,23%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.649.592.000	11.187.177.593	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	3,97%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.300.000	22.013.514	jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	9,41%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.135.242	97.820.960	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	0,32%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.630.000	64.885.000	jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	2,62%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	553.385.370	553.235.494	jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	0,03%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.403.000	316.066.691	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	0,11%
	Tujuan								
6	Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	100,78%						
	Sasaran								
6,1	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan	100,00%	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	531.853.460	523.303.140	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila	533,51%	81,56%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
		Sumber Daya Ekonomi					dan Karakter Kebangsaan		
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	531.853.460	523.303.140	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100,00%	1,61%
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.236.436.700	4.149.110.209	Capaian Partisipasi Masyarakat/Penduduk dalam Proses Pemilihan Umum	109,33%	10,42%
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4.236.436.700	4.149.110.209	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	100,00%	2,06%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
							Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	49.974.400	48.781.763	Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100,00%	2,39%
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	49.974.400	48.781.763	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100,00%	2,39%
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	647.921.400	637.534.956	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	640,71%	84,64%
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	647.921.400	637.534.956	Jumlah Lokasi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan	100,00%	1,60%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
							Ekonomi Sosial dan Budaya		
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.406.701.100	1.361.137.488	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	133,33%	27,43%
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.406.701.100	1.361.137.488	Jumlah Dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100,00%	3,24%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.125.220.250	3.592.191.933	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	12,92%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.177.800	17.325.400	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	4,69%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.777.767.200	3.264.050.400	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	13,60%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.517.700	57.174.635	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	2,30%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.965.250	12.923.158	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	13,65%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.093.300	104.637.201	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	12,14%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.699.000	136.081.139	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	0,45%
6,2	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	71,98%	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.132.753.100	3.032.414.612	Persentase Kesenian yang Dikembangkan	111,73%	13,37%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
					Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	139.042.000	138.741.436	Prosentase kegiatan pengembangan kebudayaan Kebumen	96,49%	-3,41%
					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.993.711.100	2.893.673.176	Prosentase kegiatan pelestarian kesenian tradisional	100,00%	3,34%
					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	157.594.000	147.489.906	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	88,14%	-6,18%
					Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	157.594.000	147.489.906	Prosentase cagar budaya yang dilestarikan	79,76%	-17,33%
	Tujuan									
7	Mewujudkan kondusitivitas wilayah		Indeks Kondusivitas Wilayah	100,00%						
	Sasaran									
7,1	Meningkatnya ketertiban masyarakat		Persentase Penegakan Perda	100,00%	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.345.677.112	6.027.329.910	Persentase Penegakan Perda	100,00%	5,02%
					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.649.274.450	5.343.313.282	Terlaksananya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100,00%	5,42%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	689.423.262	677.101.600	terlaksananya kegiatan upaya pencegahan tindak kriminal	100,00%	1,79%
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	6.979.400	6.915.028	Jumlah kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/kota	100,00%	0,92%
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	585.325.876	563.486.799	Persentase Kesiapsiagaan Damkar	100,00%	3,73%
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	526.433.676	504.722.398	Persentase terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	4,12%
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	16.638.600	16.594.871	Persentase terlaksananya inspeksi Peralatan proteksi kebakaran	100,00%	0,26%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	42.253.600	42.169.530	Presentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100,00%	0,20%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.730.069.800	6.152.086.339	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	8,59%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.150.000	26.751.970	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	1,47%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.957.206.000	5.437.701.273	Persentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	100,00%	8,72%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	176.213.800	174.315.807	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100,00%	1,08%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.700.000	77.546.870	Presentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100,00%	0,20%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000	26.510.000	Persentase terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	100,00%	33,73%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.800.000	109.360.854	Presentase terlaksananya kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	27,96%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.000.000	299.899.565	Presentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	0,03%
7,3	Terwujudnya wilayah tangguh bencana		Persentase Desa Tangguh Bencana	100,00%	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	19.077.088.440	18.984.333.917	Persentase Desa Tangguh Bencana	100,00%	0,49%
					Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	258.593.750	254.993.600	Presentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100,00%	1,39%
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	679.714.800	673.604.836	Presentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100,00%	0,90%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.910.732.000	1.889.625.512	Presentase Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100,00%	1,10%
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	16.228.047.890	16.166.109.969	Persentase Cakupan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100,00%	0,38%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.517.111.120	4.133.964.718	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	8,48%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000	15.825.400	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	1,09%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.444.658.000	3.112.300.722	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	9,65%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.618.760	144.775.377	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	0,58%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	EFISIENSI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	299.769.360	274.629.300	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	8,39%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.065.000	142.982.635	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	11,23%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.000.000	443.451.284	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	1,46%
							Tingkat Efisiensi		3,53%

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen mempunyai nilai baik berada pada angka 8,88 % dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%)

Ditinjau dari aspek efisiensi, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Target Kinerja

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.10 Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Target kinerja

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tujuan						
1	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	101,95%				
	Sasaran						
1,1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,88%	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	100,00%	Menunjang
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105,35%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset/barang daerah yang dikelola dan diamankan	100,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	137,50%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk	100,00%	Menunjang
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Layanan Pendaftaran Penduduk	100,00%	Menunjang
				Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Layanan Pencatatan Sipil	100,00%	Menunjang
				Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	100,00%	Menunjang
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan	100,00%	Menunjang
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah buku data kependudukan	100,00%	Menunjang
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73,00%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	80,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi umum perangkat daerah	75,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	94,67%	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100,00%	Menunjang
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Setda	105,19%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1145,31%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	75,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	198,43%	Menunjang
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH	100,00%	Menunjang
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100,00%	Menunjang
				Penataan Organisasi	Jumlah dokumen kegiatan Penataan Organisasi	100,00%	Menunjang
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah layanan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	106,38%	Menunjang
				Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100,00%	Menunjang
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	113,33%	Menunjang
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	100,00%	Menunjang
				Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen kerjasama daerah	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan	105,92%	Menunjang
				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen fasilitas pelaksanaan kebijakan perekonomian	100,00%	Menunjang
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan	100,00%	Menunjang
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengadaan melalui SPSE	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100,00%	Menunjang
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100,00%	Menunjang
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang terbentuk	92,00%	Menunjang
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	100,00%	Menunjang
				Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas yang diberikan kepada DPRD	100,00%	Menunjang
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100,00%	Menunjang
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100,00%	Menunjang
				Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 6 Alat Kelengkapan DPRD	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	Menunjang
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Anggota DPRD	100,00%	Menunjang
				Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah yang diadakan	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	Menunjang
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	100,00%	Menunjang
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Mutasi dan Promosi ASN	jumlah kegiatan Mutasi dan promosi yang dilaksanakan	233,33%	Menunjang
				Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya	142,29%	Menunjang
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Proasentase pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	75,72%	Menunjang
				Pengembangan Kompetensi Teknis	Pengembangan Kompetensi Teknis	88,18%	Menunjang
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan	101,03%	Menunjang
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di wil, Kec, Kebumen yang dilaksanakan	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	209,09%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	154,55%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi umum	100,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	124,97%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	167,12%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	102,12%	Menunjang
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	127,00%	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	192,86%	Menunjang
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	100,00%	Menunjang
1,2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	93,14%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	100,00%	Menunjang
		Opini BPK	100,00%	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno	100,00%	Menunjang
				Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang didaftarkan ke Perpustakaan Nasional	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Jumlah Pencipta Arsip yang Menerapkan Arsip Baku	127,81%	Menunjang
				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	100,00%	Menunjang
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten	100,00%	Menunjang
				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah berkas arsip yang diunggah melalui JIKN	166,67%	Menunjang
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	111,11%	Menunjang
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan sesuai aturan perundangan	100,00%	Menunjang
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis perencanaan pembangunan daerah	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	100,00%	Menunjang
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah	100,00%	Menunjang
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Urusan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00%	Menunjang
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah urusan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100,00%	Menunjang
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Urusan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	175,00%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Diklat dalam satu tahun	100,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	99,21%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya Dokumen Anggaran dan Regulasi	150,00%	Menunjang
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100,00%	Menunjang
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penyampaian Pelaporan Keuangan SKPD Tepat Waktu	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,00%	Menunjang
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	102,17%	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah jenis pengelolaan pendapatan daerah	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pelaksanaan Bimtek/Workshop/Semin ar	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	104,59%	Menunjang
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun	150,00%	Menunjang
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah produk pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah	166,67%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180,00%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Kapabilitas APIP	66,67%	Menunjang
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	148,99%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Persepsi Korupsi	108514,29%	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumpusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100,00%	Menunjang
				Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	100,00%	
1,3	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	100,00%	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks PPID	135,88%	Menunjang
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik	135,86%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	100,00%	Menunjang
				Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket layanan infrastruktur	188,89%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi pendukung SPBE	105,00%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
	Sasaran						
2,1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	100,45%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Kesehatan	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase capaian layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kab/kota	100,00%	Menunjang
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi	100,00%	Menunjang
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah sakit yang memiliki izin operasional yang masih berlaku	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi	92,00%	Menunjang
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Yang mengikuti pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM Tingkat Daerah Kab / kota	236,00%	Menunjang
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi	100,00%	Menunjang
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah pemberian ljin dan pengawasan apotik, toko obat, toko alat kesehatn dan optikal (UMOT)	162,00%	Menunjang
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah penerbitan sertifikat PIRT sbagai izin Produksi untuk makanan minuman tertentu yg dapat diproduksi oleh RT dan pengawasan produk PIRT	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten	123,63%	Menunjang
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100,00%	Menunjang
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	789,16%	Menunjang
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	165,38%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Olahraga	154,16%	Menunjang
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten	100,00%	Menunjang
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah prestasi olahraga	104,35%	Menunjang
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi olahraga	100,00%	Menunjang
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Prestasi Kepramukaan	100,00%	Menunjang
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100,00%	Menunjang
2,2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah	100,00%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK)	102,44%	Menunjang
		2	Harapan Lama Sekolah	96,83%	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Paket A	100,88%	Menunjang
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/Paket B	105,69%	Menunjang
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	112,13%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Non Formal yang terkelola	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tersusun	100,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	130,95%	Menunjang
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	117,82%	Menunjang
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pengunjung ke perpustakaan	163,34%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	500,00%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	144,19%	Menunjang
2,3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1	Indeks Pembangunan Gender	99,85%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
		2	Cakupan Perlindungan Anak	100,00%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	Menunjang
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	Menunjang
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	Menunjang
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	117,36%	Menunjang
				Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00%	Menunjang
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perlindungan Perempuan	100,00%	Menunjang
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga	431,15%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak	100,00%	Menunjang
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	100,00%	Menunjang
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00%	Menunjang
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Perlindungan Anak	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan layanan rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	152,00%	Menunjang
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah lembaga pendidikan formal dan nonformal yang mengimplementasikan pendidikan kependudukan	100,00%	Menunjang
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	105,02%	Menunjang
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100,00%	Menunjang
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan Kader IMP yang diberdayakan	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	Menunjang
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	117,45%	Menunjang
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan	100,00%	Menunjang
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah mitra kerja yang mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	309,09%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76,36%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Kegiatan pelayanan BLUD	100,00%	Menunjang
	Tujuan						
3	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	106%				
	Sasaran						
3,1	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	87,32%	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Nilai Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	186,49%	Menunjang
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah produksi perikanan tangkap	185,57%	Menunjang
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kelompok usaha bersama (KUB) yang mendapatkan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemantauan	100,00%	Menunjang
				Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	jumlah tempat pelelangan ikan (TPI) yang mendapatkan sarana operasional	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	presentase kapal perikanan yang berijin	101,14%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	102,42%	Menunjang
				Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah tanda daftar usaha perikanan budidaya yang diterbitkan	100,87%	Menunjang
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi perikanan budidaya	97,44%	Menunjang
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Wilayah Perairan Umum Daratan yang Mendapatkan Pelestarian Sumberdaya Perikanan	100,00%	Menunjang
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	jumlah perairan umum daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan	19,01%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	jumlah kelompok usaha garam (KUGAR) serta kelompok pengolah dan pemasaran (POKLAHSAR) yang mendapatkan pembinaan	100,00%	Menunjang
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan produksi hasil pengolahan perikanan dan garam	730,70%	Menunjang
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	104,53%	Menunjang
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan sarana pertanian	105,13%	Menunjang
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase luas area tanaman pertanian/perkebunan yang difasilitasi	7,59%	Menunjang
				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pemenuhan pakan ternak	103,35%	Menunjang
				Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase tingkat pengecer obat hewan yang diawasi	95,20%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ternak sapi yang mendapatkan kartu ternak dan surat keterangan layak bibit	119,20%	Menunjang
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak	89,96%	Menunjang
				Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kegiatan pengembangan prasarana pendukung pertanian lainnya	100,00%	Menunjang
				Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	100,00%	Menunjang
				Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pendampingan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	10,40%	Menunjang
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penurunan kasus Penyakit Hewan Menular (PHM)	78,51%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan hewan dan produk hewan	138,69%	Menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner yang tersedia	109,58%	Menunjang
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha produk hewan yang menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	100,00%	Menunjang
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang memperoleh pendampingan dalam penerapan kesejahteraan hewan	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	21,61%	Menunjang
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas area pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	21,72%	Menunjang
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	100,00%	Menunjang
				Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase rekomendasi izin usaha peternakan	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian	100,00%	Menunjang
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Skor rata-rata kategori nilai prestasi kerja penyuluh dan kategori penilaian kelas kelompok tani	100,00%	Menunjang
3,2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	107,2%	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Tertata	100,00%	Menunjang
				Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Kegiatan Penyusunan Perda penataan desa dan Jumlah Kegiatan perubahan Perda Pilkades	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Fasilitas Kerjasama Desa	100,00%	Menunjang
				Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar Desa	Menunjang
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah BUM Desa yang Meningkat Klasifikasinya	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	100,00%	Menunjang
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	150,01%	Menunjang
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi akuntabel	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	104,09%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang diselenggarakan	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Advokasi kepada Koperasi	208,41%	Menunjang
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun + jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	100,00%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	54,55%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional atau lapangan + jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terpelihara	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	106,29%	Menunjang
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang terbina	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	100,00%	Menunjang
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UKM yang meningkat skala usahanya	100,00%	Menunjang
3,3	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	90,5%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Nilai Pendapatan Retribusi Pasar	108,39%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	100,00%	Menunjang
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan dan pemberdayaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100,00%	Menunjang
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Inflasi Barang Kebutuhan Pokok pada Pasar	1,33%	Menunjang
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	101,57%	Menunjang
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan	2192,64%	Menunjang
				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang Tertera	119,43%	Menunjang
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal	344,18%	Menunjang
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Pemasaran Produk UMKM	100,89%	Menunjang
				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah kegiatan Pemasaran Produk dalam negeri	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata	100,34%	Menunjang
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100,00%	Menunjang
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana destinasi pariwisata yang dikelola	100,00%	Menunjang
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Rekomendasi Jumlah TDUP yang diterbitkan terhadap TDUP yg diajukan	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	91,52%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara	258,92%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibina	100,00%	Menunjang
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Produksi Gula Kelapa dan Rokok Bercukai	161,43%	Menunjang
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Industri yang terbina	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perijinan yang Terfasilitasi	100,00%	Menunjang
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perijinan industri yang terfasilitasi	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Dokumen Informasi Industri	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI,	Jumlah dokumen Data Industri	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			
3,4	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	519,4%	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	100,00%	Menunjang
				Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	184,56%	Menunjang
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100,00%	Menunjang
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Potensi Investasi	50,00%	Menunjang
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah	100,00%	Menunjang
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100,00%	Menunjang
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Layanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	105,56%	Menunjang
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	105,56%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi	100,00%	Menunjang
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	200,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	100,00%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Ditempatkan	50,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Transmigran yang ditempatkan	50,00%	Menunjang
	Tujuan						
4	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia)	102,89%				
	Sasaran						
4,1	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	102,30%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	138,89%	Menunjang
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerahkabupaten/kota	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100,00%	Menunjang
				Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Migran yang diberikan fasilitasi pemulangan	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani	99,52%	Menunjang
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS terlantar di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	99,43%	Menunjang
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial	126,31%	Menunjang
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi bantuan sosial	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	Menunjang
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang Dikelola	100,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang Dikelola	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Desa yang Tertangani Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	93,01%	Menunjang
				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang mendapat kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	93,01%	Menunjang
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	100,22%	Menunjang
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Kelompok sasaran Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan yang dikelola	141,90%	Menunjang
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan, bantuan bibit atau benih tanaman, saprotan untuk pemanfaatan pekarangan dan bantuan alat pengembangan pangan lokal	100,29%	Menunjang
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangannya	104,00%	Menunjang
				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kebumen	100,00%	Menunjang
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang tertangani kerawanan pangannya	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Hasil Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	101,59%	Menunjang
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan keamanan pangan	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang tersusun	100,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
4,2	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	100,6%	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan	100,00%	Menunjang
				Penyusunan rencana tenaga kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih bernilai “A” (Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Uji Kom / Jumlah Kuota Uji Kom x 100)	87,50%	Menunjang
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Paket Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100,00%	Menunjang
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase penempatan pencari kerja terdaftar (Jumlah Penempatan TK/Jumlah Pencari Kerja x 100)	217,04%	Menunjang
				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	275,38%	Menunjang
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI atau PMI yang terlindungi	78,12%	Menunjang
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	130,00%	Menunjang
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Jumlah Perselisihan yang terselesaikan	130,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100,00%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200,00%	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	
	Tujuan						
5	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	94,59%				

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
	Sasaran						
5,1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	92,26%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	92,76%	Menunjang
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan konservasi SDA yang terbangun dan terpelihara	100,00%	Menunjang
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah areal irigasi yang terlayani	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	108,59%	Menunjang
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani	122,64%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	82,23%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah saluran drainase yang dipelihara/direhabilitasi/ dibangun	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	102,00%	Menunjang
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Prosentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	102,00%	Menunjang
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	100,00%	Menunjang
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	150,00%	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	87,19%	Menunjang
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah panjang jalan yang tertangani	126,63%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	100,00%	Menunjang
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	100,00%	Menunjang
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi RRRW dan RRTR Kabupaten/Kota	100,00%	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan RTRW dan RRTR yang dilaksanakan	100,00%	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang tersusun	100,00%	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pendataan dan identifikasi lokasi rawan bencana atau relokasi	100,00%	Menunjang
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi/dir elokasi	100,00%	Menunjang
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha	100,00%	Menunjang
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah permukiman kumuh yang ditangani	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	75,02%	Menunjang
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Akses Air Limbah Aman	100,00%	Menunjang
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah pelayanan pengolahan air limbah domestik	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah unit pengadaan barang milik daerah	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Infrastruktur Perhubungan	96,24%	Menunjang
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Peresentase ketersediaan perlengkapan jalan	113,70%	Menunjang
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Koordinasi Pengawasan Parkir	100,00%	Menunjang
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase alat uji KIR dalam keadaan baik	100,00%	Menunjang
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pengamanan dan koordinasi lintas sektoral	100,00%	Menunjang
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rakor penilaian andalalin	100,00%	Menunjang
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rasio cakupan kebijakan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ dan Pengawasan Pengendalian Terhadap Sarpras Keselatan Transportasi	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan dan pengendalian angkutan umum	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam tarayek lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah Kab/Kota	100,00%	
5,2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	101,28%	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100,00%	Menunjang
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	101,28%	Menunjang
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100,00%	Menunjang
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Penanganan Keanekaragaman Hayati Daerah	100,00%	Menunjang
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan pengelolaan Kehati	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Ijin Pengelolaan LB3	100,00%	Menunjang
				Penyimpanan Sementara Limbah B3	jumlah fasilitasi dan verifikasi limbah B3 dan LB3	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pengawasan Kegiatan Usaha dan Penanganan Ijin Lingkungan	112,21%	Menunjang
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH	jumlah unit usaha yang mendapatkan rekomendasi ijin lingkungan, ijin PPLH dan pengawasan kegiatan usaha	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Peraturan Lingkungan Hidup	105,12%	Menunjang
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lokasi yang memperoleh pendampingan penyusunan perdes dan sekolah adiwiyata	165,22%	Menunjang
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Penghargaan Lingkungan Hidup	105,89%	Menunjang
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah titik pantau dan penghargaan lingkungan hidup	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan Pengaduan masyarakat	100,00%	Menunjang
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	jumlah kasus yang terfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH	130,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	107,69%	Menunjang
				Pengelolaan Sampah	jumlah kegiatan pengelolaan sampah	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
	Tujuan						
6	Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	100,78%				
	Sasaran						
6,1	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	100,00%	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	533,51%	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100,00%	Menunjang
				PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Capaian Partisipasi Masyarakat/Penduduk dalam Proses Pemilihan Umum	109,33%	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100,00%	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	640,71%	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Lokasi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	133,33%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
6,2	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	71,98%	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kesenian yang Dikembangkan	111,73%	Menunjang
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kegiatan pengembangan kebudayaan Kebumen	96,49%	Menunjang
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kegiatan pelestarian kesenian tradisional	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	88,14%	Menunjang
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Prosentase cagar budaya yang dilestarikan	79,76%	Menunjang
	Tujuan						
7	Mewujudkan kondusivitas wilayah	Indeks Kondusivitas Wilayah	100,00%				
	Sasaran						
7,1	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	100,00%	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda	100,00%	Menunjang
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	terlaksananya kegiatan upaya pencegahan tindak kriminal	100,00%	Menunjang
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/kota	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kesiapsiagaan Damkar	100,00%	Menunjang
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	Menunjang
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase terlaksananya inspeksi Peralatan proteksi kebakaran	100,00%	Menunjang
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	100,00%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	100,00%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terlaksananya kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	Menunjang
7,3	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	100,00%	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa Tangguh Bencana	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100,00%	Menunjang
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100,00%	Menunjang
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100,00%	Menunjang
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100,00%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	Menunjang

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa 125 (seratus dua puluh lima) Program dengan rata-rata capaian kinerja 130,47% menunjang tercapainya 28 (dua puluh delapan) indikator tujuan/ sasaran dengan rata-rata capaian indikator kinerja tujuan/sasaran sebesar 98,40% atau Kategori Kinerja Baik.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan merupakan hasil kinerja atas penyelenggaraan Tugas Pembantuan di daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 1 ayat (11) ditegaskan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota

Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten/kota, dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kepada pihak yang memberikan penugasan. Pemberian tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, serta pelayanan publik, sekaligus mengatasi keterbatasan jangkauan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak menerima alokasi anggaran Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat

Tabel III.1 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGITAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

3.1.1 Target Kinerja

Tidak ada tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025.

3.1.2 Realisasi

Tidak ada tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025.

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Tabel III.2 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN RINCIAN KEGIATAN	DESA	SKPD PEMBERI TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KETERANGAN
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepala Pemerintahan Desa	449 Desa	BPKPD SELAKU PPKD	13.722.270.550	13.722.270.550	100,0099,58	100	100	DINAS PMD
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	449 Desa	BPKPD SELAKU PPKD	3.237.573.450	2.884.245.000	89,0999,55	100	100	DINAS PMD
3	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD)	449 Desa	BPKPD SELAKU PPKD	189.213.559.000	184.166.428.000	97,3399,98	100	100	DINAS PMD
4	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten Kepada Desa (Dana Desa)	449 Desa	BPKPD SELAKU PPKD	434.223.572.000	429.531.612.612	98,9299,62	100	100	DINAS PMD
5	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa	163 Desa	BPKPD SELAKU PPKD	37.266.000.000	24.726.000.000	66,3593,95	93.95	93,95	DINAS PMD

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

3.2.1 Target Kinerja

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025 berupa penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme bagi hasil dan bantuan keuangan daerah. Program tersebut meliputi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD), Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten kepada Desa (Dana Desa), serta Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa.

Pelaksanaan kegiatan tersebut mencakup 449 desa di Kabupaten Kebumen dengan perangkat daerah pelaksana yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) selaku PPKD dengan perangkat daerah terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Total alokasi anggaran yang ditetapkan dalam pelaksanaan program tersebut sebesar Rp677.662.975.000,00 yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Kebumen.

3.2.2 Realisasi

Realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025 secara umum dapat berjalan dengan baik. Dari total anggaran sebesar Rp677.662.975.000,00 terealisasi sebesar Rp655.030.556.162,00 atau sekitar 96,66%.

Adapun capaian kinerja kegiatan pada sebagian besar program mencapai 100%, antara lain pada Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD), serta Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten kepada Desa (Dana Desa). Sementara itu pada Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada

Pemerintah Desa terealisasi sebesar 66,36% dengan capaian kegiatan 93,95%.

3.3. Permasalahan dan Kendala

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintah di bawahnya pada Tahun 2025 secara umum dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan data pada tabel di atas, realisasi pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan tidak mengalami permasalahan maupun kendala yang signifikan, sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sementara itu, untuk Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya, pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak menerima alokasi anggaran Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, tidak terdapat pelaksanaan kegiatan maupun permasalahan yang berkaitan dengan Tugas Pembantuan yang bersumber dari pemerintah tingkat atas pada tahun tersebut.

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna membuka peluang memperoleh alokasi Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat pada tahun-tahun mendatang dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan menginventarisir potensi program pusat yang dapat dilaksanakan melalui mekanisme Tugas Pembantuan serta menyampaikan usulan atau komunikasi kepada kementerian/lembaga terkait untuk memperoleh dukungan program pada tahun berikutnya.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Secara Secara umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Pelaksanaan tersebut berlandaskan pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Adapun jenis pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan di Kabupaten Kebumen meliputi:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pendidikan Dasar; dan
- c. Pendidikan Kesetaraan.

4.1.2 Target Pencapaian SPM

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan serta Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar, ditetapkan target capaian sebagai berikut:

Tabel IV.1 Target Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
BIDANG PENDIDIKAN								
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini							36.350.535.800
	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 Tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan		88,33	88,33		88,33	88,33	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
		A. Jumlah yang Harus dilayani:	23141	23141	A. Jumlah yang Harus dilayani:	23141	23141	
		B. Jumlah Mutu (Barang/ Jasa/Sdm) yang Harus dilayani/ dipenuhi			B. Jumlah Mutu (Barang/ Jasa/Sdm) yang Harus dilayani/ dipenuhi			
		1. Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	86,93	86,93	1. Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	86,93	86,93	
		2. Proporsi Guru PAUD Dengan Kualifikasi Sarjana (S1)/ Diploma Empat (D-IV)	74,57	74,57	2. Proporsi Guru PAUD Dengan Kualifikasi Sarjana (S1)/ Diploma Empat (D-IV)	74,57	74,57	
2.	Pendidikan Dasar							228.751.266.855
	Angka Partisipasi Sekolah (7-12 tahun) SD		99,89	99,89		99,89	99,89	124.579.500.935
	Angka Partisipasi Sekolah (13-15 tahun) SMP		74,57	74,57		74,57	74,57	64.214.472.120
		A. Jumlah yang Harus dilayani:	144.345	144.345	A. Jumlah yang Harus dilayani:	144.345	144.345	
		B. Jumlah Mutu (Barang/ Jasa/Sdm) Yang Harus dilayani/ dipenuhi Sd (2025)			B. Jumlah Mutu (Barang/ Jasa/Sdm) Yang Harus dilayani/ dipenuhi Sd (2025)			
		1. Kemampuan Literasi	84,23	84,23	1. Kemampuan Literasi	84,23	84,23	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
		2. Kemampuan Numerasi	81,59	81,59	2. Kemampuan Numerasi	81,59	81,59	
		3. Indeks Iklim Keamanan	78,04	78,04	3. Indeks Iklim Keamanan	78,04	78,04	
		4. Indeks Iklim Kebhinekaan	75,39	75,39	4. Indeks Iklim Kebhinekaan	75,39	75,39	
		5. Indeks Iklim Inklusivitas	61,29	61,29	5. Indeks Iklim Inklusivitas	61,29	61,29	
		SMP (2025)			SMP (2025)			
		1. Kemampuan Literasi	90,98	90,98	1. Kemampuan Literasi	90,98	90,98	
		2. Kemampuan Numerasi	86,79	86,79	2. Kemampuan Numerasi	86,79	86,79	
		3. Indeks Iklim Keamanan	74,48	74,48	3. Indeks Iklim Keamanan	74,48	74,48	
		4. Indeks Iklim Kebhinekaan	74,87	74,87	4. Indeks Iklim Kebhinekaan	74,87	74,87	
		5. Indeks Iklim Inklusivitas	63,74	63,74	5. Indeks Iklim Inklusivitas	63,74	63,74	
3.	Pendidikan Kesetaraan							3.606.758.000
	Angka Partisipasi Sekolah (7-18tahun) Kesetaraan		11,52	9,61		11,52	9,61	3.606.758.000
		A. Jumlah yang Harus dilayani:	2365	2365	A. Jumlah yang Harus dilayani:	2365	2365	
		B. Jumlah Mutu (Barang/ Jasa/Sdm) yang Harus dilayani/ dipenuhi			B. Jumlah Mutu (Barang/ Jasa/Sdm) yang Harus dilayani/ dipenuhi			
		1. Angka Partisipasi Sekolah (7-18 Tahun) Kesetaraan	11,52	11,52	1. Angka Partisipasi Sekolah (7-18 Tahun) Kesetaraan	11,52	11,52	

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. 2025

4.1.3 Realisasi

Tabel IV.2 Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	23.141	23.141	100	36.350.535.800	35.579.766.634	97,88
2	Pendidikan Dasar	144.345	144.345	100	228.751.266.855	220.585.917.276	96,43
	a. Sekolah Dasar				124.579.500.935	118.333.559.012	94,99
	b. Sekolah Menengah Pertama				64.214.472.120	63.108.998.930	98,28
3	Pendidikan Kesetaraan	2.365	2.365	100	3.606.758.000	3.563.592.700	98,8

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. 2025

Tabel IV.3 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pendidikan (Pendidikan Anak Usia Dini) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Pendididikan Anak Usia Dini	23.141	23.141	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	86.93	86.93	100%	20
2	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma Empat (D-IV)	74.57	74.57	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. 2025

Tabel IV.4 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pendidikan (Pendidikan Dasar) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pendidikan Dasar	144.345	144.345	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
	SD (2025)				
1	Kemampuan Literasi	84.23	84.23	100%	20
2	Kemampuan Numerasi	81.59	81.59	100%	20
3	Indeks Iklim Keamanan	78.04	78.04	100%	20
4	Indeks Iklim Kebhinekaan	75.39	75.39		
5	Indeks Iklim Inklusivitas	61.29	61.29	100%	20
	SMP (2025)				
1	Kemampuan Literasi	90.98	90.98	100%	20
2	Kemampuan Numerasi	86.79	86.79	100%	20
3	Indeks Iklim Keamanan	74.48	74.48	100%	20
4	Indeks Iklim Kebhinekaan	74.87	74.87		
5	Indeks Iklim Inklusivitas	63.74	63.74	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. 2025

Tabel IV.5 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pendidikan (Pendidikan Kesetaraan) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pendidikan Kesetaraan	2.365	2.365	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	Angka Partisipasi Sekolah (7-18 tahun) Kesetaraan	11.52	11.52	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. 2025

Tabel IV.6 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100	Tuntas Paripurna
2	Pendidikan Dasar	100	Tuntas Paripurna
3	Pendidikan Kesetaraan	100	Tuntas Paripurna

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. 2025

4.1.4 Anggaran

Tabel IV.7 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)
1	APBD KABUPATEN KEBUMEN	3.173.041.187.318
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	26.601.106.593
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	26.601.106.593
	APBD	26.601.106.593
	A. APBD MURNI	0

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)
	B. APBD DAU	26.601.106.593
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	A. APBN-DEKONSENTRASI	0
	B. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. 2025

Tabel IV.8 Rincian Alokasi Anggaran Dasar Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. KEBUMEN				47,630,132,593	43,425,630,883	91.17 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
	1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			14,355,653,800	13,608,221,106	94.79 %
Angka Partisipasi Sekolah							
		1	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	29,130,000	28,585,900	98.13 %
		2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket	2,055,081,000	1,982,557,167	96.47 %
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	12,117,152,800	11,451,353,013	94.51 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	154,290,000	145,725,026	94.45 %
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)			18,267,466,000	16,127,489,758	88.29 %
Angka Partisipasi Sekolah							
		1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/ Kesetaraan	Peserta didik	1,057,840,000	1,053,092,205	99.55 %
		2	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	129,029,000	107,718,600	83.48 %
		3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	7,928,699,000	6,910,231,717	87.15 %
		4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	72,154,000	62,465,350	86.57 %
		5	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	202,610,000	193,572,876	95.54 %
Numerasi							
		1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	7,928,699,000	6,910,231,717	87.15 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	72,154,000	62,465,350	86.57 %
		3	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	202,610,000	193,572,876	95.54 %
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	224,557,000	211,379,689	94.13 %
		5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	224,557,000	211,379,689	94.13 %
		6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	224,557,000	211,379,689	94.13 %
	3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)			15,007,012,793	13,689,920,019	91.22 %
Angka Partisipasi Sekolah							
		1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	1,938,832,793	1,473,970,672	76.02 %
		2	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	29,000,000	28,942,066	99.80 %
Literasi							
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	649,249,000	629,208,269	96.91 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	2,065,544,000	2,061,720,503	99.81 %
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1,763,445,000	1,755,017,039	99.52 %
		4	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	188,690,000	145,327,553	77.02 %
Numerasi							
		1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/ Sekolah Menengah Pertama	Orang	2,065,544,000	2,061,720,503	99.81 %
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	1,763,445,000	1,755,017,039	99.52 %
		3	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	188,690,000	145,327,553	77.02 %
		4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	649,249,000	629,208,269	96.91 %
		5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1,235,108,000	1,001,486,851	81.08 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
Kebhinekaan							
		1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1,235,108,000	1,001,486,851	81.08 %
Inklusifitas							
		1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1,235,108,000	1,001,486,851	81.08 %

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. 2025

4.1.5 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.9 Dukungan Personel Penerapan SPM Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah (Orang)
BIDANG PENDIDIKAN		
1	Pendidikan Anak Usia Dini	3.044
2	Pendidikan Dasar	10.709
3	Pendidikan Kesenjangan	197

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. 2025

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Kendala yang dihadapi dan solusi yang diberikan dalam pelaksanaan penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel IV.10 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	INTERNAL		
1	SDM	Keterbatasan SDM	Menambah SDM
2	Anggaran	Keterbatasan Anggaran	Menambah Alokasi Anggaran
II	EKSTERNAL		
1	Anak usia 5-6 tahun	APS Paud masih rendah karena kesadaran masyarakat	Sosialisasi memfasilitasi Bunda dan Pokja Bunda PAUD untuk

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
		menyekolahkan pada jenjang PAUD masih kurang. Sebagian peserta didik kelas I jenjang SD/MI masih berusia di bawah 7 tahun (5-6 tahun)	sosialisasi pentingnya mengenalkan pendidikan anak sejak dini melalui PAUD Dilakukan Assesment oleh dokter pemerintah (RSDS) untuk mengetahui kemampuan anak mengikuti belajar mengajar di bawah usia SD
2	Anak usia 12-15 tahun	Terdapat anak usia sekolah 12-15 tahun di Ponpes tanpa mengikuti pendidikan SMP/MTs/Sederajat dan anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan pendidikan	Dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penanganan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah untuk kembali ke sekolah baik ke sekolah formal maupun non formal dan untuk anak berkebutuhan khusus telah disediakan sekolah yang inklusif. Sosialisasi Gerakan Kembali Bersekolah
3	Masyarakat	Faktor kemiskinan	Beasiswa Kurang Mampu (BKM), Program Indonesia Pintar (PIP)
4	Anak usia sekolah	Anak Putus Sekolah (Pernikahan di usia dini, bekerja dll)	Melaksanakan program pendidikan kesetaraan melalui penguatan PKBM

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. 2025

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelaksanaan urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Kabupaten Kebumen mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang meliputi:

- Pelayanan kesehatan ibu hamil
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- Pelayanan kesehatan balita
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus=HIV).

4.2.2 Target Pencapaian SPM

Mendasari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan ditetapkan target sebagai berikut:

Tabel IV.11 Target Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
BIDANG KESEHATAN								
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu Hamil mendapatkan Pelayanan kesehatan ibu hamil	12712	12 bulan	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu, Buku KIA	12712	12 bulan	4.444.722.0000
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	12.712	12 bulan	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu, Buku KIA, Formulir Photography	12.712	12 bulan	27.040.000
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	12.666	12 bulan	Formulir Bayi Baru Lahir, Formulir MTBM, Buku KIA	12.666	12 bulan	27.350.000
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	65.024	12 bulan	Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standar lain yang berlaku, Formulir DDTK, Buku KIA	65.024	12 bulan	34.450.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	184.580	12 bulan	Buku Rapor Kesehatanku Buku Pemantauan Kesehatan, Kuesioner Skrining Kesehatan, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	184.580	12 bulan	306.580.000
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapat-kan skrining kesehatan sesuai standar	593.999	12 bulan	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	593.999	12 bulan	37.030.000
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapat-kan skrining kesehatan sesuai Standard	177.217	12 bulan	Buku Kesehatan lansia	177.217	12 bulan	354.660.000
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	64.873	12 bulan	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE, Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	64.873	12 bulan	32.780.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11.592	12 bulan	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM, Pedoman dan Media KIE	11.592	12 bulan	37.615.000
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	4.781	12 bulan	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia), Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan, Media KIE	4.781	12 bulan	302.710.000
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	18.571	12 bulan	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner), Formulir Pencatatan dan Pelaporan, Pedoman/Standar Operasional Prosedur	18.571	12 bulan	3.217.579.800
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV Mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	15.745	12 bulan	Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	15.745	12 bulan	48.270.000

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
2025

4.2.3 Realisasi

Tabel IV.12 Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	12.712	12.712	100	4.447.220.000	4.425.764.789	99,52
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	12.712	12.712	100	27.040.000	26.918.834	99,55
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	12.666	12.666	100	27.350.000	27.329.708	99,93
4	Pelayanan kesehatan balita	65.024	65.024	100	34.450.000	34.255.000	99,43
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	184.580	184.580	100	306.580.000	299.646.900	97,74
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	593.999	593.999	100	37.030.000	36.992.500	99,90
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	177.217	177.217	100	354.660.000	353.079.000	99,55
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	64.873	64.873	100	32.780.000	32.544.600	99,28
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	11.592	11.592	100	37.615.000	37.500.750	99,70
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	4.781	4.781	100	302.710.000	295.535.458	97,63
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	18.571	18.571	100	3.217.579.800	3.137.240.672	97,50
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HumanImmunodeficiency Virus = HIV)	15.745	15.745	100	48.270.000	48.207.044	99,87

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. 2025

Tabel IV.13 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	12.712	12.712	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1271	1271	100%	20
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	2.288.160	2.288.160	100%	20
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	12.712	12.712	100%	20
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	12.712	12.712	100%	20
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	12.712	12.712	100%	20
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	12.712	12.712	100%	20
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	12712	12712	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	12712	12712	100%	20
9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	12712	12712	100%	20
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	2128	2128	100%	20
11	Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	35	35	100%	20
12	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal: dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)”	88	88	100%	20
13	Tenaga kesehatan: Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	393	393	100%	20
14	Tenaga kesehatan: Bidan (angka ideal: dengan rasio 1:1000 penduduk)	752	752	100%	20
15	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	48	48	100%	20
16	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	48	48	100%	20
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama	12.712	12.712	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)				
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. 2025

Tabel IV.14 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	12.712	12.712	100	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	Formulir partograf	12.712	12.712	100%	20
2	Kartu ibu/rekam medis ibu	12.712	12.712	100%	20
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	12.712	12.712	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	2.128	2.128	100%	20
5	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal: dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	88	88	100%	20
6	Tenaga kesehatan: Bidan (angka ideal: dengan rasio 1:1000 penduduk)	807	807	100%	20
7	Tenaga kesehatan: Perawat (angka ideal: dengan rasio 1:885 penduduk)	393	393	100%	20
8	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	48	48	100%	20
9	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	48	48	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. 2025

Tabel IV.15 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	12.666	12.666	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	12.666	12.666	100%	20
2	Vitamin K1 injeksi	12.666	12.666	100%	20
3	Salap/tetes mata antibiotik	12.666	12.666	100%	20
4	Formulir bayi baru lahir	12.666	12.666	100%	20
5	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	12.666	12.666	100%	20
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	12.666	12.666	100%	20
7	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	2128	2128	100%	20
8	Tenaga medis: Dokter/Dokter Spesialis Anak	85	85	100%	20
9	Tenaga kesehatan: Bidan	1046	1046	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
10	Tenaga kesehatan: Perawat	393	393	100%	20
11	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	48	48	100%	20
12	Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	61	61	100%	20
13	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	48	48	100%	20
14	.Kader Kesehatan	10.635	10.635	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. 2025

Tabel IV.16 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Balita) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan balita	65.024	65.024	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau	65.024	65.024	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
	Instrumen Standard lain yang berlaku.				
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	65.024	65.024	100%	20
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	65.024	65.024	100%	20
4	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	7.097	7.097	100%	20
5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	63.074	63.074	100%	20
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	3.251	3.251	100%	20
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	6.502	6.502	100%	20
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	6.502	6.502	100%	20
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB- Hib	13.005	13.005	100%	20
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak- Rubella	6.502	6.502	100%	20
11	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT-HB - Hib	13.005	13.005	100%	20
12	Vaksin imunisasi lanjutan: Campak- Rubella	6.502	6.502	100%	20
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	65.024	65.024	100%	20
14	Peralatan Anafilaktik	35	35	100%	20
15	Formula Terapi Gizi Buruk	35	35	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
16	Tenaga medis: Dokter	72	72	100%	20
17	Tenaga kesehatan: Bidan	752	752	100%	20
18	Tenaga kesehatan: Perawat	393	393	100%	20
19	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	48	48	100%	20
20	Guru PAUD	0	0	100%	20
21	Kader Kesehatan	10.635	10.635	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. 2025

Tabel IV.17 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	184.580	184.580	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	Form pencatatan/ buku rapor kesehatanku (Sesuai	184.580	184.580	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
	jumlah peserta didik di sekolah/ madrasah/ pesantren)				
2	Form pencatatan/ buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	184.580	184.580	100%	20
3	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	184.580	184.580	100%	20
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/ madrasah/ pesantren)	35	35	100%	20
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/ LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	35	35	100%	20
6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan	4.649.216	4.649.216	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
	usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di Gudang farmasi kabupaten/kota)				
7	Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	35	35	100%	20
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	35	35	100%	20
9	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	35	35	100%	20
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	36.916	36.916	100%	20
11	Tenaga medis: Dokter/Dokter gigi	107	107	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
12	Tenaga kesehatan: Bidan	749	749	100%	20
13	Tenaga kesehatan: Perawat	391	391	100%	20
14	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	48	48	100%	20
15	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	74	74	100%	20
16	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	67	67	100%	20
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: Guru	70	70	100%	20
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu: Kader Kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor	70	70	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. 2025

Tabel IV.18 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	593.999	593.999	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	460	460	100%	20
2	Alat: Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	460	460	100%	20
3	Alat: Tensimeter	460	460	100%	20
4	Alat: Glukometer	460	460	100%	20
5	Alat: Alat Pemeriksa Hb	460	460	100%	20
6	Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	593.999	593.999	100%	20
7	Alat: KIT IVA Tes	35	35	100%	20
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	35	35	100%	20
9	Kit Ophthalmologi Komunitas	35	35	100%	20
10	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	35	35	100%	20
11	Alat Pelayanan KB				
	a. Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	35	35	100%	20
	b. Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	35	35	100%	20
	c. Vasectomi Set	35	35	100%	20
12	Formulir pencatatan dan	35	35	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
	pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)				
13	Vaksin Tetanus Difteri (td)	36.916	36.916	100%	20
14	Tenaga medis: Dokter	72	72	100%	20
15	Tenaga kesehatan: Bidan	752	752	100%	20
16	Tenaga kesehatan: Perawat	393	393	100%	20
17	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	48	48	100%	20
18	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	61	61	100%	20
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	175	175	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. 2025

Tabel IV.19 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	177.217	177.217	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	460	460	100%	20
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	460	460	100%	20
3	Alat pemeriksaan kolesterol	460	460	100%	20
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	177.217	177.217	100%	20
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/Activity Daily Living (ADL Barthel)	35	35	100%	20
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	177.217	177.217	100%	20
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	35	35	100%	20
8	Tenaga medis: Dokter	72	72	100%	20
9	Tenaga kesehatan: Bidan	752	752	100%	20
10	Tenaga kesehatan: Perawat	393	393	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
11	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	48	48	100%	20
12	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	61	61	100%	20
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	175	175	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. 2025

Tabel IV.20 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	64.873	64.873	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	70	70	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
2	Obat Hipertensi	64.873	64.873	100%	20
3	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	460	460	100%	20
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	35	35	100%	20
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	35	35	100%	20
6	Tenaga medis: Dokter	72	72	100%	20
7	Tenaga kesehatan: Bidan	752	752	100%	20
8	Tenaga kesehatan: Perawat	393	393	100%	20
9	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	48	48	100%	20
10	Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	25	25	100%	20
11	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	48	48	100%	20
12	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	61	61	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. 2025

Tabel IV.21 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	11.592	11.592	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	Obat Diabetes Melitus	11.592	11.592	100%	20
2	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	35	35	100%	20
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	11.592	11.592	100%	20
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi	35	35	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
	Manajemen Puskesmas)				
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	35	35	100%	20
6	Tenaga medis: Dokter	72	72	100%	20
7	Tenaga kesehatan: Bidan	752	752	100%	20
8	Tenaga kesehatan: Perawat	393	393	100%	20
9	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	48	48	100%	20
10	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	61	61	100%	20
11	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	48	48	100%	20
12	Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	47	47	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. 2025

Tabel IV.22 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan ODGJ) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	4.781	4.781	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	35	35	100%	20
2	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	35	35	100%	20
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	35	35	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	35	35	100%	20
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	35	35	100%	20
6	Tenaga kesehatan: Dokter	72	72	100%	20
7	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	66	66	100%	20
8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	35	35	100%	20
9	Tenaga profesional lainnya	35	35	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. 2025

Tabel IV.23 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan orang	18.571	18.571	100%	80

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
	terduga tuberkulosis				

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	47	47	100%	20
2	Reagen Zn TB	6.017	6.017	100%	20
3	Masker bedah dan Masker N95	18.571	18.571	100%	20
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering.	18.571	18.571	100%	20
5	Katrid tes cepat molekuler	18.571	18.571	100%	20
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	47	47	100%	20
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	47	47	100%	20
8	Tuberkulin	1.857	1.857	100%	20
9	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	84	84	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
10	Tenaga kesehatan: Perawat	393	393	100%	20
11	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	74	74	100%	20
12	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	61	61	100%	20
13	Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	46	46	100%	20
14	Tenaga kesehatan: Radiografer	12	12	100%	20
15	Kader Kesehatan	175	175	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. 2025

Tabel IV.24 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus HIV) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	15.745	15.745	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	35	35	100%	20
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	15.745	15.745	100%	20
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	15.745	15.745	100%	20
4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	15.745	15.745	100%	20
5	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	91	91	100%	20
6	Tenaga kesehatan: Bidan	752	752	100%	20
7	Tenaga kesehatan: Perawat	393	393	100%	20
8	Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	46	46	100%	20
9	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	61	61	100%	20
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai	35	35	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
	Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan				
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. 2025

Tabel IV.25 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	Tuntas Paripurna
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	Tuntas Paripurna
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	Tuntas Paripurna
4	Pelayanan kesehatan balita	100	Tuntas Paripurna
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	Tuntas Paripurna
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	Tuntas Paripurna
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	Tuntas Paripurna
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	Tuntas Paripurna
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	100	Tuntas Paripurna
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	Tuntas Paripurna
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100	Tuntas Paripurna
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	Tuntas Paripurna

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. 2025

4.2.4 Anggaran

Tabel IV.26 Alokasi Anggaran Dasar Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KABUPATEN KEBUMEN	3.173.041.187.318
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	353.554.196.759
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	8.873.284.800
	APBD	8.873.284.800
	A. APBD MURNI	467.615.000
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	8.405.669.800
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. 2025

Tabel IV.27 Rincian Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. KEBUMEN				8.873.284.800	8.755.015.255	98,67%
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				8.873.284.800	8.755.015.255	98,67%
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			8.873.284.800	8.755.015.255	98,67%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	4.447.220.000	4.425.764.789	99,52%
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	27.040.000	26.918.834	99,55%
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	27.350.000	27.329.708	99,93%
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	34.450.000	34.255.000	99,43%
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	306.580.000	299.646.900	97,74%
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	37.030.000	36.992.500	99,90%
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	354.660.000	353.079.000	99,55%
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	32.780.000	32.544.600	99,28%
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	37.615.000	37.500.750	99,70%
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	302.710.000	295.535.458	97,63%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	3.217.579.800	3.137.240.6720	97.50%
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	48.270.000	48.207.044	99,87%
	JUMLAH INDIKATOR				8.873.284.800	8.755.015.255	98,67%
	JUMLAH PROGRAM				8.873.284.800	8.755.015.255	98,67%

4.2.5 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.28 Dukungan Personel Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH TENAGA	TOTAL
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis kebidanan	88	1.329
		Tenaga kesehatan: Bidan	752	
		Tenaga kesehatan: Perawat	393	
		Tenaga Kefarmasian	48	
		Tenaga Gizi	48	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis kebidanan	88	1.384
		Tenaga kesehatan: Bidan	807	
		Tenaga kesehatan: Perawat	393	
		Tenaga Kefarmasian	48	
		Tenaga Gizi	48	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis Anak	85	1.633
		Tenaga kesehatan: Bidan	1046	

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH TENAGA	TOTAL
		Tenaga kesehatan: Perawat	393	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	61	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	48	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Tenaga kesehatan: Dokter	72	1.265
		Tenaga kesehatan: Bidan	752	
		Tenaga kesehatan: Perawat	393	
		Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	48	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Tenaga kesehatan: Dokter/Dokter gigi	107	1.436
		Tenaga kesehatan: Bidan	749	
		Tenaga kesehatan: Perawat	391	
		Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	48	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	74	
		Tenaga Kesehatan: Masyarakat	67	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tenaga kesehatan: Dokter	72	1.326
		Tenaga kesehatan: Bidan	752	
		Tenaga kesehatan: Perawat	393	
		Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	48	
		Tenaga Kesehatan: Masyarakat	61	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Tenaga kesehatan: Dokter	72	1.326
		Tenaga kesehatan: Bidan	752	
		Tenaga kesehatan: Perawat	393	
		Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	48	
		Tenaga Kesehatan: Masyarakat	61	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Tenaga kesehatan: Dokter	72	1.399
		Tenaga kesehatan: Bidan	752	
		Tenaga kesehatan: Perawat	393	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	48	
		Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	25	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	48	
		Tenaga Kesehatan: Masyarakat	61	

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH TENAGA	TOTAL
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Tenaga kesehatan: Dokter	72	1.421
		Tenaga kesehatan: Bidan	752	
		Tenaga kesehatan: Perawat	393	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	48	
		Tenaga Kesehatan: Masyarakat	61	
		Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	48	
		Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	47	
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Tenaga kesehatan: Dokter	72	138
		Tenaga kesehatan: Perawat Terlatih Jiwa	66	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	84	646
		Tenaga kesehatan: Perawat	393	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	48	
		Tenaga kesehatan masyarakat	61	
		Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	46	
		Tenaga kesehatan: Penata Rontgen	12	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	91	1.343
		Tenaga kesehatan: Bidan	752	
		Tenaga kesehatan: Perawat	393	
		Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	46	
		Tenaga kesehatan masyarakat	61	

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.

2025

4.2.6 Kendala yang Dihadapi

Tabel IV.29 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	INTERNAL		
1	SDM	Beban Petugas yang tinggi dengan cakupan semua area pelayanan	Pembagian tugas dan beban kerja yang merata, meningkatkan kompetensi petugas
2	Anggaran	Serapan anggaran mencapai 98,67%, hal ini sebagai kategori baik, karena deviasi tidak lebih dari 5%	Meningkatkan dan mempertahankan serapan anggaran pada tahun selanjutnya
II	EKSTERNAL		
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Area bidang pelayanan sangat luas	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta memperluas jangkauan pelayanan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Area bidang pelayanan sangat luas	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta memperluas jangkauan pelayanan
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Area bidang pelayanan sangat luas	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta memperluas jangkauan pelayanan
4	Pelayanan kesehatan balita	Area bidang pelayanan sangat luas	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta memperluas jangkauan pelayanan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Area bidang pelayanan sangat luas	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta memperluas jangkauan pelayanan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Area bidang pelayanan sangat luas	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta memperluas jangkauan pelayanan
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Area bidang pelayanan sangat luas	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta memperluas jangkauan pelayanan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Area bidang pelayanan sangat luas	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta memperluas jangkauan pelayanan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Area bidang pelayanan sangat luas	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
			memperluas jangkauan pelayanan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Area bidang pelayanan sangat luas	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta memperluas jangkauan pelayanan
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Area bidang pelayanan sangat luas	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta memperluas jangkauan pelayanan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Area bidang pelayanan sangat luas	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta memperluas jangkauan pelayanan

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. 2025

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Secara umum pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. Pelaksanaan tersebut berpedoman pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang meliputi:

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen).
- Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen).

4.3.2 Target Pencapaian SPM

Mendasari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan target sebagai berikut:

Tabel IV.30 Target Capaian SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
BIDANG PEKERJAAN UMUM								
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM terhadap total rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	17424	12 bulan	Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	4356	12 bulan	4,116,630,000
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Total yang terlayani	2460	12 bulan	Ukuran Kuantitas Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik , setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan air limbah domestik	615	12 bulan	735.863.000

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen 2025

4.3.3Realisasi

Tabel IV.31 Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	17424	17424	100	4,116,630,000	3,961,797,167	96.24
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	2460	2460	100	735.863.000	726.406.532	98.71

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Tabel IV.32 Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani		
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	17424	17424	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	0	0	0%	0
2	Pelayanan SPAM	4356	4356	100%	20

	Jaringan Perpipaan				
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Tabel IV.33 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum (Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani		
1	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	2.460	2.460	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	615	615	100%	20
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	0	0	0%	0

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
3	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	615	615	100%	20
4	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	0	0	0%	0
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025

4.3.4 Anggaran

Tabel IV.34 Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KABUPATEN KEBUMEN	3,173,041,187,318
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	219,364,976,583
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	4,116,630,000
	APBD	4,116,630,000
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	4,116,630,000
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Tabel IV.35 Rincian Kegiatan Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. KEBUMEN				4,852,493,000	4,688,203,699	96.61%
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				4,116,630,000	3,961,797,167	96.24%
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			4,116,630,000	3,961,797,167	96.24%
		1	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	3,985,653,000	3,837,375,567	96.28%
		2	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan	Liter/Detik	100,000,000	96,126,000	96.13%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			di kawasan Perdesaan				
		3	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	30,977,000	28,295,600	91.34%
	JUMLAH INDIKATOR				4,116,630,000	3,961,797,167	96.24%
	JUMLAH PROGRAM				4,116,630,000	3,961,797,167	96.24%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				735.863.000	726.406.532	98.71%
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota			735.863.000	726.406.532	98.71%
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	63.000.000	61.416.000	97.49%
		2	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	350.000.000	344.850.000	98.53%
		3	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	100.000.000	97.398.449	97.40%
		4	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	222.863.000	222.742.083	99.95%
	JUMLAH INDIKATOR				735.863.000	726.406.532	98.71%
	JUMLAH PROGRAM				735.863.000	726.406.532	98.71%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025

4.3.5 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.36 Dukungan Personel Penerpan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten
Kebumen Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah (Orang)
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	502 rang yang terdiri dari: DPUPR 10 orang PDAM 79 orang Dinkes 35 orang KPSPAMS 378 orang
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	24 orang yang terdiri atas: - 10 orang Tim Kantor -14 orang operator sedot tinja

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.37 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	INTERNAL		
1	SDM	Keterbatasan SDM	Menambah SDM
2	Anggaran	Keterbatasan Anggaran	Menambah Alokasi Anggaran
II	EKSTERNAL		
1	Sumber daya alam	Terbatasnya sumber mata air bersih	Penyediaan SPAM regional bersama
2	Sumber daya alam	Sumber akses air minum belum layak	Pembentukan kelembagaan pengelolaan SPAM regional bersama
3	Sumber daya alam	Masih terdapat warga yang belum mendapatkan pelayanan akses air minum layak.	Peningkatan kualitas akses air minum layak secara berkala.
4	Sarana dan prasarana	Masih banyak masyarakat yang belum punya tangki septik yang standar/SNI (+/- 85%) sehingga pengolahan lumpur tinja belum maksimal	Lewat program DAK Sanitasi masyarakat akan membuat Tangki septik yang sesuai standart SNI

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Secara umum pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. Hal ini mendasari Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 tahun 2024 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. Jenis Pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat di Kabupaten Kebumen mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota.
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

4.4.2 Target Pencapaian SPM

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ditetapkan target sebagai berikut:

Tabel IV.38 Target Capaian SPM Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
BIDANG PEKERJAAN UMUM								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Presentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	4	12 bulan	Bantuan rehabilitasi rumah Bagi Korban Bencana	1	12 bulan	15.000.000
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Persentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas	36	12 bulan	Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	10	12 bulan	930.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
	daerah kabupaten	penyediaan rumah layak huni						
					Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	9	12 Bulan	270.000.000

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2025

4.4.3 Realisasi

Hasil Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.39 Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	1	1	100	15.000.000	15.000.000	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah daerah kabupaten	9	9	100	270.000.000	270.000.000	100

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Tabel IV.40 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat (Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	4	4	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	1	1	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen 2025

Tabel IV.41 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat (Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah daerah kabupaten) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	36	36	100%	80

	daerah daerah kabupaten				
--	-------------------------	--	--	--	--

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	Fasilitasi Penggantian Hak atas Penguasaan Tanah atau Bangunan	-	-	-	-
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	10	10	100%	20%
2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	9	9	100%	20%
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20%

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen 2025

Tabel IV.42 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	Tuntas Paripurna
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah daerah kabupaten	100	Tuntas Paripurna

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen 2025

4.4.4 Anggaran

Tabel IV.43 Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen
Tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KABUPATEN KEBUMEN	3.173.041.187.318
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	38.381.649.112
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	345.749.000
	APBD	345.749.000
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	345.749.000
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Tabel IV.44 Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen
Tahun 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KABUPATEN KEBUMEN				345.749.000	344.326.500	99.59%
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				345.749.000	344.326.500	99.59%
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			26.999.000	25.749.000	95,37%
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi	Dokumen	26.999.000	25.749.000	95,37%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			program Kabupaten/Kota				
	JUMLAH INDIKATOR				26.999.000	25.749.000	95,37%
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			318.750.000	318.577.500	99,95%
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	15.000.000	15.000.000	100%
		2	Penyusunan Site Plan atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	33.750.000	33.577.500	99,49%
		3	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	unit Rumah	270.000.000	270.000.000	100%
	JUMLAH INDIKATOR				318.750.000	318.577.500	99,95%
	JUMLAH PROGRAM				345.749.000	344.326.500	99,59%

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

4.4.5 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.45 Dukungan Personel Penerpan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah (Orang)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Personel yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat secara umum berasal dari pegawai Bidang Perumahan Dinas DISPERKIMUB Kab.Kebumen dimana pada tahun 2025 jumlah personil sebanyak 16 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 13 orang dan perempuan 3 orang.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah (Orang)
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Jumlah personil sebanyak 16 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 13 orang dan perempuan 3 orang.

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.46 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	INTERNAL		
1	Perencanaan	Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM perumahan rakyat adalah Penanganan rumah korban bencana tidak dapat segera dilaksanakan setelah terjadi bencana.	Penanganan rumah korban bencana dilakukan pada tahun N+1 melalui proses Perencanaan dalam dokumen perencanaan daerah dan penganggaran dalam APBD.
2	SDM	Keterbatasan SDM	Menambah SDM
3	Anggaran	Keterbatasan Anggaran	Menambah Alokasi Anggaran
II	EKSTERNAL		
1	Masyarakat	Dari bebrapa masyarakat korban bencana tidak memiliki lahan yang lebih aman untuk relokasi	Sosialisasi dan pendekatan persuasive kepada masyarakat korban bencana agar bersedia direlokasi dan mengusulkan ke pemerintah pusat untuk disediakan rumah susun bagi korban bencana yang tidak punya lahan

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

4.5 Urusan Trantibumlinmas

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar dalam urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat meliputi:

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian SPM

Tabel IV.47 Target Capaian SPM Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
BIDANG TRANTIBUMLINMAS								
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum kabupaten	Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	1	12 bulan	Penegakan Perda sesuai SOP	1	12 bulan	6.385.677.112
					Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	100%	12 bulan	
					Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	100%	12 bulan	
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi bencana	726.543	12 bulan	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)			258.593.750

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	1	12	
					Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara dalam bentuk kajian dan album peta	1	12	
					Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	540	12 bulan	
					Terlaksananya sosialisasi tatap muka	8	12 bulan	
					Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	6	12 bulan	
					Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	5	12 bulan	
					Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	5	12 bulan	
					Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 bulan	
					Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 bulan	
					Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	5	12 bulan	
					Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	5	12 bulan	
					Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	53	12 bulan	

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	27	12 bulan	
					Tersedianya Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan)	5	12 bulan	
					Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	5	12 bulan	
					Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 bulan	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	90	12 bulan	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)			679.714.800
					Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	1	12 bulan	
					Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara	1	12 bulan	
					Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 bulan	
					Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	2	12 bulan	
					Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	3	12 bulan	
					Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	5	12 bulan	
					Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 bulan	
					Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 bulan	

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 bulan	
					Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 bulan	
					Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	6	12 bulan	
					Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	5	12 bulan	
					Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 bulan	
					Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 bulan	
					Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 bulan	
					Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	6	12 bulan	
					Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	5	12 bulan	
					Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 bulan	
					Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 bulan	
					Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	5	12 bulan	

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 bulan	
					Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 bulan	
					Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	5	12 bulan	
					Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	365	12 bulan	
					Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	12	12 bulan	
					Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	1	12 bulan	
					Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	2	12 bulan	
					Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	3	12 bulan	
					Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	5	12 bulan	
					Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 bulan	
					Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 buah	
					Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 bulan	

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 bulan	
					Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 bulan	
					Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 bulan	
					Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 bulan	
					Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 bulan	
					Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 bulan	
					Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 bulan	
					Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	375	12 bulan	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	244	12 bulan	Respon Cepat Darurat Bencana			1.910.732.000
					Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	160	12 bulan	

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	4	12 bulan	
					Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	60	12 bulan	
					Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	1	12 bulan	
					Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	4	12 bulan	
					Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	12	12 bulan	
					Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	12	12 bulan	
					Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	2	12 bulan	
					Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	30	12 bulan	
					Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	81	12 bulan	
					Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	82	12 bulan	

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	12	12 bulan	
					Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	12	12 bulan	
					Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	6	12 bulan	
					Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	17	12 bulan	
					Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	7	12 bulan	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	12 bulan	Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	100%	12 bulan	
					Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	26 kecamatan	12 bulan	

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen dan BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2025

4.5.3 Realisasi

Tabel IV.48 Realisasi Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	1	1	100	6.385.677.112,	6.027.329.910,-	94,39
2	Pelayanan informasi rawan bencana	726.453	726.453	100	258.593.7500	254.993.600	98,61
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	90	90	100	679.714.800	673.604.836	99,10
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	244	244	100	1.910.732.000	1.889.625.512	98,90

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen dan BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Tabel IV.49 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	29.969	29.969	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	Penegakan Perda sesuai SOP	20	20	100%	20
2	Pelaksanaan penegakan perda menggunakan	35.969	35.969	100%	20

	Sarpras sesuai standar				
3	Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	35.969	35.969	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Tabel IV.50 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan informasi rawan bencana) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan informasi rawan bencana	726.453	726.453	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	1	1	100	20
2	Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	1	1	100	20
3	Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	540	540	100	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
4	Terlaksananya sosialisasi tatap muka	8	8	100	20
5	Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	6	6	100	20
6	Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100	20
7	Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100	20
8	Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	20
9	Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	20
10	Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100	20
11	Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100	20
12	Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	53	53	100	20
13	Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	27	27	100	20
14	Tersedianya Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100	20
15	Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100	20
16	Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					100

Tabel IV.51 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan informasi rawan bencana) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	90	90	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	1	1	100	20
2	Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara	1	1	100	20
3	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	20
4	Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	2	2	100	20
5	Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
6	Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100	20
7	Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	20
8	Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	20
9	Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	20
10	Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana	1	1	100	20
11	Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	6	6	100	20
12	Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100	20
13	Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	20
14	Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	20
15	Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	20
16	Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	6	6	100	20
17	Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
18	Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	20
19	Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	20
20	Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100	20
21	Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	20
22	Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	20
23	Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100	20
24	Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	365	365	100	20
25	Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	12	12	100	20
26	Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	1	1	100	20
27	Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
28	Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100	20
29	Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100	20
30	Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	20
31	Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	20
32	Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	20
33	Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	20
34	Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	20
35	Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	20
36	Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	20
37	Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	20
38	Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga	1	1	100	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
	(sesuai dengan kebutuhan)				
39	Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	20
40	Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	375	375	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					100

Sumber: BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Tabel IV.52 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan informasi rawan bencana) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	244	244	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	160	160	100	20
2	Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	4	4	100	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
3	Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	60	60	100	20
4	Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	20
5	Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	4	4	100	20
6	Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	12	12	100	20
7	Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	12	12	100	20
8	Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100	20
9	Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	30	30	100	20
10	Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	81	81	100	20
11	Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	82	82	100	20
12	Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban	12	12	100	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
	bencana (sesuai dengan kebutuhan)				
13	Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	12	12	100	20
14	Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	6	6	100	20
15	Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	17	17	100	20
16	Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	7	7	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					100

Sumber: BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Tabel IV.53 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	109	109	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	90	90	100%	20
2	Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	26	26	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Tabel IV.54 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas
Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100	Tuntas Paripurna
2	Pelayanan informasi rawan bencana	100	Tuntas Paripurna
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	Tuntas Paripurna
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Tuntas Paripurna
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Tuntas Paripurna

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen dan BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2025

4.5.4 Anggaran

Tabel IV.55 Alokasi Anggaran SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. KEBUMEN	3.173.041.187.318
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	30.405.387.548
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	37.456.205.536
	APBD	37.456.205.536
	A. APBD MURNI	30.525.202.548
	B. APBD DAU	6.485.723.200
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	445.279.788
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen dan BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Tabel IV.56 Alokasi Anggaran SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. KEBUMEN				26.048.091.428	25.545.834.508	98,07%
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				6.385.677.112	6.027.329.910	94,39%
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.689.274.450	5.343.313.282	93,92%
		1	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	1.684.060.000,-	1.454.995.895,-	86,40%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		2	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	73.614.000,-	73.417.072	99,73%
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	3.156.495.300,-	3.079.919.645,-	97,57%
		4	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	735.105.150	734.980.670,-	99,98%
	JUMLAH INDIKATOR				5.689.274.450	5.343.313.282	93,92%
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			689.423.262,-	677.101.600,-	98,21%
		1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	66.583.000,-	66.568.169,-	99,98%
		2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	600.369.262,-	588.071.445,-	97,95%
		3	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	22.471.000,-	22.461.986,-	99,96%
	JUMLAH INDIKATOR				689.423.262,-	677.101.600,-	98,21%
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			6.979.400,-	6.915.028,-	99,08%
		1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	6.979.400,-	6.915.028,-	99,08%
	JUMLAH INDIKATOR				6.979.400,-	6.915.028,-	99,08%
	JUMLAH PROGRAM				6.385.677.112,-	6.027.329.910,-	94,39%
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				19.077.088.440	18.984.333.917	99,51%
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			258.593.750	254.993.600	98,61%
		1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	258.593.750	254.993.600	98,61%
	JUMLAH INDIKATOR				258.593.750	254.993.600	98,61%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			679.714.800	673.604.836	99,10%
		1	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	136.752.000	135.250.586	98,90%
		2	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	72.725.000	72.074.720	99,11%
		3	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	67.313.000	67.101.280	99,69%
		4	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	107.987.300	106.676.168	98,79%
		5	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	79.262.000	78.923.750	99,57%
		6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	87.251.500	85.845.080	98,39%
		7	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	53.424.000	52.735.252	98,71%
		8	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	75.000.000	74.998.000	100%
	JUMLAH INDIKATOR				679.714.800	673.604.836	99,10%
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			1.910.732.000	1.889.625.512	98,90%
		1	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.531.978.000	1.521.475.395	99,31%
		2	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	146.754.000	140.930.517	96,03%
		3	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	232.000.000	227.219.600	97,94%
	JUMLAH INDIKATOR				1.910.732.000	1.889.625.512	98,90%
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			16.228.047.890	16.166.109.969	99,62%
		1	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	42.771.890	41.795.704	97,72%
		2	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	67.753.000	67.418.315	99,51%
		3	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	15.319.000	14.963.527	97,68%
		4	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	16.102.204.000	16.041.932.423	99,63%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	JUMLAH INDIKATOR				16.228.047.890	16.166.109.969	99,62%
	JUMLAH PROGRAM				19.077.088.440	18.984.333.917	99,51%
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				585.325.876,-	534.170.681,-	91,26%
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			526.433.676,-	475.406.280,-	90,31%
		1	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	475.090.876,-	424.148.798,-	89,28%
		2	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	51.342.800,-	51.257.482,-	99,83%
	JUMLAH INDIKATOR				526.433.676,-	475.406.280,-	90,31%
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			16.638.600,-	16.594.871,-	99,74%
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	16.638.600,-	16.594.871,-	99,74%
	JUMLAH INDIKATOR				16.638.600,-	16.594.871,-	99,74%
	10	Investigasi Kejadian Kebakaran			0	0	0%
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0%
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			42.253.600,-	42.169.530,-	99,80%
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	42.253.600,-	42.169.530,-	99,80%
	JUMLAH INDIKATOR				42.253.600,-	42.169.530,-	99,80%
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			0	0	0%
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0%
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		3	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%
		4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0%
	JUMLAH PROGRAM				585.325.876	534.170.681	91,26%

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen dan BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2025

4.5.5 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.57 Dukungan Personel Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH (ORANG)
BIDANG TRANTIBUMLINMAS		
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	21 orang dibawah koordinasi Satpol PP Kabupaten Kebumen
2	Pelayanan informasi rawan bencana	43 orang (karyawan BPBD)
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	43 orang (karyawan BPBD)
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	578 orang (relawan)
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	210 orang dibawah koordinasi Satpol PP Kabupaten Kebumen

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen dan BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2025

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel IV.58 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	INTERNAL		
1	SDM	Keterbatasan SDM	Menambah SDM

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
2	Anggaran	Keterbatasan Anggaran	Menambah Alokasi Anggaran
II	EKSTERNAL		
1	Masyarakat	Belum semua warga masyarakat memahami terhadap pelayanan ganti rugi akibat penegakan perda/perkada	Sosialisasi
2	Wilayah risiko tinggi bencana	Masih terbatasnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap risiko tinggi bencana	Peningkatan kapasitas destana dan pemasangan rambu/ informasi bencana
3	Warga dan aparat	Masih terbatasnya pemahaman warga dan aparat terhadap bencana	Melaksanakan sosialisasi atau pelatihan mitigasi bencana
4	Petugas/relawan	Masih terbatasnya kompetensi teknis para petugas/ relawan	Melaksanakan pelatihan dan kompetensi petugas/relawan
5	Kondisi geografis	Belum seluruh wilayah Kabupaten Kebumen terjangkau <i>respon time</i> 15 menit	Menggalakkan partisipasi masyarakat dalam penanganan kebakaran

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen dan BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2025

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, maka jenis pelayanan dasar pada urusan sosial meliputi sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

4.6.2 Target Pencapaian SPM

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, telah ditetapkan sejumlah target yang harus dicapai sebagai berikut:

Tabel IV.59 Target Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
BIDANG SOSIAL								
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	415	12 bulan	Layanan data dan pengaduan	50	12 bulan	8.000.000
					Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	5	12 bulan	8.000.000
					Penyediaan permakanan	50	12 bulan	331.366.400
					Penyediaan sandang	10	12 bulan	113.212.500
					Penyediaan alat bantu	62	12 bulan	60.008.233
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	100	12 bulan	60.932.000
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	3	12 bulan	11.090.122
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	3	12 bulan	2.250.000
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi	120	12 bulan	180.000.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					layanan pendidikan dan kesehatan			
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	12 bulan	8.000.000
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	12 bulan	2.250.000
					Layanan rujukan	3	12 bulan	8.000.000
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	150	12 bulan	Layanan data dan pengaduan	10	12 bulan	4.000.000
					Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	5	12 bulan	5.000.000
					Penyediaan permakanan	100	12 bulan	148.585.200
					Penyediaan sandang	10	12 bulan	18.693.300
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	3	12 bulan	2.250.000
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	12 bulan	6.000.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	12 bulan	2.250.000
					Layanan rujukan	3	12 bulan	4.000.000
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	806	12 bulan	Layanan data dan pengaduan	20	12 bulan	4.000.000
					Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	5	12 bulan	4.000.000
					Penyediaan permakanan	740	12 bulan	832.140.000
					Penyediaan sandang	10	12 bulan	32.448.400
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	3	12 bulan	2.250.000
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	12 bulan	2.000.000
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	12 bulan	2.250.000
					Layanan rujukan	3	12 bulan	6.000.000
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan	79	12 bulan	Layanan data dan pengaduan	20	12 bulan	8.000.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
	luar panti sosial	dasarnya di luar panti						
					Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	5	12 bulan	8.000.000
					Penyediaan permakanan	20	12 bulan	29.717.040
					Penyediaan sandang	10	12 bulan	6.472.775
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	3	12 bulan	2.250.000
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	12 bulan	8.000.000
					Layanan rujukan	3	12 bulan	6.000.000
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	Persentase%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	970	12 bulan	Penyediaan Permakanan	440	12 bulan	187.440.000
					Penyediaan Sandang	115	12 bulan	78.318.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1	12 bulan	112.050.000
					Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan (ibu hamil, Penyandang Disabilitas, Anak, dan Lanjut Usia)	115	12 bulan	96.176.500
					Pelayanan Dukungan Psikososial (Bimbingan konsultasi, konseling, pendampingan dan/atau rujukan)	300	12 bulan	48.276.000

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen 2025

4.6.3 Realisasi

Tabel IV.60 Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	415	415	100	793.109.255	793.109.255	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	150	150	100	190.778.500	190.778.500	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	806	806	100	885.088.400	885.088.400	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	79	79	100	68.439.815	68.439.815	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	970	970	100	522.260.500	522.260.500	100

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Tabel IV.61 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	415	415	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Layanan data dan pengaduan	50	50	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
2	penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	5	5	100%	20
3	penyediaan permakanan	50	50	100%	20
4	penyediaan sandang	10	10	100%	20
5	penyediaan alat bantu	62	62	100%	20
6	penyediaan perbekalan kesehatan	3	3	100%	20
7	pemberian bimbingan firik, mental, priritual dan sosial	100	100	100%	20
8	pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	3	3	100%	20
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	3	3	100%	20
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	120	120	100%	20
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	100%	20
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	3	100%	20
13	Layanan rujukan	3	3	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Tabel IV.62 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	150	150	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	Layanan data dan pengaduan	10	10	100%	20
2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	5	5	100%	20
3	Penyediaan permakanan	100	100	100%	20
4	Penyediaan sandang	10	10	100%	20
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	3	3	100%	20
6	Penyediaan perbekalan k	3	3	100%	20
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	3	3	100%	20
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	3	3	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	4	4	100%	20
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	100%	20
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	3	100%	20
12	Layanan rujukan	3	3	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Tabel IV.63 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantr di luar panti sosial) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantr di luar panti sosial	806	806	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	Layanan data dan pengaduan	20	20	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	5	5	100%	20
3	Penyediaan permakanan	740	740	100%	20
4	Penyediaan sandang	10	10	100%	20
5	Penyediaan alat bantu	5	5	100%	20
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	5	5	100%	20
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	3	3	100%	20
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	3	3	100%	20
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah/Bukti dokumen kependudukan	3	3	100%	20
10	Akses ke layanan kesehatan dasar/fasilitasi layanan kesehatan	3	3	100%	20
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	100%	20
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	3	100%	20
13	Layanan rujukan	3	3	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Tabel IV.64 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	79	79	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	Layanan data dan pengaduan	20	20	100%	20
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	5	5	100%	20
3	penyediaan permakanan	20	20	100%	20
4	Penyediaan sandang	10	10	100%	20
5	Penyediaan perbekalan kesehatan	3	3	100%	20
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	3	3	100%	20
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	3	3	100%	20
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, atau Kartu Identitas Anak/Bukti	3	3	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
	dokumen kependudukan				
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	3	3	100%	20
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	100%	20
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	3	100%	20
12	Layanan rujukan	3	3	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Tabel IV.65 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten) Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	970	970	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia		
1	Penyediaan Permakanan	440	440	100%	20
2	Penyediaan Sandang	115	115	100%	20
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1	1	100%	20
4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan (ibu hamil, Penyandang Disabilitas, Anak, dan Lanjut Usia)	115	115	100%	20
5	Pelayanan Dukungan Psikososial (Bimbingan konsultasi, konseling, pendampingan atau rujukan)	300	300	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Tabel IV.66 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	100	Tuntas Paripurna
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	100	Tuntas Paripurna
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	100	Tuntas Paripurna
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	100	Tuntas Paripurna

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	100	Tuntas Paripurna

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2025

4.6.4 Anggaran

Tabel IV.67 Alokasi Anggaran Dasar SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KABUPATEN KEBUMEN	3.173.041.187.318
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	16.395.897.570
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	2.459.676.470
	APBD	0
	A. APBD MURNI	2.459.676.470
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Tabel IV.68 Rincian Kegiatan Anggaran Dasar SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. KEBUMEN				2.459.676.470	2.459.676.470	100%
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				2.459.676.470	2.459.676.470	100%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			1.937.415.970	1.937.415.970	100%
		1	Penyediaan permakanaan	Orang	1.341.808.640	1.341.808.640	100%
		2	Penyediaan sandang	Orang	170.826.975	170.826.975	100%
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	60.008.233	60.008.233	100%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	6.750.000	6.750.000	100%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	60.932.000	60.932.000	100%
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	11.090.122	11.090.122	100%
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	9.000.000	9.000.000	100%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	180.000.000	180.000.000	100%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	24.000.000	24.000.000	100%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	25.000.000	25.000.000	100%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	24.000.000	24.000.000	100%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	24.000.000	24.000.000	100%
	JUMLAH INDIKATOR				1.937.415.970	1.937.415.970	100%
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			522.260.500	522.260.500	100%
		1	Penyediaan makanan	Orang	187.440.000	187.440.000	100%
		2	Penyediaan sandang	Orang	78.318.000	78.318.000	100%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	112.050.000	112.050.000	100%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	96.176.500	96.176.500	100%
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	48.276.000	48.276.000	100%
	JUMLAH INDIKATOR				522.260.500	522.260.500	100%
	JUMLAH PROGRAM				2.459.676.470	2.459.676.470	100%

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2025

4.6.5 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.69 Dukungan Personel Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen
Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah (Orang)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	260
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	260
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	260
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	260
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	401

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2025

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel IV.70 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten
Kebumen Tahun 2025

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	INTERNAL		
1	SDM	Keterbatasan SDM	Menambah SDM
2	Anggaran	Keterbatasan Anggaran	Menambah Alokasi Anggaran
II	EKSTERNAL		
1	Penyandang disabilitas	Verifikasi dan validasi data penerima sasaran pelayanan SPM, penyandang disabilitas mental rentan kambuh (khusus disabilitas mental)	Memaksimalkan verifikasi dan validasi data penerima sasaran pelayanan, berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak keluarga, desa, dan puskesmas saling memonitor
2	Modal usaha dan pemasaran	masih terhambatnya pemasaran produk hasil pelatihan terkendala faktor permodalan	mempromosikan produk hasil pelatihan mencari mitra usaha/pemberi modal
3	Lansia	Masih banyaknya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi diantaranya tidak memiliki rumah layak huni, tidak memiliki anggota keluarga, diterlantarkan oleh keluarga dan tidak mampu mengurus dirinya	Dirujuk ke panti khusus lansia, permohonan bedah rumah (jika memiliki hak tanah), pemberian permakanan
4	Penyandang disabilitas	penyandang disabilitas mental rentan kambuh (khusus untuk disabilitas	Pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian pelatihan, peningkatan

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
		mental), rendahnya akses lapangan kerja, rendahnya tingkat keterampilan	keterampilan, bimbingan rohani/spiritual, pemeriksaan kesehatan rutin

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2025

4.7 Program dan Kegiatan

Capaian SPM di Kabupaten Kebumen tahun 2025 didukung dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

- A. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Pendidikan
 - 1. Program Pengelolaan Pendidikan
 - a) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
 - Pengelolaan Dana BOP PAUD
 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
 - b) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Pengadaan Mebel Sekolah
 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - Pemeliharaan Rutin Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- c) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Pengadaan Mebel Sekolah
 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
- d) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan

B. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Kesehatan

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

C. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Pekerjaan Umum

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

a) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

2. Program Peningkatan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

a) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

D. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Perumahan Rakyat

1. Program Pengembangan Perumahan

a) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

b) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

a) Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

E. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

b) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

2. Program Penanggulangan Bencana

a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

d) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- Koordinasi penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
- Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

e) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
- f) Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- g) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

F. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Sosial

1. Program Rehabilitasi Sosial

- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Alat bantu
 - Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - Pemberian Layanan Kedaruratan

2. Program Penanganan Bencana

- a) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Makanan
 - Penyediaan sandang
 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
 - Pelayanan Dukungan Psikososial
- b) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta responsif terhadap dinamika perubahan secara efektif dan efisien. Secara umum, capaian kinerja Tahun Anggaran 2025 pada seluruh program dan kegiatan di setiap urusan pemerintahan dapat direalisasikan dengan baik, dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2025.

LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini diharapkan menjadi landasan evaluatif sekaligus referensi strategis dalam mengarahkan perbaikan pembangunan daerah pada masa mendatang. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kebumen dituntut untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, khususnya dalam merespons berbagai permasalahan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, LPPD ini tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk komitmen moral untuk secara objektif mengidentifikasi keberhasilan maupun kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan.

Demikian LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini disampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan kekuatan, kesehatan, dan ketulusan hati kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian guna mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Kebumen pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN

1.1. Inovasi Daerah Tahun 2025

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menyebutkan bahwa inovasi daerah ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun bentuk inovasi daerah antara lain inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah diwujudkan dalam sebuah sistem inovasi daerah dan jaringan inovasi daerah. Dalam rangka mendukung iklim riset dan inovasi daerah dibentuk jejaring riset dan inovasi daerah melibatkan lembaga penelitian, bisnis, masyarakat dan media sebagai perwujudan sinergi pentahelix. Beberapa inovasi daerah di Kabupaten Kebumen antara lain:

- 1) Pengembangan Sistem Perlindungan Pekerja Migran. Keluarga dan Masyarakat melalui “SIPEMIKAT”

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian. Tingginya angka pengangguran Kabupaten Kebumen sebesar 5,11% pada tahun 2023 dengan total pencari kerja yang tercatat sebesar 10.654 orang dengan persentase pencari kerja yang ditempatkan sebesar 53,54%. Kondisi ini menjadikan sebagian tenaga kerja di Kabupaten Kebumen memilih bekerja sebagai pekerja migran atau bekerja di luar negeri. Jumlah pekerja migran yang ditempatkan selama tiga tahun terakhir (2019-2023) terus meningkat menjadi sebesar 9.082 orang. Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kantong pekerja migran yaitu tertinggi ke 8 di Jawa Tengah dan 25 di tingkat nasional. Kondisi ini memicu berbagai permasalahan terkait pekerja migran. Setidaknya terdapat 12 kasus pada Tahun 2023 yang ditangani Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dengan aduan mayoritas adalah gagal berangkat/mundur karena tidak ada penempatan.

Upaya peningkatan perlindungan pada PMI Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen membangun sistem kolaborasi yang terintegrasi atau “SIPEMIKAT” SINERGI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN, KELUARGA DAN MASYARAKAT. Inovasi ini bertujuan agar upaya perlindungan PMI lebih komprehensif

merupakan sinergi pentahelix berkomitmen untuk memaksimalkan upaya perlindungan serta pemberdayaan PMI. Dalam pelaksanaannya terdapat pilar SIPEMIKAT sebagai pengembangan Desa Migran Produktif/DESMIGRATIF yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi Calon PMI, PMI dan PMI purna penempatan beserta anggota keluarganya secara terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan. Inovasi ini melibatkan stakeholder termasuk perangkat daerah terkait seperti Disdukcapil, Dinas Kesehatan dan melibatkan instansi vertikal seperti imigrasi, kepolisian, BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta Pengadilan Agama.

SIPEMIKAT, Sinergi Pelindungan Pekerja Migran Keluarga dan Masyarakat bertujuan agar upaya perlindungan PMI lebih komprehensif, terbit peraturan desa, replikasi Desa Migran Produktif di 26 kecamatan, terbangun database PMI pada semua desa/kelurahan, pelibatan PMI dan keluarganya dalam kegiatan pembangunan dengan anggaran desa, community parenting untuk anak PMI yang ditinggalkan, serta kolaborasi kegiatan antar perangkat daerah.

Hingga saat ini telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh Camat dan Kades dan telah tersusun regulasi berupa Peraturan Desa tentang Pelindungan dan Pemberdayaan PMI sebanyak 295 Perdes dan 340 database calon PMI, PMI maupun PMI purna penempatan dari jumlah total 460 desa/kelurahan di Kabupaten Kebumen, terbentuknya 14 Pokja Bina TKI, terbentuknya Tim Psikososial community parenting, sosialisasi intensif melalui media cetak dan elektronik serta tersedia hotline layanan pengaduan PMI. Melalui Perbup Nomor 5/2023 teralokasi dana desa untuk kegiatan perlindungan PMI serta kolaborasi kegiatan antar perangkat daerah.

Kebaruan inovasi SIPEMIKAT adalah tersedianya layanan luar gedung dalam bentuk mobil keliling yang diberi nama PATRIOT yang dilaksanakan di minggu ke III setiap bulan bertempat di Alun-Alun Pancasila Kebumen atau di event-event insidental jika diperlukan. Atas inovasi tersebut Pemerintah Kabupaten Kebumen mendapatkan penghargaan Hassan Wirajuda Award (HWPDA) yaitu penghargaan kepada perorangan lembaga, instansi pemerintah baik di perwakilan maupun pemerintah daerah yang memberikan upaya perlindungan kepada WNI dengan sungguh-sungguh.

2) Pengembangan Puskesmas SLRT “Rumah Harapan”

Kemiskinan merupakan salah satu isu strategis daerah Kabupaten Kebumen yang akan menjadi mainstreaming dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan. Berbagai upaya Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan kerentanan telah dilakukan. Pada level penanganan kemiskinan mikro masih terdapat kasus masyarakat miskin yang belum menerima layanan perlindungan sosial secara komprehensif dan banyak yang belum menerima manfaat dari program penanggulangan pemerintah meskipun kondisinya layak menerima. Sebagai langkah tindak lanjut pada September 2015 telah diluncurkan Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (UPT-P2K) “RUMAH HARAPAN” Kabupaten Kebumen dengan payung hukum Peraturan Bupati Kebumen Nomor 47 tahun 2015. Saat itu UPT P2K memberikan 4 (empat) jenis layanan bagi warga miskin yaitu pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi serta data dan pelaporan.

Sejak Tahun 2017 Rumah Harapan telah berkembang menjadi Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) sebagai pusat informasi tentang program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Puskesmas dibentuk melalui Surat Keputusan Kadinsos P3A Nomor 460/340 Tahun 2021 tentang Pembentukan Sekretariat dan Penunjukkan Sumber Daya Manusia Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “Rumah Harapan”. Puskesmas juga berfungsi untuk membangun wadah aduan masyarakat tentang program bantuan sosial, juga menerima berbagai keluhan mulai dari pendidikan, kesehatan, kependudukan, sosial dan ekonomi, mengetahui kepesertaan dan kebutuhan program melalui penjangkauan oleh fasilitator di lapangan dan menjadi pusat penanganan keluhan dan rujukan, dan menghubungkan masyarakat miskin dengan multi layanan dan lintas sektoral sesuai dengan kebutuhan. Saat ini PUSKESOS memiliki 11 (sebelas) jenis layanan yaitu rekomendasi Kartu Indonesia Sehat PBI dan badan amal zakat nasional, data terpadu: (1) Rekomendasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), (2) Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), (3) Rekomendasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), (4) Rekomendasi bantuan biaya pelayanan kesehatan, (5) Konsultasi bantuan sosial, PKH dan Sembako, (6) Rekomendasi adopsi anak, (7) Rehabilitasi PGOT dan ODGJ, (8) Rekomendasi layanan rujukan bagi ODGJ, disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan Gepeng, (9) Rekomendasi perpanjangan dan

pendirian LKS, (10) Layanan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KKBGA) dan (11) Dispensasi Kawin.

Puskesmas berfungsi sebagai wadah pengaduan persoalan kemiskinan yang akan dirujuk ke berbagai pengelola program yang berwenang dan dipastikan dapat ditangani dengan baik dan terpantau proses penanganannya. Salah satu strategi perluasan dan keberlanjutan Puskesmas antara lain dengan advokasi dan sosialisasi pada seluruh stakeholder, menyusun rencana aksi pengembangan Puskesmas SLRT dan membangun pentahelix partisipasi sektor non pemerintah seperti yang sudah dilakukan selama ini yaitu berkolaborasi dengan: Perguruan Tinggi, pihak swasta, organisasi masyarakat sipil, BUMN dan perangkat daerah lainnya. Saat ini Puskesmas Rumah Harapan telah dikembangkan di 130 puskesmas di tingkat desa.

Pada Tahun 2022 Rumah Harapan ditetapkan sebagai program Quick Win Smart City Kabupaten Kebumen. Selain itu Puskesmas merupakan salah satu inisiatif dalam penanggulangan kemiskinan. Keberadaan Puskesmas diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terintegrasi, saling terkoneksi dengan seluruh pemangku kepentingan, membantu validasi data penerima bansos dan adanya puskesmas pada tingkat desa dapat mendekatkan layanan kesejahteraan sosial dengan masyarakat. Puskesmas Rumah Harapan berusaha terus mendekatkan layanan bagi masyarakat miskin dalam menyampaikan keluhan atau aduan terkait dengan layanan kebutuhan program dan bantuan jaminan sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Rumah Harapan (SIRAMAH).

3) MIE KERITING (Makanan Instan Cegah Kerdil dan Stunting)

Inovasi yang diusung oleh Kabupaten Kebumen melalui UPTD Puskesmas Kebumen 2 sebagai salah satu upaya mewujudkan Percepatan Penanganan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Stunting) di Kabupaten Kebumen. Puskesmas Kebumen II berhasil menciptakan sebuah inovasi yaitu “MIE KERITING” (Makanan Instan Cegah Kerdil dan Stunting). Inovasi Mie Keriting merupakan makanan instan yang dibuat dari bahan utama ganyong dan kelor, serta bahan lain yang dibutuhkan sesuai konsep makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan konsep “ISI PIRINGKU”. Mie Keriting telah melalui uji laboratorium sebagai salah satu pertimbangan dalam

pengembangan dan replikasi inovasi agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Inovasi ini telah mengalami pengembangan sejak diinisiasi pada tahun 2020 yang awalnya berupa makanan tambahan yang diberikan langsung kepada balita berupa kue basah, mie basah, bubur dan lainnya kemudian berkembang menjadi camilan instan yang disukai anak-anak dalam bentuk mie instan. Selanjutnya pada Tahun 2022 MIE KERITING berkembang menjadi camilan sehat yang lebih bervariasi dengan bermacam-macam rasa yang disukai anak-anak. Untuk memperluas penerima manfaat, inovasi ini berkembang menjadi industri rumah tangga serta tengah memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB), izin edar/ P-IRT. Bentuk perlindungan atas kekayaan intelektual yang diberikan antara lain fasilitasi penerbitan sertifikat hak cipta, SK Gubernur Jateng atas Pemenang Inovasi, hak paten, serta MOU dengan BRIDA Jateng dalam pengembangan produk inovasi. Selain itu inovasi ini telah ditetapkan sebagai Top 45 Nasional Inovasi Pelayanan Publik pada Tahun 2023 dan menjadi Top Inovasi Pelayanan Publik kelompok keberlanjutan Tahun 2024.

Makanan instan dari inovasi mie keriting ini dapat di replikasi di seluruh wilayah sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan kader kesehatan desa bekerjasama dengan promkes dan program gizi kemudian diolah oleh kader menjadi PMT dan diberikan pada balita pada kegiatan posyandu. Sasaran utama pemberian PMT ini adalah balita yang mempunyai berat dan tinggi badan kurang. Selain itu juga melakukan pembinaan pada kelompok PKK desa yang anggotanya termasuk kader desa untuk mengolah mie keriting ini menjadi sediaan instan yang disukai oleh anak-anak seperti coco crunch dan bit mie kemudian dikemas sedemikian rupa untuk dijual dan menambah pendapatan desa. Pemasaran mie keriting ini akan dilaksanakan melalui koperasi, Bumdes dan toko-toko makanan yang ada di Kebumen. MIE KERITING sebagai peluang baru untuk pengembangan produk yang bermanfaat untuk pencegahan stunting dan untuk menunjang pertumbuhan balita, atau sebagai alternatif Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai pencegahan stunting. Inovasi ini diharapkan menjadi pioner munculnya inovasi-inovasi baru dalam penanganan stunting di Kabupaten Kebumen.

4) Akta Kematian Diserahkan Cepat (AMAT RAPAT)

AMAT RAPAT merupakan wujud komitmen Kecamatan Karangsembung dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan berkeadilan. Layanan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dengan mengedepankan penyederhanaan prosedur serta pemanfaatan teknologi informasi.

Melalui inovasi ini, keluarga duka tidak perlu lagi datang ke kantor kecamatan, dari Desa cukup kirim dokumen melalui Whatsapp, Kecamatan langsung memproses dan menyerahkan Akta Kematian kepada keluarga duka secara langsung. Data kematian ini juga terintegrasi ke beberapa layanan masyarakat seperti BPJS, DINSOS, dan sebagainya sehingga hak-hak administratif keluarga yang ditinggalkan dapat segera dipenuhi sekaligus mendukung tertib administrasi dan akurasi data kependudukan daerah.

5) Sistem Informasi Kebutuhan Pokok (SIMBOK)

Sistem Informasi Kebutuhan Pokok (SIMBOK) merupakan inovasi teknologi informasi yang diinisiasi oleh Disperindag Kabupaten Kebumen bersama stakeholder terkait guna memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk memantau harga kebutuhan pokok di pasar-pasar rakyat secara real time setiap pagi. Melalui aplikasi berbasis online ini, data harga komoditas strategis dapat dihimpun langsung dari lapangan dan tersaji secara cepat, akurat, dan terbaru.

SIMBOK dapat menyajikan harga rata-rata kepokmas di Kabupaten Kebumen, harga rata-rata di tiap pasar setiap hari yang disajikan dalam bentuk daftar harga harian, table perubahan harga per pasar, per hari, per bulan, per tahun. Perubahan harga komoditi juga dapat dilihat dalam bentuk grafik perubahan harga. Terdapat pula menu perbandingan harga komoditi antar pasar rakyat yang dapat digunakan untuk membandingkan harga di pasar satu dengan pasar lainnya.

Kehadiran SIMBOK memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam melakukan monitoring perkembangan harga harian, sehingga potensi gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pengendalian inflasi, pelaksanaan operasi pasar, serta upaya menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Dengan demikian, SIMBOK mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berbasis data di Kabupaten Kebumen.

6) Bayi Lahir Mendapat Paket Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Kartu Indonesia Sehat (BALADA PAK-KIS)

BALADA PAK-KIS merupakan inovasi pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan yang dirancang untuk memberikan kemudahan kepada pemohon dalam mengurus dokumen kependudukan, khususnya bagi bayi baru lahir. Inovasi ini bertujuan memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum sejak dini melalui pelayanan yang cepat, mudah, dan terintegrasi. Inovasi ini memberikan 4 (empat) paket dokumen sekaligus dimana bayi baru lahir mendapatkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pelayanan ini mengurangi beban masyarakat dengan meminimalkan tahapan administrasi serta waktu tunggu, sekaligus meningkatkan ketertiban dan akurasi data kependudukan. BALADA PAK-KIS mempermudah pengurusan dokumen kependudukan dan asuransi kesehatan hanya dengan sekali pelaporan di faskes tempat ibu melahirkan, ketika pulang membawa paket dokumen secara gratis dan praktis. Inovasi ini juga sangat diutamakan bagi penduduk rentan dan berkebutuhan khusus (disabilitas).

Pelaksanaan program inovasi ini terkoordinasi antara BPJS, Rumah Sakit/Klinik Bersalin dan Puskesmas se-Kabupaten Banyumas. Dengan demikian, BALADA PAK-KIS mendukung pemenuhan hak sipil anak, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

7) Cegah Stunting dengan Pantau Kilat Calon Manten (CETING PAK CAMAT)

CETING PAK CAMAT merupakan salah satu inovasi di bidang kesehatan yaitu Puskesmas Alian yang membentuk tim lintas program meliputi dokter, perawat, bidan, analis gizi, promkes, dan sebagainya) terkait pelayanan di dalam gedung dan melibatkan lintas sektor, khususnya KUA untuk memasukkan materi pencegahan stunting bagi calon pengantin pada konseling pranikah, dan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat sebagai upaya preventif dalam percepatan penurunan stunting. Inovasi ini berfokus pada pemantauan dan pendampingan kesehatan calon pengantin sejak pra-

nikah sebagai langkah strategis untuk memastikan kesiapan gizi dan kesehatan sebelum memasuki masa kehamilan.

Data hasil pemantauan menjadi dasar intervensi dini berupa edukasi gizi, pemeriksaan kesehatan, serta rujukan layanan yang diperlukan. Dengan pendekatan ini, inovasi CETING PAK CAMAT diharapkan mampu menekan risiko stunting sejak hulu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung terwujudnya generasi sehat dan berkualitas di Kabupaten Kebumen.

8) Gerakan Pencarian Suspect dan Penderita TBC (GENCAR SAPU TBC)

Gencar Sapu TBC merupakan inovasi daerah di Wilayah Kerja Puskesmas Buayan, Kabupaten Kebumen, yang dikembangkan sebagai upaya percepatan penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC). Inovasi ini bertujuan meningkatkan penemuan kasus secara dini, memastikan pengobatan yang tuntas, serta menekan risiko penularan TBC di lingkungan masyarakat. Kegiatan GENCAR SAPU TBC melalui investigasi kontak pasien TBC yang dilakukan sebulan dua kali, kunjungan rumah orang terduga TBC oleh kader dan petugas.

Melalui pelaksanaan skrining aktif hingga ke tingkat desa, pelibatan kader kesehatan, serta penguatan peran lintas sektor, Gencar Sapu TBC memungkinkan deteksi kasus TBC dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Puskesmas Buayan berperan sebagai pusat koordinasi pelayanan kesehatan, pendampingan pasien, dan pemantauan kepatuhan pengobatan. Dengan pendekatan ini, inovasi Gencar Sapu TBC diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Buayan serta mendukung target eliminasi TBC di Kabupaten Kebumen secara berkelanjutan. Kegiatan GENCAR SAPU TBC memiliki banyak manfaat diantaranya adalah mempermudah akses pelayanan kesehatan khususnya pemeriksaan dahak untuk deteksi dini TBC, mencegah pasien putus berobat, meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku kader dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit, dan menuju eliminasi TBC di wilayah Puskesmas Buayan.

9) Gerakan Sadanis dan IVA Test untuk Mencegah Kanker Leher Rahim dan Payudara (GESIT MERAYU)

GESIT MERAYU (Gerakan Sadanis dan IVA Test untuk Mencegah Kanker Leher Rahim dan Payudara) merupakan salah satu inovasi daerah yang dikembangkan sebagai upaya promotif dan preventif dalam menekan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim dan kanker payudara. Inovasi ini menekankan pentingnya deteksi dini melalui pemeriksaan SADANIS (Pemeriksaan Payudara Klinis) dan IVA Test (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) yang mudah diakses oleh masyarakat.

Melalui gerakan ini, Pemerintah Kabupaten Kebumen mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi perempuan usia subur untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Inovasi GESIT MERAYU memudahkan akses pelayanan kesehatan, dalam kasus spesifik program deteksi dini untuk kanker leher Rahim dan kanker payudara. Kegiatan dilaksanakan oleh satu tim yang terdiri driver, petugas IVA dan bidan pemangku wilayah. Dengan deteksi dini yang lebih cepat, potensi penanganan dapat dilakukan sejak tahap awal sehingga peluang kesembuhan meningkat dan beban pembiayaan kesehatan dapat ditekan. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup perempuan serta mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Kebumen yang sehat dan produktif.

10) HANTARO

HANTARO (Hantar Obat) merupakan inovasi pelayanan kesehatan hasil kolaborasi antara RSUD Sudirman dan PT Pos Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dan kesinambungan layanan kepada pasien. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat dalam memperoleh obat secara tepat waktu tanpa harus datang kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui HANTARO, obat yang telah diresepkan dokter dapat dikirim langsung ke alamat pasien dengan memanfaatkan jaringan distribusi PT Pos Indonesia. Layanan ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi kepadatan kunjungan pasien di rumah sakit, sehingga pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan aman. Dengan pendekatan kolaboratif ini, HANTARO mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, memperkuat kemitraan antarinstansi, serta mewujudkan pelayanan publik yang inovatif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

11)Sistem Aplikasi Pendaftaran Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pembayaran Secara Online (SIAPPIKE POL)

SIAPPIKE POL (Sistem Aplikasi Pendaftaran Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pembayaran Secara Online) merupakan inovasi daerah melalui Disperkimhub yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pengujian kendaraan bermotor. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas kebutuhan layanan yang cepat, mudah, transparan, dan efisien seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan berbasis digital.

Melalui SIAPPIKE POL, proses pendaftaran pengujian kendaraan bermotor hingga pembayaran non tunai dapat dilakukan secara online tanpa harus datang dan mengantre dalam waktu lama, serta hasil pengujian kendaraan bermotor berupa Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) dan smart card pada masing – masing kendaraan bermotor wajib uji. Sistem ini memudahkan pemohon dalam mengatur jadwal pengujian, sekaligus meningkatkan akurasi data dan transparansi pelayanan. Dengan demikian, SIAPPIKE POL diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan uji kendaraan, mendukung keselamatan berlalu lintas, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat di Kabupaten Kebumen.

12)Kredit SIMIKI

Kredit SIMIKI merupakan salah satu inovasi daerah yang dihadirkan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Inovasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan layanan kredit yang lebih inklusif, cepat, dan terjangkau, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses permodalan melalui bank konvensional yang persyaratannya harus didukung dengan agunan.

Inovasi ini juga menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah dengan PT BPR Bank Kebumen dalam menyediakan solusi pembiayaan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan implementasi Kredit SIMIKI, diharapkan pelaku usaha dapat memperoleh dukungan permodalan secara lebih mudah dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan

kapasitas usaha, membuka lapangan kerja, serta berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Kebumen.

1.2. Prestasi Daerah Tahun 2025

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pembangunan manusia dan pelayanan publik telah menghasilkan penghargaan-penghargaan sebagai berikut:

- 1) Penghargaan Procurement Award Indonesia Sustainable Procurement Expo 2025 Kategori Transaksi Produk Dalam Negeri Terbanyak.
- 2) Penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 dari KemenPANRB.
- 3) Penghargaan Festival Literasi Nasional Tahun 2025 Kategori Mitra yang aktif dalam pengembangan literasi daerah.
- 4) Penghargaan daerah dengan jumlah kehadiran tertinggi dalam Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Jawa Tengah.
- 5) Penghargaan Kabupaten Terbaik II dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
- 6) Penghargaan Best Leadership On Human Capital Commitment Dalam Ajang Best Human Capital Commitment 2025.
- 7) Penghargaan Anugerah Prakarsa Inklusi sebagai Kabupaten Ramah Bagi Disabilitas.
- 8) Juara III Lomba Penegakan Peraturan Daerah (Perda) se-Jawa Tengah 2025.
- 9) Penghargaan Top BUMD Award 2025.
- 10) Penetapan Geopark Kebumen sebagai bagian “Unesco Global Park”.
- 11) Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa (PDAM Kebumen) peringkat tertinggi nasional untuk kelas 20.001–50.000 SL.
- 12) Peringkat 1 Penghargaan Pengawasan Kearsipan Eksternal Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah.
- 13) Juara 3 Mandaya Awards 2025 Kategori Kabupaten dari Menko Pemberdayaan Masyarakat.
- 14) Peringkat 8 dengan Kategori Sangat Memuaskan Sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dari Arsip Nasional Republik Indonesia.
- 15) Penghargaan SWASTISABA Kabupaten / Kota Sehat Kategori “PADAPA” Tahun 2025 Dari Kemendagri dan Kemenkes RI.
- 16) Juara 2 TPID Kabupaten/Kota Berprestasi Kawasan Jawa-Bali dari Menko Perekonomian Republik Indonesia.

- 17)Peringkat 3 Pemeringkatan Profil Kesehatan Terbaik Tingkat Kabupaten / Kota Tahun 2025 Dari Kemenkes Republik Indonesia.
- 18)Peringkat 1 Pemkab Terbaik Dalam Pencegahan Korupsi Melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 19)Penghargaan Kategori Umum Outstanding Public Service Innovations Atas Inovasi Peran Manager Dalam Korporasi Pertanian di Kabupaten Kebumen.
- 20)Penghargaan Badan Publik Informatif Dalam Menyampaikan, Menyediakan, Menguasai Informasi publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025